

KECERDASAN BERKESENIAN DI AL-ZAYTUN

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 55 TAHUN III ★ 20 MARET 2008

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



TSJ
SOLUSI
ATASI
BANJIR

BERITA INDONESIA®

www.beritaindonesia.co.id

MAJALAH BERITA PILIHAN

*All in One
One for All*



DEMOKRASI, TOLERANSI DAN PERDAMAIAN



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 55/Th.III/ 20 Maret 2008

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 SURAT PEMBACA 6
 BERITA TERDEPAN 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

TSJ-MEGAPOLITAN

SOLUSI ATASI BANJIR

Jakarta butuh langkah revolusioner untuk mengatasi masalah banjir. Sebab terbukti, setiap langkah tambal sulam tak cukup ampuh menyelesaikan masalah. Demikian pula wilayah pulau Jawa lainnya, yang juga tak henti-hentinya dilanda bencana banjir dan tanah longsor, butuh lebih banyak pendirian "Hutan Kota" supaya setiap kota mampu bertahan terhadap berbagai hampasan..... 16



Ketika Manusia Menyebabkan Luka 20
 Faktor-faktor Penyebab Bencana 21
 Bencana, Pengungsi dan Wabah Penyakit 22
 BNPB untuk Antisipasi Bencana 24
 Bencana Meluas Sampai Jauh 27

BERITA KHAS

Milisi Jiran Berdarah Indonesia 28

BERITA NASIONAL

Lumpur Lapindo: Bencana Alam atau Bukan? 30
 Harga Minyak Goreng Melonjak 31

BERITA HUKUM

Yang Dinanti di Meja Hijau 32
 PR Nan Tak Kunjung Selesai 33

BERITA HANKAM

Sudah Kecil Dipangkas Pula 41



LENERA

KECERDASAN BERKESENAN DI AL-ZAYTUN

Ucapkan selamat datang untuk kebebasan ekspresi seni di ranah ini. Dengan semboyan "Pesantren Spirit but Modern System", Mahad Al-Zaytun meyakini seni sebagai bahasa komunikasi kolektif. Seni menjadi salah satu kebutuhan pencerdasan dan pencerahan hidup. Yang suka musik, silakan. Yang suka tari ada banyak pilihan. Mau yang tradisional silakan pilih, karena sudah beberapa yang dikembangkan di sini. Atau mau breakdance? Asal hati-hati kepalanya.... " kata Syaykh AS Panji Gumilang di atas mimbar saat Muharraman 1429 silam.34

BERITA POLITIK

Aroma Politik di Pilgub BI 42
 RUU Pemilu Disetujui 44
 Fraksi PDI-P Tepati Janji 45
 Jusuf Kalla Ketua Bappilu Golkar 45

BERITA MANCANEGARA

Lingkar Balas Dendam 46
 Raul Castro, Presiden Baru Kuba 46
 Suku Aborigin Terima Kompensasi 47
 Separuh Warga Dunia Akan Tinggal di Kota 47

BERITA TOKOH

Eddie Widiono 56
 Sutiyoso 56
 Hj. Siti Hardiyanti Rukmana 57

BERITA PEREMPUAN

Tanggung Jawab Terhadap Konstitusi 58

BERITA BUDAYA

Singa dan Naga Penolak Bala 59

BERITA FEATURE

Kampung Turis di Markas Pejuang 60

BERITA IPTEK

Dua Laptop Untuk Dua Pekerjaan 61



Windows 7 Asli atau Palsu 62

BERITA LINGKUNGAN

Habitat Baru Si Kepala Bundar 63

LINTAS MEDIA

Listrik, Lumpur Lapindo, dan Natuna 64

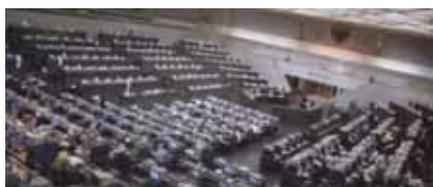
BERITA Hiburan

Punk Band Pemberi Inspirasi 65



BERITA OLAHRAGA

PSSI Ditunggu 5 Agustus 66
 Majukan Olahraga dengan UU SKN 66



BERITA DAERAH

Menyikapi Pengaruh Global Warning 52
 Dana Swakelola Pendidikan Rawan Korupsi 54
 Kejari Tarakan Tunggu Pengaduan 55

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Mangatur Lorieclide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

Koordinator Liputan:
Haposan Tampubolon

Sekretaris Redaksi:
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Marjuka Situmorang

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Doan Adikara Pudan
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Desainer:
ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, **Jawa Barat:** Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Prana Citra, Herman Efendy, **Tarakan:** Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira (Citraprinsip Publikasindo Indoaprint)

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Herni Dewi Farida

Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang
Bantu Hotsan

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 Fax. 83787235

Iklan: Gedung Dewan Pers Lt.1, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Telp. (021) 34830840 - 32195353

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

Ditjen HAKI Sertifikat No. 000.108.028



foto: berindo wilson

Kampus Al-Zaytun secara cerdas mengembangkan kehidupan berkesenian.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Curah hujan bisa diperkirakan kapan tiba dan seberapa besar intensitasnya. Tetapi dampak yang ditimbulkannya bisa-bisa sangat jauh dari semua perkiraan.

Hujan yang melanda bagian timur dan tengah pulau Jawa sejak penghujung tahun 2007, terus saja berlanjut hingga pertengahan Januari 2008, bahkan terulang kembali pada 8 dan 9 Februari hingga awal Maret ini. Di kedua bagian wilayah pulau Jawa yang dari udara terlihat sudah seperti danau sebab pemukiman warga tenggelam.

Jakarta juga ikut terkepung banjir, demikian pula wilayah Tangerang setelah terjadi hujan lokal pada Jumat 1 Februari 2008. BMG memprakirakan ancaman hujan lebat di seluruh pulau Jawa baru akan berakhir Maret.

Kami secara khusus mengangkat masalah banjir tersebut dalam *Berita Utama* dengan satu harapan, para pemangku kepentingan terbuka hatinya untuk mau mengambil keputusan politik bagaimana menyelesaikan masalah banjir secara komprehensif dan terpadu.

Apabila mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pernah menggagas pembentukan megapolitan, untuk menyatukan langkah penanganan banjir di wilayah Ibukota Negara dan sekitarnya, ada baiknya hal itu dikaji kembali. Demikian pula ide membangun kanal raksasa untuk menyangga Ibukota Negara dari ancaman bahaya banjir, diberi nama Tirta Sangga Jaya (TSJ) oleh penggagasnya Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, sangat layak pula untuk turut diperdalam kemungkinan penggunaannya. Dan untuk kota-kota lainnya di pulau Jawa, gagasan Syaykh Al-Zaytun mendirikan "Hutan Kota" sangat perlu dipertimbangkan untuk menjaga ketahanan kota dari berbagai hempasan.

Banjir janganlah menghambat keinginan kita untuk bergerak maju, melainkan harus selalu memberi kearifan baru.

Berita Lentera kali ini masih merupakan kelanjutan laporan langsung pandangan mata pada saat meliput perayaan Tahun Baru 1 Muharam 1429H di Kampus Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Kendati sudah seringkali menyaksikan langsung kiprah Grup Keroncong Perdamaian bentukan Kampus Al-Zaytun, bahkan kepada kami pernah dipersembahkan lagu khusus, baru kali inilah kami berkesempatan menuliskan bagaimana kehidupan berkesenian secara cerdas berlangsung di Al-Zaytun. Kampus Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya perdamaian dan pusat pendidikan toleransi, yang memiliki semboyan *Pesantren Spirit but Modern System*, ini sangat memberikan kebebasan kepada semua warganya untuk mengekspresikan seluruh kemampuannya dalam berkesenian.

Berbagai peristiwa terbaru tak lupa kami sajikan untuk Pembaca, di antaranya pembentukan milisi Askar Wataniah oleh Malaysia merupakan sebuah isapan jempol yang awalnya dilontarkan politisi di DPR (*Berita Khas*), turunnya amanat presiden untuk merevisi APBN 2008 (*Berita Ekonomi*). Rubrik-rubrik lain tetap intens mengikuti perkembangan paling aktual. Selamat menikmati semoga Anda puas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merubah Paradigma

Ada sesuatu yang agak 'lucu' selama tiga bulan terakhir ini terkait dengan fokus masyarakat dan media. Setelah sepanjang Desember didera oleh banjir termasuk hingar bingar berita soal banjir di berbagai media, selama bulan Januari, berita-berita yang muncul digantikan oleh berita soal kondisi kesehatan Pak Harto yang sangat kritis. Begitu Pak Harto mangkat, banjir yang seolah 'tahu diri' itu, datang lagi menenggelamkan rumah-rumah dan menjadi 'bintang utama' di halaman depan berbagai media.

Banjir (baca juga: bencana) di negeri ini sudah menjadi tema yang sering diperbincangkan namun miskin solusi konkrit. Bencana banjir yang merentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur (termasuk Situbondo), misalnya, cuma ditanggapi sebagai musibah atau peristiwa yang lumrah adanya. Meski penyebab banjir sudah diketahui - penurunan mutu lingkungan berupa hutan gundul dan berkurangnya lahan terbuka hijau di hulu sungai yang berfungsi menyerap air hujan - langkah konkrit seperti penghijauan dan mengembangkan hutan kota, baru sebatas khayalan.

Setiap kali banjir datang, beberapa pihak kemudian saling menyalahkan. Sebagian lagi menelurkan gagasan-gagasan agar banjir tidak terulang lagi. Namun, begitu banjir berlalu, semua pihak lupa akan gagasan-gagasannya. Ketika musim kemarau, banjir tidak pernah dibicarakan dan ditangani. Kalaupun gagasan-gagasan itu sempat diimplementasikan, namun kandas di tengah jalan karena kurang mendapat dukungan. Tidak pernah belajar dari pengalaman, itulah yang kita rasakan setiap kali, kota-kota di negeri ini dilanda banjir.

Jakarta sebagai ibukota negara juga tidak luput dari banjir. Banjir yang terjadi tahun ini meski tidak sedahsyat tahun lalu, meninggalkan coreng moreng bagi negara. Bagaimana tidak? Ibukota negara yang sudah padat, macet dan semraut ini juga menyusahkan warga negara lain. Jalur menuju Bandara Soekarno-Hatta ditutup dan lumpuh selama dua hari. Akibatnya, ratusan penerbangan tertunda, ribuan penumpang terlantar dengan kerugian ratusan miliar rupiah. Kenyataan ini membuat kita bertanya-tanya, turis mana yang mau datang ke negara banjir yang Presidennya pun harus ganti mobil karena tak dapat menembus banjir. Padahal banjir itu cuma disebabkan oleh hujan lokal.

Sebagian orang kemudian memelototkan matanya ke Gubernur DKI Jakarta. Kini giliran Bang Foke, gubernur yang baru menjabat setengah tahun ini, yang harus mencak-mencak memarahi pihak-pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas banjir di Jakarta. Bang Foke jelas tidak bisa dibiarkan sendirian mengatasi banjir. Masalah banjir ini membutuhkan kerjasama dari banyak pihak termasuk Presiden sebagai kepala negara dalam menjaga wibawa Ibukota negara yang menjadi pusat pemerintahan. Bukankah Jakarta adalah simbol Indonesia?

Banjir yang berminggu-minggu melanda sebagian wilayah di Jakarta dan Jawa Barat membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan meninjau langsung ke lapangan. Fotonya yang terpampang besar di halaman depan sebuah harian ibukota menunjukkan keseriusannya mengamati lokasi-lokasi yang tergenang dari atas helikopter. Saat itu, Wapres didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur



Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Bupati Bogor dan Bupati Tangerang. Ketua Bappenas Paskah Zuzeta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Setelah meninjau banjir, Kalla langsung memimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir di gedung BKKBN, Jalan Raya Halim, Jakarta Timur. Langkah konkrit apa yang diambil setelah peninjauan itu? Sebuah pertanyaan yang selalu dilontarkan setiap kali pejabat datang meninjau banjir. Jawabannya pun sama, cuma

mereka yang tahu.

Sebelum Jusuf Kalla meninjau, beberapa hari sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mendengarkan presentasi Fauzi Bowo tentang kendala yang dihadapi dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Dalam rapat terbatas yang dihadiri Jusuf Kalla, Menteri PU, Kesra, Perekonomian serta beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu itu, Fauzi Bowo menuding terhambatnya pembangunan kanal timur akibat kendala pembebasan lahan menjadi penyebab banjir tersebut. Selain adanya tata ruang dan penggunaan lahan yang salah kaprah. Namun, setelah banjir berlalu, pertemuan itu seolah tidak pernah ada.

Lantas, apa yang harus kita perbuat agar negeri ini tidak dikenal sebagai negeri pelanggan banjir? Sudah cukup banyak solusi yang ditawarkan dan tinggal diimplementasikan. Mulai dari membuat sumur resapan, memulihkan situ-situ, membuat danau buatan hingga memperluas hutan kota untuk memperbanyak daerah resapan dan konservasi air.

Semua gagasan-gagasan tersebut sulit diimplementasikan karena harus bisa menjadi solusi holistik dan berjangka panjang. Selain itu, diperlukan kesamaan visi di antara para pemimpin yang terkait mulai dari Presiden, para menteri hingga gubernur dan bupati. Visi 'Tirta Sangga Jaya' (Kanal Penyangga Jakarta) yang dilontarkan oleh Syaikh Al-Zaytun AS Panji Gumilang (Berita Indonesia Edisi 36), bisa memberikan gambaran solusi holistik seperti itu yang diperlukan oleh Jakarta dan daerah sekitarnya. Sedangkan untuk mencegah banjir dan longsor yang sering terjadi di daerah lainnya, gerakan penghijauan dan mengembangkan hutan kota, perlu lebih ditingkatkan.

Untuk menopang 83% kawasan Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana alam, peran Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) perlu diperkuat. Bila perlu dibentuk sebuah lembaga baru yang lebih superior dalam menangani tanggap darurat, kesiapsiagaan, pemberdayaan korban hingga menangani kewenangan pendistribusian bantuan. Semua instansi yang terkait bekerja di bawah komando satu lembaga itu. Diharapkan, penanggulangan bencana bisa dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Paradigma penanganan bencana alam juga harus diubah dari upaya rehabilitasi ke pencegahan. Sebab, jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan jumlah rupiah kerugian yang harus kita relakan tiap kali banjir datang. Perubahan paradigma ini, harus dilakukan semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat. ■



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/panda-

ngan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http ://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jakarta 12840
- Telp. (021) 70930474, 8293113
- (021) 83701736

Visit Indonesia Year 2008 Setengah Hati

Jika sesuai dengan harapan, pada tahun 2008, Indonesia akan dikunjungi minimal 7 juta wisatawan mancanegara. Untuk mencapai harapan itu, pemerintah telah meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008 dengan slogan penggugah *Celebrating 100 Years National Awakening*. Kita tentu memiliki harapan yang sama dengan pemerintah. Namun, program ini terkesan masih dilakukan setengah hati. Banyak maskapai penerbangan Indonesia yang dicekal negara lain. Bandara

pun ternyata masih banyak yang belum layak. Bahkan, bandara sekelas Soekarno-Hatta harus terganggu oleh banjir, sedangkan Bandara Polonia justru terbakar. Contoh berikutnya, meskipun Indonesia terkenal dengan negara kepulauan, tapi pelabuhan-pelabuhannya ternyata tidak memenuhi standar. Sehingga, kapal-kapal pesiar yang mengangkut ribuan wisatawan tidak mau berlabuh di Indonesia.

Kemudian, fasilitas objek wisata di daerah juga banyak yang tidak terpelihara, kumuh, rusak dan sebagian lagi memang tidak ada. Sebagian pemerintah daerah juga mengelola objek wisatanya masih setengah-setengah. Hal itu terlihat dari minimnya upaya promosi dan sarana informasi wisata. Kondisi ini diperparah dengan sikap pusat yang hanya kebanyakan menjual Bali. Lalu dengan kondisi seperti itu, apakah Indonesia akan memenuhi target 7 juta wisatawan? Jawabannya tentu tergantung pada kesiapan pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut. Semoga.

Husamah

usya_bio@yahoo.com

Jangan Selalu Menyalahkan Bencana

Bangsa Indonesia sepertinya sedang dicoba. Berbagai bencana datang silih berganti, mulai dari tsunami, gempa, gunung meletus, banjir, tanah longsor serta penyakit. Berbagai bencana itu ternyata ikut berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Banyak yang menyalahkan bencana sebagai sebuah kutukan. Bahkan tidak jarang yang mengaitkan dengan hal-hal berbau klenik seperti menghubungkan bencana dengan pemerintahan sekarang. Tidak ada yang menyalahkan pemikiran seperti itu, tapi alangkah bijaknya kalau kita berpikir secara rasional. Ada beberapa faktor yang membuat bencana itu, diantaranya kesalahan manusia. Misalnya, masalah banjir dan tanah longsor karena penggundulan hutan. Jadi, kita jangan terlalu menyalahkan bencana sehingga menyerah pada keadaan. Kita harus percaya pada falsafah bahwa selalu ada berkah di balik bencana atau musibah. Adanya bencana justru harus kita jadikan sebagai cambuk untuk bangkit dan bekerja keras. Tidak ada gunanya terus meratapi bencana. Kita harus percaya, selalu ada hari esok yang lebih baik. Dengan kita berdiam diri dan menyerah pada keadaan, tidak akan ada perubahan pada hari esok.

Krisnawati

adek.krisnawati@yahoo.com

Pers Nasional dan Kontrol Sosial

Sebagai pilar keempat demokrasi, pers mempunyai peran penting bagi kemajuan bangsa. Setidaknya pers bisa membantu mencerdaskan masyarakat. Selain itu, peran kontrol sosial yang dilakukan pers sangat penting untuk menjaga agar tidak ada penyelewengan. Namun, pers juga harus mengontrol setiap berita yang akan dipublikasikan agar tidak berdampak buruk bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, pers sendirilah yang harus mengontrol pemberitaannya. Dalam zaman kebebasan pers seperti ini, seharusnya insan pers bisa mengembangkan sensor diri. Masyarakat ingin mendapatkan informasi atau berita yang benar, tepat, dan objektif, namun juga berkualitas dan berimbang serta dapat membawa kebaikan kepada masyarakat. Dengan menjunjung tinggi idealisme dan etika jurnalis, bisnis media akan semakin tangguh dan berkembang.

Aufa Jatmiko
autaja@plasa.com

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan
© Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736

Fax.(021) 83787235, 98101871



Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah **BERTAINDONESIA**

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

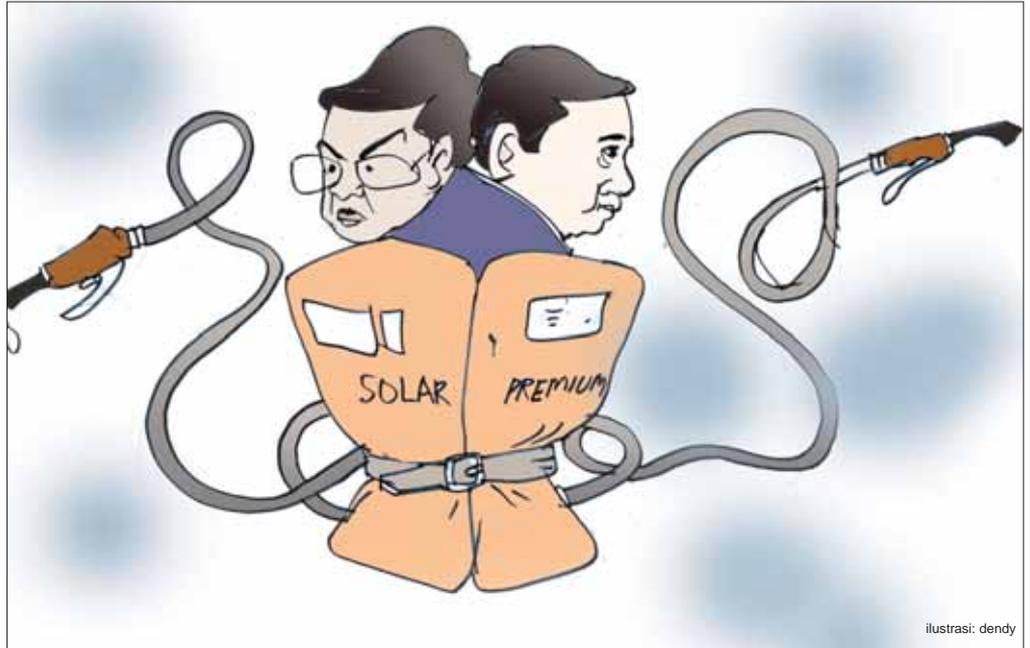
BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Rambung No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Entau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telawai Pura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. 1 Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredup Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapangot Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wak'e'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf V/II Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggi No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd. Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009. **MEDAN** : H.M. Aulia Effendi Panggabean, Jl. Kelambir V/ Gang Kalpataru No. 18, Tanjung Gusta Helvetia, Sumatera Utara - 20147 - **JAWA BARAT** : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung - **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 - **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

Membagi Jatah BBM

Rencananya, program pembatasan akan diterapkan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selanjutnya akan diperluas ke seluruh wilayah Jawa dan Bali hingga akhir 2008. Bagaimana mekanisme pembatasan itu dilakukan? Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo menerangkan, kartu pintar yang memiliki deretan kode angka (*bar code*), akan ditempelkan di kaca depan mobil yang berhak mendapat jatah premium atau solar bersubsidi. Setiap kali mobil mengisi BBM di SPBU yang menerapkan pembatasan, kartu pintar tersebut dibaca alat pemindai. "Alat pemindai itu terhubung dengan komputer yang di dalamnya terdapat data-data kepemilikan kendaraan." Mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan *smart card*, Adi memastikan peluangnya kecil. "Kartu itu akan rusak bila dipindahkan ke tempat lain," paparnya.

Sementara itu, pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar akan diberlakukan terhadap tiga kategori kendaraan. Ketiga kategori tersebut adalah kendaraan pribadi, angkutan umum, dan kendaraan usaha. Penjatahan pembelian bahan bakar untuk kendaraan pribadi disesuaikan dengan jenis kendaraan. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo, mengatakan kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc dilarang membeli bensin premium. Kendaraan tersebut diharuskan membeli bahan bakar jenis pertamax atau pertamax plus.

Kendaraan di bawah 2.000 cc boleh membeli premium, tapi dibatasi. Pembatasan pembelian premium dilakukan menggunakan kuota sesuai dengan kartu pintar. Jika pembelian premium melebihi kuo-



ilustrasi: dency

Pemerintah berencana membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Mei 2008. Tetapi karena persiapannya dirasakan kurang matang, pemerintah akhirnya menunda rencana tersebut.

ta, kata Adi, konsumen harus membeli bahan bakar selain premium. Pembatasan penggunaan bahan bakar bertujuan menghemat subsidi sekitar Rp 10 triliun. Adi menjelaskan, khusus angkutan umum, kuota pembelian premium atau solar lebih besar daripada kendaraan pribadi. Menurut dia, pihaknya akan segera melakukan pendataan kebutuhan bahan bakar kendaraan untuk angkutan. "Misalnya, jatah mikrolet dan bus akan berbeda," katanya. Adapun untuk kendaraan usaha, seperti mobil boks, BPH Migas masih belum membahasnya. "Masih kami kaji," ujar Adi.

Beberapa opsi dan mekanisme pembatasan premium dan solar, lanjut Adi, hingga kini masih dikaji. Dia mencontohkan seperti, apakah semua kendaraan dibatasi terkecuali angkutan umum, apakah pembatasan hanya bagi kendaraan bermesin 2.000 cc, atau apakah semua kendaraan pri-

badi hanya boleh membeli lima liter per hari. "Kami lakukan kajian pembatasan yang tidak merugikan masyarakat," katanya. Pembatasan konsumsi premium dan solar bersubsidi ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengalihkan pagu subsidi BBM sebesar Rp 10 triliun ke subsidi pangan.

Sebanyak Rp 7 triliun-Rp 8 triliun di antaranya untuk premium dan solar, sedangkan Rp 2 triliun-Rp 3 triliun untuk minyak tanah. "Potensi penghematan melalui pembatasan subsidi premium dan solar bersubsidi mencapai Rp 7 triliun-Rp 8 triliun pada 2008." Kendati dijamin aman, penggunaan kartu pintar dinilai anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy, tetap rawan diselewengkan. Akan lebih efektif, katanya, jika mencabut subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dengan kapasitas lebih dari 1.800 cc. "Bisa juga dengan penenaan pajak BBM yang tinggi."

Sedangkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bathoegana mengatakan, jika kebijakan ini akan dilaksanakan, pemerintah perlu menyiapkan bank data pemilik kendaraan dan sanksi tegas bagi yang menyelewengkan. Hingga kini, kata Sutan, pemerintah belum meminta pendapat DPR soal pelaksanaan program tersebut. Yang dibahas baru penggunaan kartu pintar untuk minyak tanah rumah tangga. Komisi Energi telah menyetujui anggaran survei Rp 150 miliar untuk menentukan sasaran keluarga penerima subsidi. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai kebijakan pemerintah ini terlalu tergesa-gesa. "Tak terencana dengan baik," ujarnya. Dia khawatir terjadi kekacauan sosial yang luas karena pemerintah tak memiliki data akurat tentang pengguna BBM bersubsidi.

Setelah ramai diperbincangkan di media massa, pemerintah akhirnya menunda kebijakan pembatasan konsumsi BBM. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengumumkannya di Istana Negara, Jakarta Senin (17/2) usai sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ■ MLP

KPK Diancam Bom, Aulia Pohan Diperiksa

7/2 - Gedung KPK diancam bom pada saat KPK sedang memeriksa Aulia Pohan, mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia periode 1999-2004 sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap besan Presiden SBY itu sempat terhenti setelah KPK mendapat ancaman bom. KPK memperoleh informasi soal ancaman bom sekitar pukul 16.56 WIB dari Polda Metro Jaya, setelah Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menerima surat elektronik berisikan ancaman peledakan bom Gedung KPK. Disebutkan, bom siap meledak dalam waktu dua jam kemudian. Informasi itu diteruskan ke kantor Kepolisian Sektor Setiabudi, untuk kemudian disampaikan ke KPK. KPK lalu memerintahkan pegawai yang tidak bertugas segera meninggalkan ruangan sebab gedung akan disterilkan. Namun petugas Gegana

Polda Metro Jaya yang melakukan penyisiran tidak menemukan benda yang mencurigakan.

Partai Golkar Ajak Purnawirawan Bergabung

8/2 - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Agung Laksono mengajak para purnawirawan TNI supaya bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. Agung merujuk kepada sejarah partai, dimana Golkar merupakan hasil karya para purnawirawan TNI. Agung menjelaskan Golkar tidak merasa alergi dengan para jenderal. Malah, kata Agung, para purnawirawan diakomodasi tidak cuma di tingkat pusat melainkan sampai tingkat daerah. Burhanuddin Napitupulu, Ketua DPP Partai Golkar ikut menegaskan sikap partainya untuk mengajak para purnawirawan TNI bergabung. Burhanuddin memberi con-

toh, purnawirawan yang mencoba mendirikan partai, terbukti tidak satupun memiliki pengaruh yang kuat. Manuver sejenis sudah dilakukan Golkar terhadap Siti Hardiyanti Rukmana, atau Mbak Tutut untuk kembali ke Golkar setelah putri sulung almarhum Pak Harto itu sempat bergabung dengan PKPB.

Kritik Sama Dengan Obat

9/2 - Berbicara pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Semarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah dan dirinya tidak alergi terhadap kritik. Presiden mengibaratkan kritik sama dengan obat sehingga harus diberikan dalam dosis yang tepat. Kalau dosis obat yang seharusnya sehari diberikan tiga kali, tetapi diberikan sampai dua belas kali akan menyebabkan pasien kolaps. Sebagai bangsa yang terus meng-

embangkan diri menjadi bangsa yang demokratis, Presiden mengingatkan tidak sepatutnya kita terus-menerus mengolok-olok diri sendiri karena sesungguhnya banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini dalam periode ini. Selain itu, di hadapan ribuan siswa-siswi tingkat SMP, SMA dan SMK se-Semarang, Presiden mengajak para siswa untuk membaca koran. Dikatakan Presiden, dengan membaca, wawasan seseorang akan semakin luas dan baik sehingga bisa menjadi aset bangsa yang penting untuk memajukan negara. Presiden juga meminta pers nasional untuk mengembangkan prinsip sensor diri karena pemerintah tidak akan pernah lagi melakukan kontrol terhadap pers.

Sriwijaya Raih Gelar Ganda

10/2 - Klub sepakbola asal Palembang, Sriwijaya FC menyandingkan dua ge-

Karikatur Berita



lar juara dalam satu musim kompetisi. Sriwijaya FC juara kompetisi Liga Djarum Indonesia 2007 setelah menaklukkan PSMS Medan dengan skor 3-1, pada final yang berlangsung tanpa suporter di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya tim asuhan Rahmad Darmawan itu sudah meraih gelar Copa Dji Sam Soe dengan menaklukkan Persipura Jayapura 5-4 lewat adu penalti di Senayan (13/1). Sebagai juara kompetisi, Sriwijaya FC berhak mendapatkan tropi dan uang pembinaan sebesar Rp 1,5 miliar.

Kedok Askar Wataniah Terbongkar

11/2 – Ketua Pokja Panitia Anggaran Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, para pemuda Indonesia di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia sedang gencar-gencarnya direkrut bergabung dalam Askar Wataniah. Malaysia merencanakan akan memiliki sebanyak 40 ribu orang anggota Askar Wataniah pada tahun 2010. Syarat menjadi Askar Wata-

niah cukup memiliki KTP Malaysia. Askar Wataniah dimaksudkan untuk memperkuat dua brigade (sekitar 20 ribu personel) tentara Malaysia yang menjaga wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan. Anggota Komisi I DPR Andreas H Pareira memandang Askar Wataniah hanya puncak gunung es lambannya pemerintah menangani masalah perbatasan. Menhan Juwono Sudarsono memahami apa yang dilakukan pemuda Indonesia, karena tergiur imbalan yang cukup menjanjikan yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Menlu Hassan Wirajuda menugaskan Kedubes RI di Malaysia memverifikasi laporan tersebut. Demikian pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menugaskan Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Suhartono Suratman untuk mengecek kebenarannya.

Indonesia Supaya Teladani Sikap M Natsir

12/2 – Wapres Jusuf Kalla mengatakan bangsa Indonesia perlu meneladani sikap dan perilaku Perdana

Menteri Indonesia I Muhammad Natsir, yang dikenal amat santun. Berbicara dalam Peringatan Seabad Natsir, Kalla menyebutkan, di tengah kondisi bangsa ini yang tiba-tiba menjadi pemaarah, diperlukan lahirnya kembali tokoh-tokoh yang cerdas, berpikir integral, dan santun layaknya seorang Natsir. Natsir merupakan seorang politisi, pemikir dan ulama ternama pada masa lalu dari Partai Masyumi. Ia menjadi Perdana Menteri kelima periode 5 September 1950-26 April 1951. Natsir dikenal sebagai elite politik dan negarawan yang rendah hati, santun dan bersuara lembut meskipun terhadap lawan-lawan politiknya. Wapres berharap supaya diterbitkan kembali buku-buku Natsir agar bangsa Indonesia bisa meneladani sikap dan perilakunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku karya yang dimaksud adalah Capita Selecta.

Pemimpin Al-Qiyadah Diadili

13/2 – Ahmad Musad-

deq yang didakwa menyebarkan aliran sesat, mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum Muchamad Muhadjir mengancam Musaddeq dengan hukuman lima tahun penjara karena telah menodai ajaran agama Islam. Musaddeq mulai mengklaim dirinya sebagai nabi atau rasul berawal pada bulan Juli 2006. Ketika itu, menurut pengakuannya, ia melakukan semedi di Gunung Bunder, Pamijahan, Bogor selama 40 hari 40 malam. Usai bersemadi Musaddeq mengikrarkan diri menyandang gelar Al-Masih Al-Maw'ud di hadapan umatnya. Musaddeq juga mengajarkan kewajiban sholat satu kali dalam sehari semalam, yaitu sholat qiyamul lail sebanyak 11 rakaat dengan menghafalkan Al-Qur'an. Ia juga melarang umatnya melakukan ibadah puasa dan membayar zakat. Pada bulan Oktober 2007 Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa aliran ini sesat. Beberapa waktu kemudian Musaddeq ditangkap oleh pihak berwajib dan ditahan.

Karikatur Berita



Menteri Matalatta Tertibkan Penjara

14/2 – Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta mencanangkan bulan tertib masyarakat sebagai program nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia. Tertib yang dimaksud adalah bebas dari pungutan liar, narkoba, pemakaian telepon seluler, maupun warung-warung liar di dalam penjara. Termasuk juga tertib pengamanan, pelayanan, perawatan, pengelolaan pembinaan, serta tertib kehidupan penghuni. Program itu disampaikan Andi Mattalatta sewaktu menjadi inspektur upacara pencahangan program bulan tertib masyarakat, berlangsung di Rutan Salemba, Jakarta. Menurut Andi, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperbarui kapasitas Lapas dan Rutan menjadi seimbang.

KPK Cekal 17 Nama

15/2 – Komisi Pembe-

rantasan Korupsi mengajukan permohonan tambahan pencegahan (cekal) bepergian ke luar negeri terhadap 17 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi aliran dana BI. Mereka berasal dari kalangan pejabat, mantan petinggi Bank Indonesia, pengurus Yayasan Pengembangan, Perbankan Indonesia (YPPI), dan mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, pencegahan ke 17 nama dilakukan setelah penyidik melakukan tindakan serupa terhadap ketiga tersangka kasus BI itu. Ke-17 nama yang dimaksud adalah Aulia Pohan, Aslim Tadjuddin, Bun Bunan Hutapea, Dany Indartoseno, Asnaar Asyari, Bari Djussalam Hadi, Hendro Budianto, Iwan R Prawiranata, R. Kuntowibisono, Lukman Bunyamin, Maman H Soemantri, Paul Sutopo, Ratnawati Priyono, Sudradjad Djiwandono, Sjahril Sabirin, dan Roswita Roza serta Antony Zeidra Abidin.



Taufik Kiemas Masuk RS

16/2 – Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas dirawat di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Agnita Singedikane mengatakan, fisik Taufik terlihat lemas dan langsung drop sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Taufik jatuh sakit setelah mengikuti rangkaian agenda hari jadi PDI Perjuangan, yang puncaknya berlangsung di Palembang 31 Januari. Meskipun kondisi fisik suami mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu mulai membaik, pihak MMC meminta agar Taufik tetap beristirahat antara tiga sampai lima hari.

Presiden Hadiri Perayaan Imlek

17/2 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada para aparat pemerintahan supaya memberikan pelayanan publik yang sama baiknya kepada etnis Tionghoa dan penganut agama Konghucu. Presiden mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan, perkawinan, keimigrasian, perzinahan dan lainnya. Menurut presiden, sejak UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan diterbitkan dua tahun lalu, etnis Tionghoa diperlakukan sama dan setara dengan warga negara yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden menyampaikan hal tersebut saat hadir dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2559 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Presiden juga mengajak mereka yang etnis Tionghoa supaya bersatu, rukun dan tidak membuat jarak.

Ditunda, Pembatasan Konsumsi BBM

18/2 – Rencana kebijak-



an pemerintah membatasi konsumsi minyak tanah, premium, dan solar bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali atau *smart card*, akhirnya ditunda menunggu hingga persiapan pelaksanaannya dirasakan matang. Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro mengumumkannya di Istana Negara, Jakarta usai sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Purnomo mengatakan, menurut Presiden, penggunaan kartu kendali harus betul-betul siap dulu dan tidak usah terburu-buru. Tetapi Purnomo belum dapat memastikan kapan siapnya. Berdasarkan rencana semula, pembatasan konsumsi BBM mulai diterapkan Mei-Juni 2008 di semua SPBU Jadebotabek. Pelaksanaannya diserahkan kepada Pertamina, BPH Migas, Pemda se Jadebotabek, dan Polri. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, penggunaan kartu kendali bisa menghemat subsidi minyak tanah Rp 1,3 triliun, dan mengurangi menghemat pemakaian premium dan solar hingga Rp 10 triliun. Konsumen yang

terkena pembatasan BBM adalah kendaraan roda empat dan dua, baik kendaraan pribadi maupun umum. Diperkirakan 21 juta kendaraan di Pulau Jawa bisa terkena pembatasan BBM.

Presiden Memaafkan Zaenal Ma'arif

19/2 – Mantan Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma'arif mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memaafkannya, terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Zaenal terhadap SBY. Kasus tersebut muncul setelah Zaenal Ma'arif menyebutkan SBY sudah menikah sebelum masuk Akabri tahun 1976. Zaenal mengatakan, pemberian maaf tertuang dalam surat balasan Presiden kepadanya tertanggal 18 Februari 2008, dan dibacakan sebagai bagian dari pembelaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

F-PDI Perjuangan Kembalikan Uang

20/2 – Fraksi PDI Per-

juangan di DPR menepati janji untuk mengembalikan uang insentif ke kas negara, jumlahnya Rp 3,397 miliar. Bambang Wuryanto dan Ganjar Pranowo menyerahkannya secara resmi kepada Wakil Sekjen DPR Nining Indra Shaleh. Pengembalian uang legislasi dibubuhi tandatangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Pramono Anung Wibowo. Sebelumnya, pada 16 Januari 2008 secara pribadi Ganjar Pranowo sudah mengembalikan uang legislasi yang diterimanya sebesar Rp 25,4 juta, demikian pula Yuddy Chrisnandi dari Fraksi Partai Golkar sebesar Rp 36,53 juta. Jumlah uang legislasi selama 2007 yang diterima anggota dewan bervariasi mulai Rp 15 juta hingga Rp 38,9 juta, tergantung keikutsertaan anggota dalam pembahasan RUU. Selama tahun 2007 terdapat 39 RUU yang disetujui menjadi UU. Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan fraksi partainya di DPR tidak akan mengembalikan uang tam-

bahan insentif legislasi ke kas negara, seperti yang sebelumnya dilakukan Fraksi PDI Perjuangan. Agung mengatakan lebih baik uang itu disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti kepada banyak korban bencana yang belum tersentuh oleh pemerintah. Fraksi Partai Golkar di DPR total mendapatkan uang legislasi sebesar Rp 5,031 miliar.

Gaji Guru Masuk ke APBN

21/2 – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Ini berarti, komponen gaji pendidikan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Daerah (APBD). Sedangkan permohonan pengujian UU Nomor 18/2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007, tidak dapat diterima oleh

Karikatur Berita



majelis hakim konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi MK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, berpendapat jika komponen gaji pendidikan dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN hanya sebesar 11,8 persen, sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18 persen. Karena itu, dengan adanya putusan ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan baik dalam APBN maupun APBD.

Pabrik Besar SS Digerebek

22/2 – Sebuah pabrik sabu-sabu (SS) beromset bulanan Rp 3 miliar terletak di Kompleks Perumahan Harapan Indah, Jalan Delima Raya, Blok WZ No 10 RT 2/22, Pejuang Jaya, Medan Satria, Bekasi Barat, berhasil digerebek aparat Polres Bekasi. Petugas menemukan 23 Kg bahan pembuat SS, 17 botol SS cair, 2 ons SS siap edar, termasuk 4 dus efer-

grin, metanol, soda api, aseton, alkohol, beberapa bahan kimia dan sejumlah bahan peracik sabu. Pemilik rumah Hendrik (35) yang tertangkap basah tanpa perlawanan, mengaku hanya berperan sebagai peracik dengan bayaran Rp 5 juta perbulan. Ia mengatakan pabriknya sudah beroperasi sejak 8 bulan lalu, serta sudah menjual SS senilai total Rp 24 miliar.

Tokoh OPM Kembali ke RI

23/2 – Dua mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Frans Albert Joku dan Nicholas Simion Messet kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah menandatangani akta kewarganegaraan RI. Penyerahan akta kewarganegaraan keduanya berlangsung di Sentani, Jayapura oleh Alwi Hamu, utusan khusus Wapres Jusuf Kalla. Frans dan Nicholas sejak tahun 1969 melarikan diri ke luar negeri dan terus melanjutkan kegiatan menentang RI. Frans menjadi warga negara Papua Nugini, dan Nicholas menjadi warga negara Swedia. Frans me-

nurkan perjuangannya tidak membawa hasil sehingga harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua lewat Otonomi Khusus.

Gus Dur Siap Jadi Capres

24/2 – Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan siap menjadi calon presiden (capres). Ia mengungkapkan hal itu dalam deklarasi dirinya sebagai capres dan deklarasi DR H Achmady SH MM sebagai calon gubernur (cagub) Jatim serta pelantikan DPW PKB Jatim 2008-2013 di bawah pimpinan RKH Fuad Amin Imron - H Hasan Aminuddin. Dalam pengantar deklarasi capres, Sekjen DPP PKB Zannubah Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) merinci sembilan alasan untuk "mengantarkan kaum santri ke Istana" (mencalonkan ayahandanya sebagai capres). "Kenapa kita mendukung Gus Dur? Itu karena misi ayah saya untuk mengubah bangsa dalam mensejahterakan rakyat dan

mensejahterakan bangsa Indonesia dalam geopolitik dunia telah dipangkas di tengah jalan dengan isu Buloggate yang tak terbukti sampai sekarang," katanya.

6 Fraksi Tolak Calon Gubernur BI

25/2 – Dua calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dipilih DPR, yaitu Agus Martowardojo dan Raden Pardede ditolak oleh enam dari sepuluh fraksi Komisi XI DPR RI. Mereka, Fraksi PDI Perjuangan, PAN, PKS, PBR, PKB dan PDS meminta Presiden mengajukan calon baru dari internal BI. Andi Rahmat, seorang Anggota Komisi XI menuturkan penolakan tidak lepas dari kondisi kritis perekonomian Indonesia 2008-2010 yang membutuhkan kepemimpinan yang peka terhadap tantangan perekonomian ke depan. Maruarar Sirait dari F-PDI Perjuangan mengatakan, menolak kedua calon dan akan mengembalikan surat ke Presiden dan meminta agar calon



Gubernur BI ditambah dengan figur-figur yang kompeten. Empat fraksi lain belum menyatakan sikap, yaitu Fraksi PD, BPD, PPP dan PG.

Megawati Bentuk "Mega Bhakti"

26/2 – Ketika meresmikan pembentukan Mega Bhakti Bagi Kemanusiaan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri mengeritik kebijakan pemerintah dalam menangani bencana yang disebutnya lebih sering terlambat. Mega menilai pemerintah tidak bisa diharapkan cepat dalam menangani bencana karena kekurangan dana, kekurangan SDM, dan manajemen yang tak baik. Karenanya Megawati berinisiatif membentuk tim "Mega Bhakti Bagi Kemanusiaan", yang memberikan perhatian dan membantu korban bencana alam sebagai bentuk sumbangan kepada masyarakat. Menurut Mega, partai politik seharusnya

tidak hanya berurusan dengan masalah politik, tapi juga masalah kemanusiaan.

Kades Dilarang Urus Parpol

27/2 – Juru Bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan, setiap kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 16 huruf "a". Saut menegaskan hal itu terkait proses verifikasi partai politik yang berlangsung di Dephuk dan HAM. Salah satu partai yang turut didaftarkan adalah Partai Parade Nusantara, dimana awalnya sejumlah kepala desa terlibat di dalamnya dan disebut-sebut merupakan partai yang didukung oleh semua kepala desa. Kata Saut, mantan Mendagri Moh Ma'aruf melalui surat edarannya pada 11 April 2005 sudah pernah mengingatkan kepala desa agar bersikap netral dan nonpartisan dalam pelaksanaan Pilkada, tidak diskriminatif dalam meng-

ambil keputusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan kegiatan dan dinamika politik termasuk pelaksanaan Pilkada.

Kembangkan Jurnalisme Positif

28/2 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh media massa untuk membangun jurnalisme yang positif, dengan cara mengajak masyarakat agar optimis melihat masa depan bangsa. Presiden mengutarakan hal itu pada sidang kabinet terbatas yang dihadiri direksi dan dewan pengawas Perum LKBN Antara, di Istana Negara, Jakarta. Jurnalisme positif, kata Presiden menekankan peran pers sebagai peran pencerahan. Berbagai komponen bangsa melakukan perbaikan dan pers mendorong agar bangsa bangkit menjadi bangsa yang maju dan terhormat. Menkominfo Muhammad Nuh menimpali, inti jurnalisme positif bagaimana media bisa menumbuhkan

optimisme sebagai bangsa.

Kejaksaan Hentikan Kasus BLBI

29/2 – Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman mengumumkan, pihaknya tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah kepada tindak pidana korupsi pada kasus BLBI. Karenanya penyidikan pun dihentikan, serta membubarkan tim khusus yang dibentuk beranggotakan 35 orang jaksa. Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Teten Masduki menanggapi dengan mengatakan, hanya pemerintah yang akan datanglah yang bisa menyelesaikan kasus BLBI lewat jalur hukum. Artinya, pemerintahan yang tidak memiliki keterkaitan politik dengan yang saat ini. Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengaku tidak merasa kecewa dengan hasil penyelidikan tim Jaksa Agung, dalam kasus BLBI yang melibatkan mantan Komisaris Utama BCA Anthoni Salim dan mantan Komisaris Utama

Karikatur Berita



Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim ini.

Syuting Perdana Film Cheng Ho

1/3 – Dua mantan menteri Yusril Ihza Mahendra dan Saifullah Yusuf memulai pengambilan gambar film kolosal Laksamana Cheng Ho, di Studio Global Film di Padang Golf, Kemayoran Jakarta Pusat. Yusril mendapat peran utama sebagai Cheng Ho, sedangkan Saifullah sebagai Raja Majapahit Wikramadana. Film ini menghabiskan biaya 5 juta dollar AS, melibatkan artis dari enam negara yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja dan RRT serta disutradarai oleh Nirattisai Kanjareuk. Pengambilan gambar dilakukan di Thailand, Kamboja, Indonesia, hingga RRT. Laksamana Cheng Ho yang hidup pada zaman kekaisaran Ming, berlayar ke Indonesia dua kali pada 1407 dan 1409. Dia sempat singgah di Pontianak, Kalimantan Barat. Cheng Ho merupakan orang keper-

cayaan Kaisar Yongle yang berkuasa pada 1403 hingga



Jaksa Terima Suap Kasus BLBI

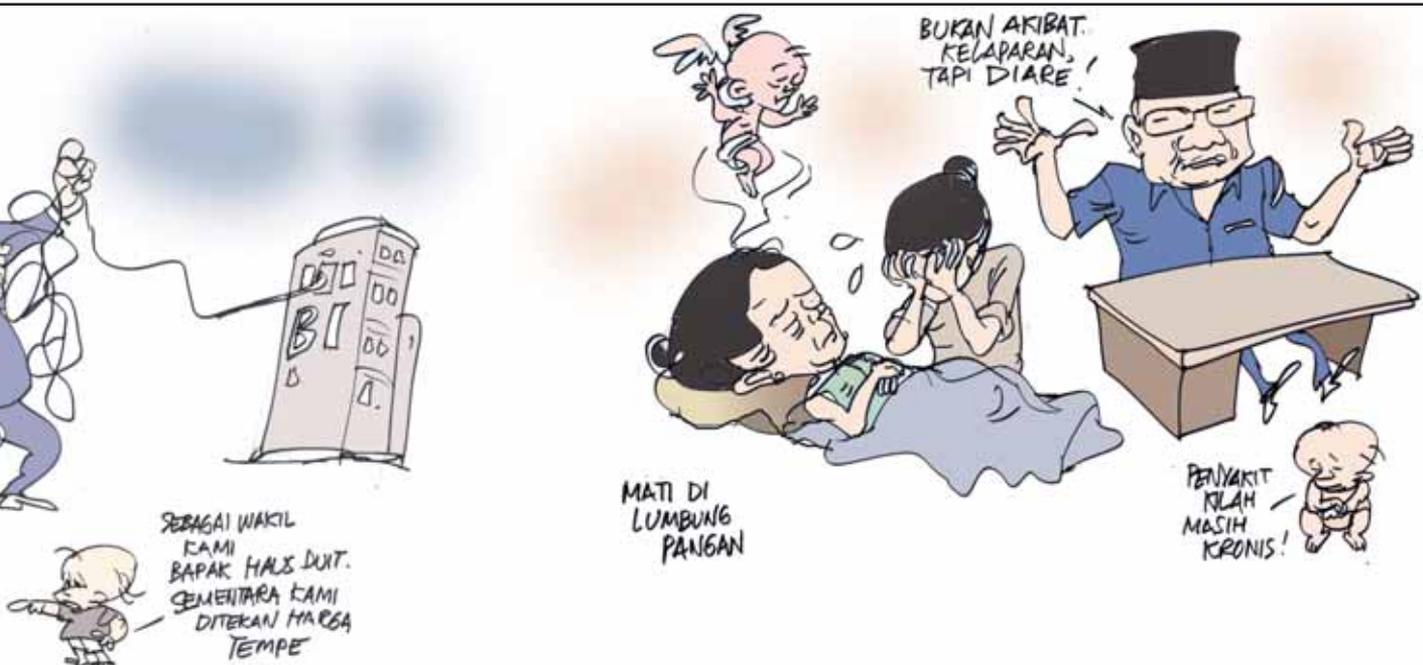
2/3 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap basah jaksa Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Penyidik Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dari Kejaksaan Agung RI. Urip diduga menerima suap sebesar 660.000 dollar AS dari seseorang berinisial AS terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya. Uang yang disimpan dalam dus di mobil Toyota Kijang yang dibawa Urip ke rumah mewah di Jalan Terusan Hang Lekir II No-

1424 kaisar ketiga dari Dinasti Ming.

mor WG 9, Jakarta Selatan, diketahui milik Sjamsul Nursalim. Posisi dus berisi uang dolar ada di lantai belakang jok pengemudi dan di depan jok tengah. Selain uang terdapat tiga setel baju digantung di bagian belakang mobil, salah satunya adalah seragam kejaksaan. KPK melakukan penangkapan dan membongkar mobil hingga menemukan uang pada pukul 18.30 WIB setelah sebelumnya memperoleh laporan dari masyarakat.

PLN Ikuti Sikap Pemerintah

3/3 – PT PLN (Persero) akan mengikuti sikap pemerintah yang memutuskan penundaan pemberlakuan program insentif dan disinsentif tarif listrik mulai 1 Maret 2008. "Program ini sudah berjalan. Tapi, kalau keputusannya ditunda, kami ikuti saja," kata Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Suggu Anwar Arifonung di sela rapat kerja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi VII DPR di Jakarta. Sebelumnya, dalam raker tersebut, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, program penghematan pemakaian listrik melalui penerapan insentif dan disinsentif belum diberlakukan sejak 1 Maret 2008. Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu sebelum memulai program tersebut. Ia menambahkan, program tersebut merupakan upaya pemerintah menghemat subsidi listrik.



TSJ-Megapolitan

Solusi Atasi Banjir

Jakarta butuh langkah revolusioner untuk mengatasi masalah banjir. Sebab terbukti, setiap langkah tambal sulam tak cukup ampuh menyelesaikan masalah. Demikian pula wilayah pulau Jawa lainnya, yang juga tak henti-hentinya dilanda bencana banjir dan tanah longsor, butuh lebih banyak pendirian "Hutan Kota" supaya setiap kota mampu bertahan terhadap berbagai hempasan.

Setelah sebagian besar wilayah timur dan tengah pulau Jawa sejak pengujung 2007 hingga awal 2008 nyaris tenggelam akibat dilanda bencana banjir dan tanah longsor, dengan mengakibatkan berbagai kerugian materiil dan immateriil yang tak ternilai, kejadian terbaru datang lagi. Sejak Jumat 1 Februari, giliran wilayah barat seperti Banten dan DKI Jakarta terkepung banjir akibat guyuran hujan berintensitas tinggi.

Jakarta terlihat lumpuh total, persis sama dengan kejadian pada tanggal dan bulan yang sama setahun yang lalu, tatkala banjir bandang melanda nyaris seluruh Jakarta. Bedanya, kali ini tak ada banjir kiriman dari Bogor.

Apabila hancurnya Jakarta setahun lalu berhasil melahirkan gagasan Tirta Sangga Jaya (TSJ) dari salah seorang anak bangsa Syaykh Al-Zaytun, AS Panji Gumilang, banjir pada masa ini sudah seharusnya dimaknai lebih mendalam dengan adanya langkah pasti penanganan banjir.

Kendati sehari-hari bermukim di desa terpencil di Indrayamayu, Jawa Barat, AS Panji Gumilang seorang pemangku pendidikan sekaligus pengelola Kampus Al-Zaytun mempopulerkan Tirta Sangga Jaya sebagai sebuah ide tentang bagaimana membangun kanal raksasa yang mampu menyangga Ibu Kota Negara dari ancaman bahaya banjir.

Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu pintu masuk utama Jakarta kali ini turut mengalami kelumpuhan total selama berjam-jam, membuat susah semua penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba.

Bandara selama tiga hari penuh menjadi sulit diakses. Penumpang yang akan terbang tak akan pernah bisa tiba di bandara sebab terjebak kemacetan luar biasa. Sementara mereka yang baru tiba tak pernah bisa menuju rumah kediaman masing-masing karena ketiadaan transportasi umum. Kalaupun ada tarifnya sangat tinggi nyaris di luar akal sehat.

Banjir yang rutin melanda Jakarta bukanlah persoalan

sepele. Sebab dampaknya dirasakan oleh semua orang. Seperti banjir yang mengepung Jakarta sejak Kamis (31/1) malam hingga Jumat (1/1) rakyat kecil hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut merasakan, yaitu tatkala iring-iringan mobil Presiden melintasi Jalan MH Thamrin yang kebanjiran.

Dalam perjalanan usai meninjau Pasar Baru Karawang, Presiden harus berganti kendaraan dari mobil sedan Mercedes Benz seri SL600 bernopol B1905BS, dengan kendaraan jenis SUV yang lebih tinggi yang biasa digunakan untuk mengangkut anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Banjir membuat semua jalan protokol di Ibukota Negara lumpuh total. Banyak kendaraan terjebak dalam kemacetan. Bus Transjakarta koridor II (Pulogadung-Harmoni) dan III (Kalideres-Harmoni) total berhenti beroperasi.

Sebanyak 237 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terganggu dengan alasan beragam. Seperti, landasan pacu

terendam air setinggi 50 cm, cuaca buruk mengakibatkan jarak pandang hanya 300 meter, dari kondisi normal minimal 600. Atau, alasan penumpang tak sampai-sampai ke bandara sebab terjebak macet di jalanan.

Sama seperti banjir dan tanah longsor di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terjadi sebelumnya, banjir Jakarta selama dua hari mengakibatkan tiga korban meninggal dunia, dan 60.617 jiwa tinggal dalam pengungsian. Jakarta Pusat, yang sebelum ini tak pernah kebanjiran, apalagi ada warganya yang mengungsi, kali ini merelakan setidaknya 10.000 jiwa warganya harus hidup dalam pengungsian.

Solusi Belum Diputuskan

Jakarta yang sudah sekian bulan berada di tangan para "ahlinya" kembali mengalami banjir karena para pengambil





ilustrasi: dendy

keputusan, hingga saat ini masih saja belum memutuskan apa langkah penanganan yang komprehensif sebagai solusi total pencegahan banjir. Padahal, frekuensi maupun intensitas banjir sudah semakin meninggi dan tak taat musim.

Wapres Jusuf Kalla yang dengan sigap pada hari Minggu (3/2) meninjau Jakarta yang tergenang air, memberikan instruksi yang isinya kurang lebih sama dengan apa selama ini pernah didengar oleh masyarakat. Kalla, yang menaiki helikopter disertai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan sejumlah menteri, meminta agar pembebasan tanah untuk proyek Kanal Banjir Timur (KBT) dipercepat.

Kepada Gubernur, Kalla menginstruksikan supaya segera memperbaiki aliran sungai dan mengoptimalkan muara untuk melintasi banjir.

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto juga menawarkan solusi yang berjangka pendek saja. Yaitu menyiapkan pompa-pompa air untuk mengeringkan jalan tol. Djoko juga berjanji menaikkan permukaan jalan tol Sedyatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta agar tidak gampang direndam banjir.

Kata Djoko, Maret ini Jasa Marga akan membangun jalan layang di sisi Tol Sedyatmo sepanjang tujuh kilometer, setiap jalur dibuat dua lajur, diperkirakan mulai beroperasi 2009. Tol layang akan melintasi penggal jalan yang selama ini terendam.

Berselang beberapa hari kemudian, Selasa (5/2), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan rapat terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, menelurkan keputusan solusi banjir Jakarta yang juga masih abu-abu. Dari rapat yang dihadiri para Menteri dan Gubernur, gagasan yang muncul

hanya mengurangi beban Kanal Banjir Barat (KBB).

Caranya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyambung aliran Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban Kanal Banjir Barat yang selama ini dialiri air Sungai Ciliwung. "Kajian secepatnya diselesaikan," ucap Fauzi Bowo.

Untuk masa depan Bandara, rapat yang dipimpin Presiden juga hanya menyepakati penanganan yang bersifat darurat saja. Yaitu, untuk mencegah banjir menutupi jalan tol ke Bandara, maka penanganannya harus dapat diatasi dalam tempo lima jam. Caranya, mengerahkan 15 pompa milik Pemprov DKI dan tujuh pompa Jasa Marga

"Objek vital harus tetap berfungsi dalam semua keadaan untuk menjaga kelangsungan ekonomi dan pemerintahan.

Pompa-pompa itu membuang air sampai 3.000 liter per detik sehingga banjir dapat diatasi dalam lima jam," kata Fauzi.

Rapat memutuskan pula, Pemerintah Pusat akan menangani banjir secara komprehensif dengan mengeruk semua sungai dan situ yang ada di Jakarta. Sedangkan Pemprov DKI akan memperbaiki jaringan drainase dalam kota untuk mengatasi banjir lokal.

Kombinasikan

Semua gagasan tersebut terasa masih berjangka pendek, tambal sulam, dan belum menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Padahal, pilihan yang paling revolusioner sekalipun sudah harus segera diambil oleh para pengambil kebijakan, demi melepaskan warga dari rasa takut ancaman bahaya banjir.

Kombinasi antara konsep megapolitan yang pernah digagas oleh Sutiyoso, tatkala



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta memantau kondisi Jakarta dari Monitor.

foto: presidensby.info

masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, dengan gagasan Tirta Sangga Jaya (TSJ) yang dimimpikan oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, merupakan pilihan yang paling memungkinkan untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini.

Sedangkan di wilayah lainnya di pulau Jawa yang kerap maupun yang belum pernah dilanda banjir, satu lagi gagasan Syaykh Al-Zaytun yang sudah teruji kegunaannya di Indramayu yakni pendirian "Hutan Kota", harus pula di-segerakan pendiriannya.

Konsep Megapolitan dahulu digagas Sutiyo so supaya setiap pemerintahan di wilayah sekitar Ibukota Negara yang terkait dengan masalah banjir bisa bersatu pandangan dalam menelurkan keputusan penting. Kesemua wilayah diintegrasikan dalam konsep ruang wilayah bernama Megapolitan. Sedangkan masalah pemerintahan, mereka masing-masing tetap berdiri otonom dan mengayomi warganya.

Gagasan Megapolitan sesungguhnya bagai gayung bersambut dengan "mimpi" Syaykh tentang Tirta Sangga Jaya. Sebab TSJ menginisiasi dibangunnya dua kanal raksasa di sisi timur dan barat Jakarta, untuk menyangga wilayah Ibukota Negara dari

ancaman banjir.

TSJ dalam konsepnya bermula dari pembangunan waduk raksasa di hulu, kira-kira terletak di wilayah antara Bogor dan Cibinong atau sekitar 60 kilometer dari Monas. Waduk raksasa dibangun untuk menampung setiap curahan air hujan di wilayah Bogor.

Dari waduk, air dari Bogor lalu dialirkan ke dua kanal raksasa yang dibangun masing-masing selebar 100 meter, dan masing-masing sepanjang 120 kilometer.

Karena dimaksudkan untuk menyangga Ibukota Jakarta, kanal mengalir di sisi timur melintasi Karawang dan Bekasi, serta di sisi barat melintasi Tangerang. Muara masing-masing kanal bukan di Pantai Indah Kapuk (PIK), tetapi terpisah di Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Keduanya di pantai utara pulau Jawa.

Kedua kanal raksasa dibangun terhubung secara terintegrasi dengan ke-13 sungai yang mengalir Jakarta. Sehingga, sebelum air sungai tiba di muara akhir, TSJ lebih dahulu mendinamisir aliran air di ke-13 sungai yang melintasi wilayah Jakarta. Air harus terlebih dahulu memanfaatkan sebelum tiba di muara.

Selama ini ke-13 sungai yang membelah Jakarta terbukti tak mampu menampung luapan

air hujan Jakarta, apalagi bila ada tambahan kiriman air dalam jumlah besar dari Bogor.

Tetapi apabila semua sungai yang mengalir Jakarta, demikian pula sungai di Karawang, Bekasi, dan Tangerang diintegrasikan dengan kanal TSJ maka tinggi-rendah permukaan semua sungai dapat diatur sedemikian rupa sehingga air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misal untuk keperluan transportasi air, wisata air, air baku air minum, irigasi teknis, penggelontoran sungai dan lain-lain.

Dengan demikian, tatkala hujan deras Jakarta tak lagi harus kebanjiran. Dan ketika musim kemarau panjang tiba sumur-sumur warga tak perlu kekeringan. Demikian pula area persawahan di Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Tangerang, tak akan pernah pula kekurangan pasokan air. TSJ akan mengatur semua keperluan air memanfaatkan kecanggihan teknologi terbaru pengaturan permukaan air.

Dengan pengaturan permukaan air sungai, keinginan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto agar setiap jalan memiliki drainase yang baik, menjadi terakomodasi pula.

Waspada Hingga Maret

Jika di Ibu Kota Negara Syaykh Al-Zaytun menggagas

Tirta Sangga Jaya, untuk semua kota di Indonesia Syaykh bukan hanya menggagas, tetapi sudah membuktikan berdirinya sebuah miniatur "Hutan Kota" yang memberikan keteduhan di Kampus Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Kampus Al-Zaytun yang ringdang adalah "Hutan Kota" dimaksud.

Pada pertengahan tahun ini, dalam rangka mengisi kegiatan Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun (ASSA), Syaykh bersama segenap eksponen Al-Zaytun dan para penggiat olahraga yang bergabung di ASSA akan bersepeda keliling pulau Jawa. Di setiap kota yang disinggahi Syaykh akan menanam pohon sebagai cikal bakal pendirian "Hutan Kota" di kota yang bersangkutan.

Pendirian "Hutan Kota" yang dimaksud Syaykh adalah, menanami kota dengan aneka pohon yang kuat yang mampu berumur panjang seperti pohon jati, eboni, kayu api, dan lain-lain.

"Hutan Kota" yang memadai di kala musim panas akan memberikan keteduhan bagi setiap orang untuk berlindung dari panas, serta menyediakan oksigen yang menyehatkan semua. Sedangkan di musim hujan "Hutan Kota" menjadi penyangga ancaman tanah longsor dan penyerap air hujan terbesar.



Peta pembangunan kanal di lingkaran luar Jakarta untuk mengatasi banjir tahunan di ibukota.

“Hutan Kota” menjadi pa-
yang penyelamat di segala
musim. Sebab di musim hujan
kota takkan kelimpasan air,
dan di musim panas takkan
kekurangan air.

Pendirian “Hutan Kota” di
semua wilayah kota dan dae-
rah di Indonesia sangat diper-
lukan. Sebab kendati “musim”
bencana banjir dan tanah long-
sor di wilayah timur dan ten-
gah pulau Jawa sudah “ham-
pir berakhir” pada pertengah-
an Januari, nyatanya, bencana
sejenis masih saja terjadi bebe-
rapa waktu kemudian.

Hujan deras yang meng-
guyur Kota Solo, Jawa Tengah
Selasa (5/2) menyebabkan
beberapa daerah di Kota Ben-
gawan Solo kembali dilanda
banjir. Ratusan rumah di tiga
kecamatan yaitu Kecamatan
Pasar Kliwon, Kecamatan
Jebres, dan Kecamatan Seren-
gan, terendam air setinggi
50-120 sentimeter. Kawasan
banjir terletak di dekat aliran
anak Sungai Bengawan Solo.

Pada hari yang sana bencana
longsor menimbun tujuh or-
ang warga Desa Sidangwangi,
Kecamatan Bantar Kawung,
Kabupaten Brebes, Jawa Ten-
gah. Enam korban belum



Banjir di Manggarai Jakarta.

diketahui nasibnya, sedangkan
satu korban dipastikan meng-
alami luka berat. Tiga rumah
turut hancur, tiga rumah lain-
nya mengalami rusak berat.

Banjir mempercepat keru-
sakan infrastruktur jalan. Bel-
um lagi biaya-biaya sosial dan
kerugian ekonomis yang di-
alami masing-masing warga
korban banjir.

Beberapa hari kemudian
bencana terjadi di Jakarta,
Bekasi Jepara, Jawa Tengah,
dan sebelumnya di Situbondo,

Jawa Timur.

Di Jakarta, hujan disertai
angin kencang Sabtu (9/2) me-
rubuhkan sejumlah rumah dan
21 pohon jalan tumbang. Di
Bekasi hujan badai mengaki-
batkan kabel listrik tegangan
menengah putus, hingga men-
yetrum delapan orang warga
dan membuat empat di antara-
nya tewas seketika dengan kon-
disi mengenaskan sekejor tu-
buh hangus terbakar.

Pada hari yang sama di
Jepara hujan angin yang ter-

jadi Sabtu (9/2) mengakibat-
kan seorang bocah tewas ter-
timpa reruntuhan bangunan
rumahnya akibat sebuah po-
hon beringin tumbang.

Kawasan tapal kuda Situ-
bondo terlihat hancur disapu
banjir bandang yang dahsyat
mengakibatkan 15 orang war-
ga meninggal dunia. Mereka
tewas dan hilang terseret de-
rasnya banjir yang begitu kuat.
Sejumlah jembatan yang putus
membuat Kota Situbondo se-
makin terisolasi. Ribuan ru-
mah warga turut hanyut hin-
ga rata dengan tanah. Demik-
ian pula beberapa mobil ikut
terseret banjir.

Sejak Jumat (8/2) pukul
15.00 WIB hujan tiada henti
melanda Situbondo, hingga
akhirnya luapan air tak ter-
tahan lagi memasuki kota
sekitar pukul 21.15. Sejak ma-
lam itu ribuan warga mulai
histeris dan panik. Banyak
terdengar jeritan takbir, ada
banyak suara memanggil-
manggil nama orang, isak tan-
gins terdengar dimana-mana.
Aliran listrik pun padam total.

Air bah yang datang dari
hulu sungai di Pegunungan
Raung, Bondowoso memora-
porandakan semua yang dilau-
lunya. Lahan pertanian dan
permukiman dibuat rata den-
gan tanah. Jembatan, jalan,
dan prasarana umum lainnya
di Situbondo turut berantakan.

Badan Meteorologi dan Geo-
fisika (BMG), lembaga paling
dipercaya memprakirakan
iklim dan cuaca, menyebut-
kan, peluang hujan lebat di
Jakarta baru akan berakhir
pada bulan Maret nanti, saat
Ibu Kota memasuki fase akhir
musim hujan.

Kukuh Ribudiyanto, Kepala
Sub-Bidang Informasi BMG,
mengatakan, pola hujan men-
datang sebagian besar wilayah
Jakarta dihajar banjir, hujan
lebat berlangsung sejak dini
hari sampai siang. Hujan yang
akan datang lebih lebat, ber-
durasi singkat, tetapi disertai
angin puting beliung.

Wilayah lainnya di pulau
Jawa? Sama saja. Karena itu,
warga Jakarta dan Pulau Jawa
perlu tetap waspada sepanjang
Megapolitan, TSJ, dan “Hutan
Kota” belum menjadi keputus-
an politik pemerintah. ■ HT

Ketika Manusia Menyeba

Sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kelalaian ekologis dan buruknya pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah.

Bencana banjir dan longsor nyaris menenggelamkan sebagian pulau Jawa mengawali pergantian tahun baru 2008. Bencana alam bagaikan tak kunjung henti. Padahal belum pupus ingatan kita pada peristiwa 26 Desember 2004, kala tsunami melanda Aceh, yang menewaskan kira-kira 200.000 penduduk. Belum sembuh luka di Banda Aceh, bencana melanda Pantai Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejumlah 92 orang masih belum diketemukan dan menelan korban jiwa 656 orang serta memaksa 45.000 penduduk tinggal di tempat pengungsian.

Sejak itu, bencana alam sulit menyusul menimpa bumi Pertiwi. Banjir dan longsor, gempa bumi, hingga bencana lumpur Lapindo.

Ketika gelombang tsunami meluluhlantakkan Aceh, semua bagai sependapat bahwa alam sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut, begitu pula pada saat banjir bandang menenggelamkan Jakarta, para pengamat lingkungan berkalah siklus lima tahunan sebagai penyebabnya.

Posisi geografis kepulauan Indonesia yang sangat unik menyebabkan Indonesia termasuk daerah yang rawan terhadap bencana. Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah *Pacific Ring of Fire* (deretan gunung berapi Pasifik), yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem pinggiran Asia Timur dan Ge-

rakan Sirkum Australia. Kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi.

Meskipun kepulauan Nusantara mempunyai sifat iklim tropis, namun secara mikro tiap pulau mempunyai karakteristik tersendiri, mulai dari Sumatera hingga Papua yang sifat iklimnya semakin kering. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh letak kepulauan yang berada di antara 2 samudera (Hindia dan Pasifik) dan 2 benua (Asia dan Australia). Angin muson barat yang bertiup dari Asia dan Pasifik mengakibatkan terjadinya musim penghujan, sementara angin muson timur yang bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau.

Pengurusan sumber daya alam dengan cara-cara yang merusak telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekologis. Ketika hutan musnah, tidak hanya flora dan fauna yang hilang, tapi juga telah menyebabkan terjadinya rentetan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang telah menelan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit.

Adanya faktor manusia sebagai penyebab terjadinya berbagai bencana di Tanah Air, semakin memperoleh pembenaran ketika muncul laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group I yang dikeluarkan pada 2 Februari 2007 di Paris, Perancis, yang menyebutkan, bahwa munculnya berbagai bencana di berbagai belahan dunia disebabkan adanya perubahan iklim akibat dari beragam aktivitas manusia.

Banyaknya peristiwa banjir, longsor, dan rusaknya fungsi ekologis disebabkan oleh eks-



Banjir mengakibatkan kerusakan lahan pertanian masyarakat.

ploiitasi berlebihan atas alam yang dilakukan oleh manusia baik yang diizinkan oleh negara maupun yang dilakukan secara ilegal.

Ironisnya, pemerintah terkesan hanya memberikan respons seadanya. Misalnya ketika masalah peralihan fungsi hutan yang pada awalnya dijadikan sebagai daerah resapan air menjadi wilayah hunian dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Pada saat bersamaan, pemerintah begitu gencarnya memberikan izin pembangunan perumahan di wilayah tersebut demi menambah pendapatan asli daerah.

Atau ketika tanah longsor dan banjir terjadi akibat adanya praktik *illegal logging* dan perambahan hutan, justru di saat yang sama pengadilan

menjatuhkan hukuman yang ringan bahkan dalam beberapa kasus membebaskan para pembalak dari jeratan hukum. Padahal, negara diperkirakan kehilangan 30 juta meter kubik kayu setiap tahunnya akibat aksi pembalakan liar ini.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menganggap rentetan bencana yang terjadi di Indonesia sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya. Tidak pernah ada kebijakan pemerintah yang menggunakan keseimbangan ekologis.

Longgeng Ginting dari WALHI mengatakan, faktor manusia itu antara lain dalam bentuk penebangan hutan, pembangunan di kawasan resapan, tingginya penimbunan rawa untuk kawasan permukiman dan industri, serta pe-

abkan Luka



foto: repro media indonesia

manasan global akibat polusi udara yang tidak terkendali.

Lemahnya pengawasan dari aparat negara dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan berlanjutnya pelanggaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Longgema mengatakan, berdasarkan catatan WALHI, selama enam tahun terakhir 85 persen bencana yang terjadi merupakan bencana ekologis yang ditandai dengan tanah longsor, banjir, kebakaran dan sebagainya. Hal itu bukan sekadar bencana alam seperti yang dibayangkan orang, tetapi merupakan krisis ekologi yang luas dan menghasilkan bencana ekologis pula.

Sebagai sebuah fenomena kerusakan lingkungan, bencana ekologis yang terjadi sudah luas sekali atau *massive*. Banyak sekali daerah yang da-

lam sejarah tidak pernah banjir atau mengalami tanah longsor sekarang sudah terkena. Alam Indonesia sekarang sudah sangat rapuh dan sensitif terhadap iklim ekstrim. Kalau kemarau akan ada kekeringan dan kelangkaan air yang luas. Kalau musim hujan maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Jadi secara ekologis, alam di Indonesia sudah kehilangan keseimbangannya.

Longgema menganggap pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Banyak kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonominya menyebabkan bencana itu terjadi. Selanjutnya tentu saja adalah pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang melakukan aji mumpung memanfaatkan kebijakan yang longgar, tidak ada standar lingkungan, tidak ada standar sosial dan tingkat korupsi yang besar. Pemerintah Indonesia bukannya tidak sadar dengan masalah ini, tetapi malahan masih melakukan kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan kelestarian alam.

Misalnya, ada kebijakan pertambangan di hutan lindung, padahal hutan lindung secara hukum harus dilindungi. Selain itu, kebijakan sumber daya alam Indonesia masih sangat eksploitatif. Lingkungan cuma sebatas kebijakan saja. Ekonomi masih di atas segalanya.

Sebagai masalah ekologis, solusi satu-satunya adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas ekologi itu sendiri. Jadi jika hanya dilakukan seperti yang sekarang yang bersifat responsif dan reaktif dan hanya menanggulangi bencana maka hal itu tidak akan pernah bisa mengatasi akar masalah.

Penanganannya harus berjangka panjang dan harus dibuktikan dengan aksi-aksi konkrit pemerintah Indonesia, menaati peraturan yang ada, menegakkan hukum, dan mengikuti konvensi-konvensi internasional. ■ RH



Penebangan hutan menjadi penyebab utama bencana banjir.

Faktor-faktor Penyebab Bencana

Suatu kejadian alam dikatakan sebagai bencana (*disaster*) apabila mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana, dan utilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat.

Namun apabila kejadian alam itu tidak sampai mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, apalagi kerugian harta benda dan kerusakan-kerusakan sarana/prasarana lain, maka kejadian alam itu disebut sebagai fenomena alam biasa.

Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik oleh alam, yang masih dibagi lagi menjadi dua faktor penyebab, yakni: *hazards of exogenic origin* (bencana alam asal luar), dan *hazards of endogenic origin* (bencana alam asal dalam).

Bencana yang disebabkan oleh proses alam ini adalah bencana akibat proses geologis, proses geomorfologis dan proses klimatologis, yang mengakibatkan bencana alam.

Bencana alam sebenarnya merupakan proses alam dengan intensitas yang melebihi normal, seperti: gempa bumi, letusan gunung api, longsor, dan gelombang badai.

Dari bencana alam-bencana alam tersebut di atas, yang termasuk di dalam bencana asal luar (*hazards of exogenic origin*), adalah:

1. Banjir,
2. Erosi,
3. Gerakan tanah,
4. Debris avalanches,
5. Kekeringan.

Sedangkan yang termasuk dalam bencana asal dalam (*hazards of endogenic origin*), adalah:

1. Gempa bumi,
2. Gelombang pasang (tsunami),
3. Letusan gunung api (hujan abu, aliran lahar, aliran lava).

Adapun bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (*hazards of anthropogenic origin*), adalah:

1. Degradasi lingkungan,
2. Penggundulan hutan yang berakibat pada bencana kekeringan, erosi/banjir,
3. Gempa bumi akibat pembangunan dam,
4. Penurunan tanah/lahan (amblesan/tanah terban), longsor, dan akibat ulah manusia (dalam rangka pengembangan wilayah yang tidak berwawasan lingkungan).



Kesehatan para pengungsi merupakan prioritas utama.

foto: repro media indonesia

Bencana, Pengungsi dan Wabah Penyakit

Jika Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat bencana dibiarkan, maka angka kematian pengungsi akan meningkat. Perlu sistem krisis bencana yang selalu siaga.

Bencana alam telah menjadi gejala rutin tahunan yang dialami Indonesia 4 tahun terakhir ini, dimulai dari tsunami di Aceh, gempa bumi tektonik di Yogyakarta dan Jawa Tengah saat publik mewaspada ancaman Letusan Gunung Merapi. Setelah itu, lumpur Lapindo yang sampai saat ini masih terus menyembur hingga menenggelamkan banyak desa. Belum lagi

ancaman meletusnya gunung-gunung berapi.

Kini mengawali tahun 2008, banjir dan longsor terjadi di mana-mana, terutama di Pulau Jawa. Para pengungsi sampai saat ini masih menempati barak-barak dan tempat penampungan darurat.

Bencana tidak hanya berdampak kepada masalah ekonomi ketika rumah, ternak, sawah dan ladang rusak tenggelam

dan para pengungsi tidak bisa bekerja mencari nafkah. Bencana juga berdampak pada pendidikan dan kesehatan. Masalah kesehatan korban bencana alam bisa dibagi menjadi dua hal yakni kesehatan fisik dan kesehatan mental.

Masalah kesehatan fisik antara lain munculnya penyakit menular baik karena perantara kontak kulit (penyakit kulit), perantara makanan (diare), perantara udara (infeksi saluran pernafasan). Jika munculnya penyakit-penyakit tersebut tidak segera ditanggulangi, maka akan berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB/Wabah).

Jika KLB dibiarkan, maka angka kematian akan meningkat terutama pada anak-anak dan manula yang memiliki daya tahan tubuh lebih lemah dibandingkan usia remaja dan dewasa. Selain ditanggulangi dengan obat-obatan, maka hal yang perlu sekali adalah higienitas perorangan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya KLB.

Sayangnya, kondisi tempat pengungsi-



foto: berindo wilson

Menkes Siti Fadillah Supari: Desa Siaga dicanangkan termasuk untuk menangani masalah kesehatan saat bencana.

an seringkali tidak memenuhi syarat sanitasi. Peralannya, tempat pengungsian selalu disiapkan mendadak saat terjadi bencana.

Mestinya, setiap daerah yang berpotensi terkena bencana baik itu banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa tektonik, dan sebagainya harus mulai memiliki lokasi khusus pengungsian yang terdesain secara saniter dan berkapasitas besar. Kalau perlu, setiap daerah di Indonesia harus mulai memilikinya agar sewaktu-waktu ada bencana, lokasi tersebut bisa langsung digunakan.

Salah satu prioritas yang harus disediakan di lokasi pengungsian adalah air bersih. Perbaikan kualitas air bersih, juga harus diutamakan agar terhindar dari serangan penyakit. Selain itu, pemerintah setempat harus menyiapkan pengawasan pembuangan kotoran manusia/tinja.

Penyediaan air untuk kebutuhan warga yang berada di pengungsian, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal air bersih bagi korban bencana alam, baik untuk keperluan minum, masak maupun kebersihan pribadi. Peralannya, masalah utama menurunnya kesehatan banyak disebabkan lingkungan yang kurang bersih akibat kecurangan air dan mengonsumsi air yang tercemar.

Penyediaan pembuangan kotoran, tempat pembuangan sampah, pemberantasan vektor, dan pengelolaan makanan, harus menjadi perhatian serius dari tim penanggulangan dampak bencana.

Sarana pembuangan kotoran/jamban/sarana sanitasi, mesti diprioritaskan untuk mencegah terjadinya penyakit, terutama diare. Penyediaan jamban harus di-

sertai dengan penyediaan air dan penggunaan jamban maksimal untuk 20 orang.

Sampah harus dikelola dengan baik, karena merupakan tempat perindukan lalat dan tikus. Karena itu, di tempat penampungan pengungsi harus disediakan tempat sampah berupa bak sampah (kapasitas 50-100 l) untuk 25-50 orang/hari dan kantong sampah 1 lembar untuk satu keluarga.

Pemberantasan vektor, seperti lalat, nyamuk, tikus atau serangga sebagai penular penyakit, juga harus diutamakan. Keberadaan vektor tersebut antara lain terkait dengan pemilihan lokasi penampungan pengungsi. Pengawasan ketat perlu diberikan pada dapur umum yang menyediakan makanan bagi pengungsi. Pengawasan lebih diarahkan pada kualitas dan keamanan bahan makanan, kebersihan dan peralatan/perabotan, kebersihan penjamah makanan, tempat pengelolaan dan penyimpanan makanan dan ketersediaan bersih.

Siaga Bencana

Pada Desember 2006, Presiden RI meresmikan terbentuknya regionalisasi pusat bantuan penanganan krisis kesehatan akibat bencana di sembilan provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, serta satu sub regional Papua di Jayapura.

Dengan adanya pusat penanggulangan krisis (PPK) regional ini, bila ada kejadian bencana di suatu daerah, maka daerah tetangga terdekat segera menanggulangi

dalam pemberian bantuan kesehatan, setelah itu pusat akan menyusul. Sehingga akan mempermudah akses bagi provinsi lainnya dengan mendapatkan bantuan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lainnya, serta mempercepat meningkatkan penanganan masalah kesehatan akibat bencana.

Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan kemampuan petugas, sejak 2006 PPK Depkes telah menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk petugas kesehatan dari 9 PPK Regional seperti pelatihan manajemen bencana, komunikasi radio, perawatan darurat, ACLS/ATLS, manajemen obat dan logistik dan pelatihan kebutuhan kesehatan cepat (RHA). Sampai tahun 2007, sekitar 1.149 petugas kesehatan telah dilatih.

Selain itu, September tahun lalu dilaksanakan *International Training Consortium on Disaster Risk Reduction* (ITC-DRR), yakni sebuah program pelatihan pengendalian bencana dan kedaruratan yang dilakukan oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari universitas, rumah sakit, dinas kesehatan, serta institusi lain yang merupakan bagian dari 9 Regional PPK.

Konsorsium dibentuk mengingat masih relatif barunya program manajemen kedaruratan dan bencana di Indonesia, sehingga pakar bencana di masing-masing universitas masih terbatas.

Pengajar berasal dari universitas dan rumah sakit, termasuk dosen-dosen tamu dari WHO, World Association Disaster and Emergency Medicine (WADDEM), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), dan institusi-institusi lain yang dianggap memiliki ahli yang berkaitan dengan program.

Pemerintah sendiri sebenarnya menargetkan akhir 2008, seluruh desa di Indonesia bisa mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan gawat darurat kesehatan secara mandiri. Target ini disesuaikan dengan tercapainya seluruh desa di Tanah Air menjadi Desa Siaga yang memiliki kesiapan sumber dan kemauan, serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi persoalan gawat darurat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari mengatakan, desa-desa siaga minimal didirikan oleh satu orang bidan dengan dua orang kader yang siap bekerja di masyarakat. Pengembangan desa siaga selanjutnya adalah tugas dari Pos-pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang berasal dari masyarakat setempat.

Poskesdes ini memiliki tugas untuk merevitalisasi upaya kesehatan dari masyarakat lainnya seperti posyandu, warung obat desa, ambulans desa, kelompok pemakai air dan koperasi jamban. Pelayanan medis dasar dan promosi kesehatan serta penyehatan lingkungan adalah tugas pokok Poskesdes. ■ RH

BNPb untuk Antisipas

Mengantisipasi timbulnya berbagai bencana di tanah air, pemerintah didesak segera membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor belakangan ini kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak sedikit korban jiwa dan harta benda yang ditimbulkannya.

Dampak sosial dan ekonomi akibat bencana ini juga terasa berat menghimpit. Terutama bagi rakyat kecil yang terganggu mata pencaharian dan lapangan kerjanya, khususnya di sektor pertanian.

Musibah yang dialami warga masyarakat itu masih ditambah lagi dengan penderitaan susulan pasca bencana. Seperti munculnya berbagai wabah penyakit hingga hilangnya lapangan pekerjaan. Ditambah lagi dengan trauma psikologis akibat kehilangan orang tua, anak atau sanak keluarganya.

Kendati bencana datang berulang, dengan gejala dan dampak yang nyaris sama, namun bangsa ini seakan tak pernah mau belajar dari berbagai kejadian itu. Warga masyarakat dan pemerintah terlihat panik dan sibuk saat terjadi bencana. Penduduk kalang kabut menyelamatkan diri dan harta bendanya. Sementara pemerintah disibukkan dengan upaya penanggulangan bencana. Mulai dari tanggap darurat seperti mengevakuasi para korban, menyantuni dan membantu para pengungsi hingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tapi, begitu musim berganti, kejadian itu seakan terlupakan. Padahal, upaya pencegahan, seharusnya lebih dikedepankan dari pada penanggulangan yang membutuhkan anggaran relatif lebih besar.

Kejadian terakhir, meluapnya sungai Bengawan Solo disertai longsornya tanah di beberapa tempat yang me-

newaskan puluhan orang kembali menjentak perhatian. Peristiwa ini mendapat liputan luas media massa.

Hujan lebat di penghujung tahun 2007 dan berlanjut hingga Januari 2008 menyebabkan air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini meluap. Akibatnya, kawasan yang dilewati sungai ini, mulai dari hulu di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga hilir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur praktis dilanda banjir. Hujan juga menyebabkan longsor di beberapa tempat. Yang parah terjadi di Dusun Ledokari Karanganyar, Jawa Tengah. Puluhan warga tewas tertimbun tanah longsor.

Presiden dan Ny. Ani Bambang Yudhoyono sempat meninjau lokasi bencana dan menyampaikan rasa simpati dan empatinya kepada para korban.

Masih akan Terjadi

Dalam jangka pendek, bencana diperkirakan masih akan terjadi mengingat makin minimnya kawasan hutan di Pulau Jawa. Selain 'terbabat' untuk diambil kayunya, hutan juga tergerus untuk kepentingan hunian dan lahan pertanian.

Menteri LH Rachmat Witoelar mengakui konversi lahan dan hutan di hulu sungai menjadi penyebab utama banjir di Jawa. Kini 72 daerah aliran sungai (DAS) di Jawa dalam kondisi kritis. "Kami sudah memperingatkan. Namun tidak dianggap. Untuk mengatasinya harus sejak 10 tahun lalu, kalau sekarang sudah terlambat. Selama potensi bencana masih besar, penduduk jangan tinggal di tepi sungai," kata Rachmat seperti dikutip *Media Indonesia* (3/1).

Ketua PB NU Hasyim Mu-



Banjir akibat resapan air yang berubah menjadi wilayah hunian dianggap sebagai

zadi meminta pemerintah pusat lebih serius menangani bencana banjir dan longsor. Untuk itu presiden harus segera memanggil kepala daerah yang terkena bencana guna mencari jalan keluar musibah di tanah air," katanya di Jakarta.

Wapres Jusuf Kalla pun menyatakan prihatin atas terjadinya bencana. Wapres juga menyadari rusaknya kawasan di sekitar DAS Bengawan Solo. Untuk itu tak ada jalan lain kecuali menggalakkan proyek di DAS sungai tersebut. Selain itu, untuk jangka panjang, banjir bisa diatasi dengan menanam pohon lebih banyak lagi dan penduduk yang tinggal di sepanjang sungai itu ditransmigrasikan.

Pemerintah, sebagaimana dijelaskan Jusuf Kalla, di tahun 2008 ini akan menanam

satu miliar pohon di atas satu juta hektar lahan untuk mengatasi banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Kantor Wapres (3/1), Jusuf Kalla menyebutkan total dana yang disediakan untuk proyek tersebut mencapai Rp 4 triliun. "Kalau bisa terealisasi 50 atau 60 persen dari target tersebut, hasilnya sudah cukup bagus," paparnya.

Peringatan Dini

Mengantisipasi bencana banjir dan longsor, Kantor Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) saat ini tengah menyiapkan sebuah sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*).

Seperti diungkapkan Kepala Bidang Kebutuhan Masyarakat Kementerian Ristek Ted-

si Bencana



gali penyebab utama.

foto: repro republik

dy W Sudinda, diharapkan pertengahan tahun 2008 alat tersebut sudah selesai dibuat.

“Mencontoh EWS Tsunami, kami sedang mempersiapkan peralatan dan sumber daya manusia, sehingga nantinya kerugian harta benda bisa ditekan,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta (5/1).

Teddy berpendapat, koordinasi antar instansi seperti sekarang ini mutlak diperlukan karena pihaknya tidak bisa mengerjakan semuanya itu sendiri. Instansi tersebut adalah BMG, Lapan, Bakorsurtanal. PU, LIPI, BPPT, Dep. ESDM dan Pemda.

Peralatan tersebut pertama kali akan diuji coba di DKI Jakarta dengan pertimbangan sokongan peralatan yang cukup memadai dan daerah ini sudah menjadi langganan banjir.

Berbeda dengan EWS Tsunami, yang membutuhkan waktu 5 hingga 45 menit agar



Warga miskin menjadi korban paling menderita akibat bencana.

masyarakat bisa bereaksi, EWS banjir dan longsor relatif lebih lama. Sebagai contoh, ‘banjir kiriman’ di sungai Ciliwung yang datang dari Bogor biasanya menempuh jarak empat hingga lima jam untuk sampai ke Jakarta.

Parameternya adalah panjang DAS, faktor luas tutupan lahan yang ada, waduk-waduk yang ada, prediksi curah hujan BMG dan sebagainya.

Selain itu alat pengukur ketinggian permukaan sungai seperti yang ada di sungai Ciliwung saat ini juga sedang diperiksa apakah masih bekerja dengan baik dan akurat.

Legowo, peneliti dari ITB memperkirakan longsor kemungkinan besar masih akan terjadi di Desa Jenawi Kecamatan Seloromo, Kab Karanganyar. Hal tersebut disimpulkan setelah tim dari ITB melakukan riset terhadap kondisi topografi dan kondisi geologi tanah di daerah tersebut.

Apalagi masyarakat sudah merasakan Bergeraknya tanah dengan kecepatan 1 – 2 meter per hari. Karena itu, desa berpenduduk 316 jiwa itu diharapkan segera mengungsi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Mengubah Paradigma

Ketua Deputy Bidang Pencegahan dan Kesiapan Bakornas Penanggulangan Bencana Sugeng Triutomo berpen-

dapat, paradigma penanganan bencana alam harus diubah dari upaya rehabilitasi ke pencegahan. Perubahan ini sejalan dengan paradigma PBB.

Selama ini dana tanggap darurat lebih banyak digunakan untuk pembenahan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Sedangkan aspek pencegahan kurang diperhatikan. Padahal, penanganan pada aspek pencegahan dapat meningkatkan kesiap-siagaan warga terhadap risiko bencana.

Dia juga mengkritik rumitnya pencairan dana darurat bencana. Untuk keadaan yang darurat, mekanismenya seharusnya juga dapat dilakukan secara darurat.

Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (PU), Iwan Nusyirwan Diar membenarkan banyaknya biaya untuk perbaikan infrastruktur.

Pada bencana banjir kali ini, pihak Dep. PU menderita kerugian sekitar Rp 60 miliar akibat rusaknya beberapa prasarana di sepanjang Bengawan Solo.

“Kami harus memperbaiki pintu air dan menambah bronjong. Kerusakan pintu atau jebolnya tanggul terdapat di 180 lokasi,” kata Iwan. Di Jatim saja, dari 28 kabupaten dengan total luas 1.357.206,3 ha separuhnya rusak parah diterpa banjir.

Dep. PU mengakui tidak



Pemerintah harus berkorban untuk menyalurkan bantuan kepada warga terkena musibah.

memasukkan beberapa daerah yang dilanda bencana tersebut ke dalam peta rawan banjir. "Madiun misalnya, selama 32 tahun tidak pernah banjir, tetapi kini diterjang bah," ungkapnya.

Bentuk BNPB

Sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah terobosan ini diperlukan untuk meminimalisasi daerah rawan bencana. Sekaligus menekan jumlah korban jiwa maupun kerugian materil.

Sofyan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan ada beberapa alasan perlu secepatnya membentuk badan ini. Pertama, dilihat secara geografis, sebanyak 83% kawasan Indonesia, termasuk daerah rawan bencana alam. "Kondisi ini diperparah dengan hampir 90% penduduk tidak siap menghadapi musibah yang menimpa mereka," kata Sofyan seperti dikutip *Investor Daily* (9/1).

Kedua, masih banyak daerah rawan yang belum terpetakan. Akibatnya bantuan logistik maupun tenaga sukarelawan terhambat tiba di lokasi. Pihak yang ingin memberi bantuan terkadang ke-

sulitan menemukan jalur tempuh yang aman dan tepat waktu hingga sampai di tujuan.

Alasan ketiga, kata Sofyan, seusai UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia memerlukan respon darurat sebelum terjadi musibah.

"Bangsa ini memerlukan suatu lembaga yang lebih implikatif dibanding Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Negara semestinya mementingkan keselamatan warga negaranya," tegas Sofyan.

Dia menyayangkan pemerintah belum 100% merealisasikan UU No.24/2007. Padahal sejak disahkan bulan Maret 2007 lalu, masyarakat sudah mengetahui pentingnya lembaga permanen untuk mengakomodasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana alam.

Anggota Komisi VIII DPR Theodorus Jacob berpendapat, keberadaan BNPB sangat vital untuk mengurangi carut-marutnya koordinasi penanggulangan bencana. Jacob menilai selama ini penanggulangan bencana masih terkendala adanya dua komando penanganan, yakni pusat dan daerah.

Nantinya, dengan BNPB, penanganan bencana bisa dilakukan satu komando atau aturan

dan satu kewenangan. "Semuanya ditangani secara profesional oleh satu lembaga," jelasnya.

Fungsi dan tugas BNPB, menurut Ketua Penanggulangan Bencana PDI-P itu, bukan hanya menangani tanggap darurat. Tetapi mulai dari kesiapsiagaan hingga pemberdayaan korban. Badan ini

juga menangani kewenangan pendistribusian bantuan. "Depsos nantinya hanya menyiapkan bantuan pelaksanaan penanganan bencana yang komandonya di satu lembaga, yakni BNPB," tegasnya.

Seirama dengan Sofyan, sosiolog Imam Prasodjo juga memandang perlu dibentuknya BNPB. Imam menilai UU No.24/2007 harus lebih diimplementasikan. Pemerintah perlu membuat Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut UU ini.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU tersebut, penanggulangan bencana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menyalurkan pada perundang-undangan.

Dengan adanya UU ini, menurut Imam, seharusnya penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Ketua Bidang Kesra Partai Golkar Firman Subagyo berharap keberadaan BNPB bisa menjadi instrumen penting menangani bencana secara cepat dan tepat. "Mudah-mudahan BNPB ini bisa segera terbentuk," ujarnya. ■ SP



Tanah longsor telah memakan ratusan jiwa secara sia-sia.

Bencana Meluas Sampai Jauh

Secara beruntun dan sekan tiada henti sepanjang tahun 2007 hingga memasuki awal tahun 2008 bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan masih meliputi negeri tercinta ini. Benarkah alam sedang murka atau ini akibat ulah dari manusia itu sendiri.

Sudah tak terhitung berapa banyak kerugian baik materi maupun imaterial akibat berbagai musibah bencana alam yang dialami negeri ini. Sebuah perusahaan asuransi terbesar kedua di dunia, Munich Re, Jerman melaporkan, akibat bencana beruntun yang terjadi sepanjang tahun 2007 di seluruh belahan dunia ini terhitung jumlah kerugian dalam angka yang sangat fantastik yakni mencapai 75 miliar dollar AS.

Setidaknya Munich Re mencatat telah terjadi sekurangnya 950 bencana alam dengan korban tewas sebanyak 20 ribu jiwa. Padahal, bila dibandingkan tahun sebelumnya bencana alam yang melanda dunia hanya sebanyak 850. Dengan demikian angka bencana di sepanjang tahun 2007 merupakan rekor musibah baru sejak tahun 1974.

Sementara di Indonesia sendiri, selama satu tahun terakhir atau antara 2006-2007 setidaknya telah terjadi 840 kejadian bencana dengan menelan korban meninggal sebanyak 7.303 jiwa, dan ang dinyatakan hilang sebanyak 1.140 jiwa. Ditambah lagi dengan kerugian materiil sebanyak 110.016 rumah tenggelam, dan 901.335 orang menjadi berstatus pengungsi. Khusus untuk musibah banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 tercatat di 267 kecamatan.

Bila dicermati jenis musibah yang paling banyak melanda negeri adalah banjir dan tanah longsor. Dimulai dari banjir akibat dari gelombang air pasang laut atau *rob* yang melanda Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mengakibatkan setidaknya 4.000 rumah

dari lima RW terendam dengan ketinggian mencapai 100 sentimeter hingga 200 meter, berlangsung setiap hari mulai 23 Desember 2007.

Belum usai masalah *rob* yang menimpa Jakarta, disusul kemudian tanah longsor di Karanganyar, Jawa Tengah pada 25 Desember 2007 yang mengakibatkan 70 orang tewas.

Pada 26 Desember 2007 bencana banjir dan tanah longsor melanda 11 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Ke 11 kabupaten atau Kota itu adalah, Kabupaten Karanganyar, Cilacap, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Tegal, dan Kota Solo. Korban jiwa diperkirakan sebanyak 80 orang tewas. Dan korban terbanyak terjadi di Karanganyar yang mencapai 65 orang tewas serta di Wonogiri 9 orang tewas dan tujuh orang hilang.

Di Kota Solo setidaknya 26.720 mengungsi. Begitupun yang terjadi di beberapa titik jalur Pantura di perbatasan Tegal-Pemalang yang mengakibatkan Kabupaten Grobogan, Kudus, Pati, Jepara dan Tegal tidak bisa dilewati.

Kemudian Kamis, 26 Desember 2007 empat belas kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terendam banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Tinggi genangan rata-rata 1,5 meter hingga 2 meter. Di Kabupaten Bojonegoro banjir merendam 14 kecamatan. Kamis petang air terus naik, rel kereta api di Clangap, Kecamatan Kalitidu, nyaris terendam.

Disusul Kabupaten Ngawi dan Kecamatan Margomulyo, sudah menunjuk pada angka 31,25 meter melanda sembilan kecamatan dan merendam



foto: berindo wilson

Hutan kota salah satu solusi pencegahan banjir.

sekitar 20.000 rumah. Empat orang tewas dalam peristiwa yang terjadi pukul 02.00 WIB itu. Mereka adalah Suparman (40) dan istrinya Juanti (36) serta kedua anak mereka, Linda (10) dan David, 1,5 bulan.

Begitupun Banjir di Kota Madiun yang terjadi pada 25 Desember 2007, juga melanda Ponorogo sampai ke Pacitan dan Trenggalek. Jalan tergenang banjir tingginya antara satu meter hingga satu setengah meter. Lima kecamatan di Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung, Jenggawah, Balung, Tempurejo dan Kecamatan Silo.

Pada tanggal 26 Desember 2006 dua Warga Kabupaten Malang tewas terseret banjir bandang dan tanah longsor banjir yang ketinggiannya mencapai 1 meter. Menurut Purwanto, peneliti Bengawan Solo asal Universitas Sebelas Maret, Solo, luapan Bengawan Solo diduga terjadi akibat adanya kerusakan atau alih fungsi lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) wilayah hulu. DAS hulu Bengawan Solo di Keduang, Kabupaten Wonogiri, menghasilkan sedimen terbesar, yakni 1,3 juta meter kubik per tahun. Karenanya, untuk mengendalikan banjir Bengawan Solo pemerintah harus memprioritaskan perbaikan di wilayah tersebut.

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang melewati 12 kabu-

paten di dua provinsi. Sungai sepanjang 500 kilometer ini berasal dari Pegunungan Kidul, Wonogiri dan bermuara di Gresik, Jawa Timur. Akibat banjir ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan anggaran Rp 75 miliar khusus untuk penanganan banjir di beberapa kawasan di wilayahnya. Sebanyak Rp 25 miliar dari pos anggaran tak terduga dan sisa berbagai pos yang sengaja dipotong dengan nilai Rp 50 miliar.

Di luar Pulau Jawa banjir dan tanah longsor juga menunjukkan keperkasannya. Di Taliwang, sebuah wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Selasa (25/12) banjir yang melanda yang mengakibatkan seorang warga dilaporkan hilang terseret arus.

Di Padang, banjir sepanjang hari (26/12) menyebabkan satu orang tewas hanyut terbawa arus dan dua masih hilang. Sementara ratusan keluarga yang rumahnya tergenang banjir berada di tenda pengungsian di Pasar Lubuk Buaya, Padang. Disusul kemudian di Jambi akibat meluapnya sungai Batanghari pada tanggal yang sama. Kemudian wilayah Makasar tanggal 27 Desember diterjang Banjir, serta Aceh tanggal 27 Desember 2007 turut pula mengalami bencana banjir. Bencana banjir telah mengalir sampai jauh ■ ZAH

Askar Wataniah

Milisi Jiran

BERDARAH INDONESIA

Maraknya isu WNI yang direkrut menjadi milisi paramiliter bernama Askar Wataniah di Malaysia, menyadarkan betapa kita banyak tertinggal dari negeri serumpun yang dahulu kita "ajari" tersebut. Perbedaan tingkat kesejahteraan yang signifikan di wilayah perbatasan rentan membuat kewarganegaraan seseorang menjadi "abu-abu".

Negara tetangga Malaysia yang membangun kekuatan pertahanannya, tetapi justru Indonesia yang dibuat ribut-ribut. Pembentukan milisi cadangan Negeri Jiran yang disebut Askar Wataniah, yang konon melibatkan banyak warga negara Indonesia dalam proses rekrutmen, serta-merta dikait-kaitkan dengan beragam persoalan internal yang selama ini tak bisa dipecahkan sendiri oleh Indonesia. Seperti, bagaimana menjaga patok di tapal perbatasan, memberi kesejahteraan kepada warga Indonesia di perbatasan, hingga minimnya anggaran pertahanan yang membuat banyak warga keturunan Indonesia yang lebih memilih menjadi milisi di negeri asing daripada menjadi anggota TNI/Polri.

Karenanya, mengangkat isu Askar Wataniah ke permukaan sepertinya mirip diperbincangkan menepuk air diulang terpercik muka sendiri. Atau senafas dengan bunyi pepatah, hidung tak mancung pipi didorong-dorong. Indonesia yang jauh lebih kuat dan lebih besar dari Malaysia, terkesan kerdil jadinya.

Adalah Happy Bone Zulkarnaen, Ketua Kelompok Kerja Panitia Anggaran Komisi I DPR yang mengangkat isu Askar Wataniah pertama kali saat Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, di Jakarta Senin (12/2).

Happy bersama anggota lain komisinya sebelumnya sudah memperoleh paparan dari Pangdam VI Tanjung Pura Mayjen TNI Tono Suratman, saat melakukan kunjungan kerja akhir tahun 2007 lalu. Menurut Happy, yang politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat ini, ancaman di wilayah perbatasan

Kalimantan Barat dengan Malaysia semakin serius. Selain terus meningkatkan kekuatan pasukan militernya, Malaysia juga merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk bergabung dengan pasukan paramiliter Askar Wataniah.

"Kalau ada kontak fisik, kita akan membunuh warga sendiri," kata Happy, dengan menunjukkan foto-foto proses rekrutmen Askar Wataniah dan pelatihan tempur. Seragam anggota Askar Wataniah itu terlihat mirip militer.

Isu Askar Wataniah menjadi bola salju yang dimanfaatkan berbagai pihak demi kepentingan masing-masing. Para politisi, petinggi militer, pejabat negara, hingga pengamat intelijen ramai memperbincangkan isu Askar Wataniah sesuai sudut pandang masing-masing. Sebuah radio swasta menggelar *talk show* bertema *Milisi RI di Negeri Jiran* Sabtu (16/2), dengan mengundang pembicara mantan Pangdam Jaya Letjen TNI (purn) Sutiyoso, anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin dan RK Sembiring Meliala, pengamat intelijen Wawan H. Purwanto, dan tenaga ahli pengajar kepemimpinan Lemhanas Adi Sujatno. Demikian pula sejumlah wartawan ada yang mengadakan investigasi langsung ke wilayah perbatasan untuk memperoleh data paling akurat.

Tetapi isu Askar Wataniah justru semakin melebar ke mana-mana. Malah ada yang mengaitkannya sebagai upaya menjatuhkan nama baik Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Keuangan era PM Mahathir Muhammad, yang kemudian beralih haluan menjadi tokoh oposisi setelah dipecat tahun 1997 dengan berbagai tuduhan. Anwar yang dianggap dekat dengan WNI di Malaysia akan bertarung secara politik menghadapi PM Abdullah

Ahmad Badawi pada Pemilu yang dipercepat menjadi 8 Maret 2008 ini.

Jumlah personel Askar Wataniah saat ini sudah mencapai 45.000 orang, dan akan ditingkatkan menjadi 80.000 orang pada tahun 2020. Malah, dalam keadaan darurat dapat ditingkatkan tiga kali lipat.

Askar Wataniah terdiri 16 brigade, tersebar di Johor, Selangor, Perak, Perlis, Pahang, Kelantan, Kinabalu, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sibul, Kuching, Terengganu, Kedah, Melaka, Kuala Lumpur, dan Sabah.

Anggota Askar Wataniah terdiri dari warga negara Malaysia usia 18-37 tahun. Mereka bergabung dalam enam elemen, yaitu Elemen Tempur, Elemen Bantuan Tempur, Elemen Bantuan Pelaksana, Elemen Pakar, Pasukan Latihan Perwira Cadangan, dan Pasukan Askar Wataniah Kendali.

Pelatihan perekrutan Askar Wataniah dilakukan selama 30 hari atau 240 jam, meliputi kemahiran ilmu perang, taktik dan strategi, serta penggunaan senjata. Saat latihan, setiap anggota menerima 48-68 ringgit Malaysia per hari atau 12 jam latihan.

Atase Pertahanan Malaysia untuk Indonesia Kolonel Ramli mengatakan, Askar Wataniah adalah pasukan simpanan (cadangan) di dalam tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Posisi pasukan cadangan ini setara dengan angkatan tetap di tiap kesatuan ATM.

Berdarah Indonesia

Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengetahui mengenai adanya berita masuknya sejumlah





ilustrasi: denny

pemuda Indonesia menjadi paramiliter Askar Wataniah di wilayah perbatasan.

Tetapi, kata Hatta, Presiden tidak perlu menindaklanjuti hal itu karena Menko Polhukam Widodo AS akan melakukannya.

Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti menilai sangat absurd dan tidak masuk akal apabila Malaysia berani mengambil risiko merekrut WNI sebagai Askar Wataniah. Sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia tengah membangun sebuah komunitas keamanan bersama. Kedua negara juga punya komite khusus yang rutin membahas persoalan perbatasan kedua negara.

Karena itu, kata Ikrar, jika memang diasumsikan benar terjadi sejumlah WNI di kawasan perbatasan kedua negara direkrut Malaysia, itu berarti sebuah kegagalan besar bagi TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Para politisi penghuni Senayan terlihat paling geram menanggapi isu Askar Wataniah. Di antara mereka ada yang meminta supaya Indonesia mengirim nota protes ke Malaysia, hingga menarik Duta Besar Indonesia di Malaysia. "Kami akan mengusulkan agar Komisi Luar Negeri DPR segera kirim surat ke pemerintah," kata Effendy Choiri, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR.

Ali Mochtar Ngabalin anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, menuding Malaysia telah melakukan tindakan sistemik untuk menganeksasi Indonesia.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pemerintah harus meninjau di lapangan dan memberikan nota protes melalui jalur diplomatik, supaya perekrutan

itu dihentikan.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo mengakui, ada warga negara Indonesia yang bekerja pada beberapa perusahaan di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia sebagai petugas keamanan. "Mereka diberi seragam dan mendapat pelatihan khusus," kata Legowo, sesudah menerima informasi dari perwakilan Indonesia di Malaysia.

Malaysia lewat Kedutaan Indonesia di sana kata Legowo sudah membantah kabar itu, sebab untuk menjadi anggota paramiliter atau Askar Wataniah ada persyaratan yang harus dipenuhi. "Harus warga negara Malaysia."

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar turut membantah keterlibatan pemuda Indonesia dalam Askar Wataniah. "Isu itu tidak benar," ucapnya. "Memangnya Malaysia punya Askar Wataniah," lanjutnya tersenyum.

Kepala BIN mengatakan seharusnya Malaysialah yang harus berhati-hati terkait isu Askar Wataniah. "Mereka yang waspada, karena takut kita susupi."

Pangdam VI Tanjung Pura Mayor Jenderal Tono Suratman kepada pers menyampaikan pernyataan berbeda soal Askar Wataniah, dengan apa yang diparkannya kepada Komisi I DPR akhir 2007 seperti disebutkan Happy. Berbicara kepada *Kompas* di Balikpapan, Kalimantan Timur, Tono membantah ada WNI yang direkrut Malaysia menjadi Askar Wataniah. "Kami tahu persis Merah Putih masih melekat."

Tetapi untuk memberi celah mengambang dalam pernyataannya, Tono menga-

takan, mungkin yang menjadi anggota Askar Wataniah adalah WNI yang mendapat kewarganegaraan Malaysia. Dengan demikian, hak dan kewajiban akan mengikuti aturan Malaysia, misalnya memperkuat militer dengan jadi Askar Wataniah.

Koran Tempo menulis, Tono Suratman mengakui Malaysia melakukan upaya rekrutmen untuk Askar Wataniah di sepanjang perbatasan Kalimantan. Menurut Tono, mereka yang direkrut rata-rata tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah beralih kewarganegaraan. "Itu laporan intelijen kami," kata Tono. "Proses rekrutmennya masih dalam batas kewajaran."

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, sampai saat ini belum ada bukti kabar Askar Wataniah tersebut benar.

Setelah Presiden SBY menugaskan Menko Polhukam untuk melakukan tindaklanjut atas isu Askar Wataniah, Widodo AS kemudian menugasi lagi Menhan Juwono Sudarsono untuk memperjelas kasus ini. Dia juga meminta Departemen Dalam Negeri melakukan pengecekan. "Kami minta mereka turun ke lapangan," kata Widodo.

Berbicara di Jakarta, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Zainal Abidin Zain melihat ada usaha-usaha yang dimainkan golongan tertentu di Indonesia untuk memicu keresahan dan kecurigaan masyarakat Indonesia kepada Malaysia.

"Isu Askar Wataniah ini diangkat untuk mencetuskan semula perasaan tidak senang hati terhadap Malaysia," kata Dato' Zainal. Menurutnya, golongan tersebut tidak senang melihat hubungan Malaysia berjalan baik, akrab, saling bekerja sama, dan hidup berdampingan dengan damai sebagai tetangga serumpun.

Zainal juga menampik ada kepentingan Malaysia di balik mencuatnya isu perekrutan WNI menjadi anggota Askar Wataniah, sebab semua pemberitaan berasal dari Indonesia. Kepentingan politik Malaysia terkait dengan Pemilu di negara tersebut juga tidak memiliki korelasi dengan isu Askar Wataniah. Termasuk isu untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, yang dianggap dekat dengan WNI di Malaysia.

Zainal juga membantah ada perekrutan WNI menjadi anggota Askar Wataniah, serta membantah negaranya mengeluarkan kewarganegaraan ganda untuk merekrut WNI. Ia menggambarkan perekrutan WNI demikian tidak masuk akal sebab sama saja seperti menembak kaki sendiri.

Kalaupun ada anggota Askar Wataniah yang berbicara dalam dialek Jawa, Bugis, Banjar, dan lain-lain, menurut Zainal hal itu karena mereka memang warga keturunan suku bangsa tersebut. Mereka adalah keturunan WNI yang bermigrasi ke Malaysia dan telah memiliki kewarganegaraan Malaysia. ■ HT

Lumpur Lapindo: Bencana Alam

Semburan lumpur Lapindo terus meminta korban. Laporan TP2LS DPR yang menyebut luapan lumpur sebagai fenomena alam ditolak anggota dewan. Pemerintah masih akan menunggu keputusan pengadilan. Penetapan sebagai bencana alam bisa jadi bola panas dan memberatkan APBN.

Persoalan lumpur panas Lapindo agaknya masih akan berbuntut panjang. Sepanjang luapan lumpur yang hingga kini tak kunjung henti, sepanjang itu pula penderitaan warga Sidoarjo terkena imbasnya.

Kendati Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.14/2007, namun pelaksanaannya tak berjalan mulus. Masih ada sejumlah warga yang telah diklarifikasi kepemilikan tanah atau lahan pekarangannya oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ternyata hingga kini belum menerima penggantian haknya. Padahal mereka hampir dua tahun menjadi korban semburan lumpur PT Lapindo Brantas Inc.

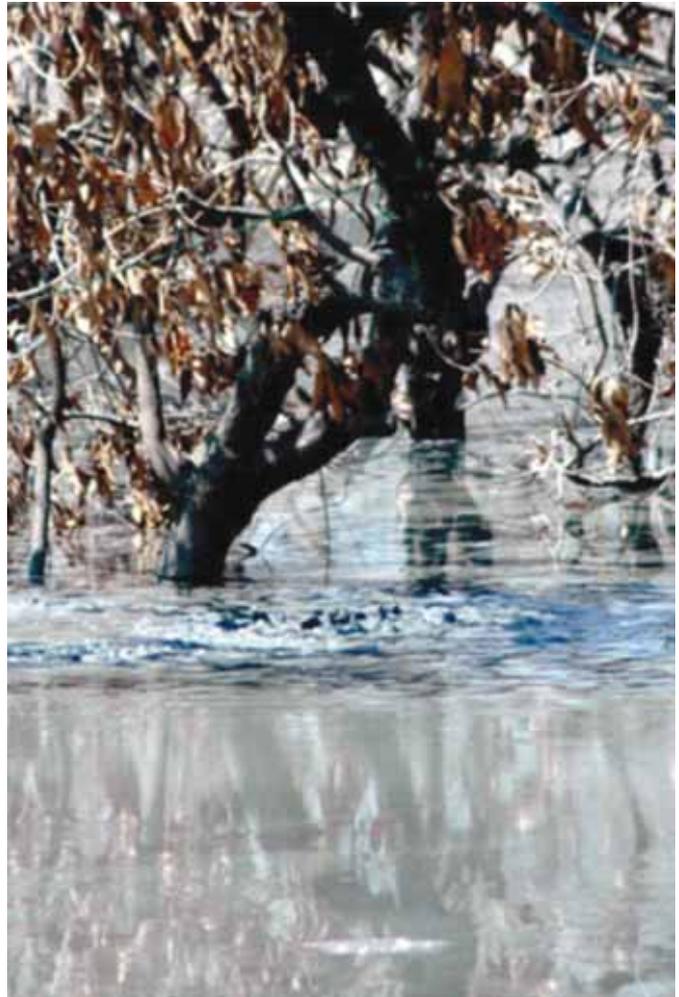
Korban luapan lumpur juga terus bertambah. Warga Desa Siring misalnya, rumah dan pekarangan mereka kini digenangi lumpur akibat jebolnya tanggul. Tapi mereka tidak atau belum memperoleh ganti rugi karena lokasinya dinyatakan berada di luar batas yang ditentukan dalam Perpres 14/

2007.

Penderitaan yang berkepanjangan membuat kesabaran mereka akhirnya pupus. Warga desa itu melampiaskan kekecewaannya dengan melakukan unjuk rasa. Tua-muda, laki-laki dan perempuan serta anak-anak turun berdemo. Selasa (19/2) lalu mereka kembali memblokir jalan di kawasan Porong, Sidoarjo. Semua akses jalan, termasuk jalan alternatif dari Surabaya ke arah timur Jatim atau sebaliknya ditutup. Para pendemo juga menutup badan jalan dengan pasir dan batu serta puing-puing bangunan.

Jalan kereta api jurusan Surabaya – Malang tak luput jadi sasaran. Rel yang beberapa kali tergenang lumpur itu diblokade dengan bongkahan batu dan potongan batang-batang kayu. Akibatnya, jalan kereta api itu praktis tak bisa dilewati.

Aksi unjuk rasa ini menyebabkan aktivitas perekonomian di Jatim terganggu. Transportasi dan distribusi barang dari Surabaya ke arah timur Jatim atau sebaliknya lumpuh.



Ratusan hektare ladang warga terendam lumpur.

Para korban lumpur Lapindo ini menuntut agar daerah mereka juga dimasukkan sebagai kawasan korban lumpur yang berhak mendapat ganti rugi.

Pemda Kabupaten Sidoarjo bukan tidak memperjuangkan nasib mereka. Menurut Bupati Sidoarjo, Win Hendarso, upaya sudah dilakukan dengan meminta perhatian pemerintah pusat. Namun nyatanya masih berlarut-larut dan belum menunjukkan hasil. Aksi demo warga Sidoarjo baru bisa dihentikan setelah polisi diturunkan ke lapangan.

Kuasa Hukum Lapindo Brantas Inc, Aji Wijaya menyatakan, terkait dengan luapan lumpur yang masih terjadi dan menenggelamkan area di luar area terdampak pada 22

Maret 2007, sesuai Perpres No.14/2007, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Biaya masalah sosial di luar area terdampak itu dibebankan kepada APBN.

Kasus warga Siring ini merupakan tambahan kasus sebelumnya yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Sebagaimana diketahui, semburan lumpur panas di tempat pengeboran sumur Sumber Panji I, terjadi pada 29 Mei 2006 lalu.

Kalangan wakil rakyat di Senayan sejak tahun lalu sudah mempersoalkan hal ini dan berniat mengajukan usul interpelasi. Namun kemudian ditunda dengan membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) pada Agustus 2007.



Lumpur hampir mencapai atap rumah penduduk.

m atau Bukan?

Sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (19/2) lalu dengan agenda mendengarkan laporan TP2LS diujungi banyak interupsi anggota dewan. Mereka meminta laporan tertulis dibagikan sebelum dibacakan oleh Wakil Ketua Tim, Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDIP.

Rapat bahkan sempat diskors dua kali untuk dilakukan lobi dengan pimpinan fraksi-fraksi yang sebagian besar menolak laporan hasil kerja tim. Dalam laporan itu antara lain dinyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan fenomena alam.

Reaksi keras muncul di kalangan anggota dewan. Permade dari Fraksi PDI-P secara lantang menyatakan laporan TP2LS lebih memihak Lapindo Brantas Inc dan pemerintah. Beberapa anggota lainnya memperlakukan integritas para ahli yang diundang di rapat dengar pendapat umum (RDPU). Mereka yang diundang merupakan nama yang selama ini dikutip dalam iklan-iklan dan advertorial Lapindo. "Kenapa ahli yang

memegang data *real time* proses pengeboran yang punya informasi sekitar pemenuhan prosedur operasi justru tidak diundang," kata Tjatur Supto Adi dari Fraksi PAN.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla yang ditanya pers (18/2) menyatakan penentuan sebagai bencana alam atau bukan tidak bisa ditetapkan secara politis. "Itu perlu penelitian yang mendalam. Saya kira tidak bisa dinyatakan secara politis," kata Jusuf Kalla yang Ketua Umum Partai Golkar.

Alhasil, sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetarjo Soerjogoeitno akhirnya memutuskan menolak laporan TP2LS dan melanjutkan interpelasi kasus Lapindo. Menurut Ketua Fraksi PKB Effendy Choiri, proses interpelasi sudah dapat dimulai dengan menyerahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Tetap Bertanggungjawab

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darusalam, menyatakan, apa pun



Tanggul lumpur Lapindo yang sering jebol.

keputusan DPR, Lapindo akan tetap bertanggung jawab dan tetap konsisten dengan Perpres No.14/2007. Manager Humas PT Lapindo, Yuniwati Teryana, menyatakan, pengeluaran Lapindo sampai Desember 2007 sudah mencapai Rp 2,83 triliun. Yakni untuk penanganan sosial Rp 315 miliar, upaya penutupan sumber semburan Rp 873 miliar, penanganan permukaan Rp 798 miliar dan realisasi jual-beli tanah dan bangunan Rp 854 miliar.

Penyebab semburan lumpur sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra antara kesalahan Lapindo dan peristi-

wa alam. Pemerintah, seperti dikemukakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, masih akan menunggu keputusan pengadilan sebelum memutuskan status luapan lumpur Lapindo. Jika pengadilan memutuskan Lapindo bersalah, artinya luapan lumpur itu bukan bencana alam. "Tapi nanti kalau pengadilan membebaskan Lapindo, berarti itu betul bencana alam," kata Purnomo seperti ditulis *Koran Tempo* (19/2).

Konsekuensi penetapan semburan sebagai bencana alam bisa menjadi bola panas bagi pemerintah. Karena beban yang harus ditanggung APBN akan semakin berat. ■ SP

Harga Minyak Goreng Melonjak

Harga minyak goreng di berbagai pelosok daerah terus melonjak. Harga minyak goreng curah di DKI Jakarta misalnya, naik drastis hingga mencapai Rp 13 ribu per kg. Harga minyak goreng kemasan juga bernasib sama. Misalnya merek Tropical ukuran dua liter Rp 23.850 naik menjadi Rp 24.950, Avena dari Rp 21 ribu menjadi Rp 22 ribu.

Di Wilayah selatan Jawa Tengah, yakni Kab Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen, kenaikan harga minyak goreng tak mau kalah dengan di Ibukota. Minyak goreng juga dijual Rp 12 ribu-Rp 13 ribu per kg. Sementara minyak goreng sayur Rp 13 ribu per kg. Di sejumlah

pasar di Medan, Sumut, rata-rata harga minyak goreng curah Rp 11.400 per kg atau naik setiap harinya Rp 500 per kg. Kenaikan harga yang menggila juga terjadi di Bandar Lampung.

Meroketnya harga minyak goreng, tak pelak memukul pedagang gorengan. Bahkan di tiga daerah tadi, belasan pedagang gorengan memilih gulung lapak ketimbang berjualan.

Supaya harga minyak goreng tak naik, pemerintah meminta komitmen pengusaha minyak sawit mentah (CPO) maupun pedagang minyak goreng ikut meredam. Mekanisme pasar murah juga akan digalakkan secara nasional. Apa-



Akibat imbas kenaikan harga CPO dunia.

foto: berindo wilson

lagi, mulai pekan pertama Maret, dana subsidi minyak goreng sudah dikucurkan sebesar Rp 100 miliar dari total Rp 600 miliar. Melon-

jaknya harga minyak goreng di beberapa daerah merupakan imbas kenaikan 20 persen harga CPO dunia. ■ MLP



Anak-anak mendiang HM Soeharto dipanggil ke persidangan.

foto: dok. tokoh indonesia

Yang Dinanti di Meja Hijau

Enam putra-putri Soeharto telah menyatakan bersedia menjadi ahli waris Soeharto dalam gugatan perdata kasus korupsi dan penyimpangan penggunaan dana di Yayasan Supersemar yang tengah berlangsung di pengadilan.

Keputusan itu diambil secara bulat dalam rapat yang dihadiri oleh keenam anak Soeharto bersama mantan tim kuasa hukum Soeharto. Keenam anak Soeharto adalah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), Sigit Hardjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Haryadi (Tietiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). Tak satupun ahli waris Soeharto yang menolak.

Namun demikian, dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka tidak hadir. Bahkan tim kuasa hukumnya belum mau menyerahkan surat kuasa kepada majelis hakim. Kuasa hukum mereka Juan Felix Tampubolon menyatakan, klien-kliennya me-

milih menunda penyerahan surat kuasa, karena ingin agar sidang menghadirkan dulu pakar hukum perdata Prof Dr Bustanul Arifin, untuk menjelaskan kedudukan ahli waris.

Pasalnya, menurut Felix, kedudukan ahli waris tidak diatur secara rinci dalam hukum perdata. Kedudukan ahli waris sepeninggal pihak pemberi waris hanya diatur dalam yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung. Ahli waris ingin mendapat penjelasan dulu supaya kedudukan mereka jelas dalam berperkara.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyambut baik sikap enam putra-putri almarhum mantan Presiden Soeharto yang menyatakan bersedia menjadi ahli waris perkara gugatan perdata.

Hendarman mengaku menyerahkan se-

penuhnya pada proses sidang yang terjadi di PN Jaksel. Bahkan Hendarman juga kembali menawarkan upaya perdamaian kepada ahli waris Soeharto. "Masih bisa damai, karena sesuai aturan di dalam Pasal 1813 KUHP Perdata proses damai tersebut masih dapat berlangsung hingga tahap banding dan juga kasasi," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejagung, Yoseph Suardi Sabda. Menurutnya dalam gugatan perdata, upaya perdamaian bukan sesuatu yang dilarang, bahkan hal itu yang lebih diutamakan.

"Dalam gugatan perdata itu justru upaya perdamaian terlebih dahulu yang diutamakan. Dan kalau mereka mau damai, ya mereka harus bayar," tegas Yoseph.

Sebaiknya Hadir

Pemerintah Republik Indonesia menggugat mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar atas perbuatan melawan hukum karena dana beasiswa digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.

Putra-putri Soeharto memberikan kuasa kepada enam advokat, yang sebelumnya menjadi kuasa Soeharto. Keenam advokat itu adalah Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Indriyanto Seno Adji, Denny Kailimang, Mohamad Asssegaf, dan Wimboyono Seno Adji.

Sementara itu, harian *Kompas* memuat pernyataan salah satu kuasa hukum putra-putri Soeharto, Indriyanto Seno Adji. Perihal kehadiran Siti Hardiyanti Hastuti dan adik-adiknya di persidangan, Indriyanto Seno Adji mengatakan sejauh ini hal itu tidak akan terjadi. "Lagi pula, ini kan sidang perdata. Pemberi kuasa tidak harus hadir, cukup kuasa hukum yang hadir," katanya.

Sidang perdata yang dimulai sejak 9 Agustus 2007 ini dipimpin majelis hakim dengan ketua Wahjono dan anggota I Ketut Manika dan Aswan Nurcahyo.

Pihak penggugat dan tergugat sudah saling memberikan bukti dan menghadirkan saksi. Sidang tinggal menunggu pembacaan kesimpulan kedua belah pihak dan putusan majelis hakim.

Sementara itu, Dachamer Munthe, Koordinator Jaksa Pengacara Negara dalam kasus gugatan Pemerintah melawan Yayasan Supersemar dan mantan presiden Soeharto menyatakan, ahli waris mantan presiden Soeharto rugi, jika tidak datang memenuhi panggilan pengadilan.

Menurut dia, akan ada akibat hukum atas proses kasus tersebut, jika ahli warisnya menolak untuk hadir. Majelis hakim akan melakukan *verstek* (putusan tanpa kehadiran salah satu pihak) terhadap perkara tersebut. ■ RH

PR Nan Tak Kunjung Selesai

Pencabutan Inpres No 8 Tahun 2002 merupakan satu-satunya cara untuk bisa menyita aset penerima BLBI yang belum melunasi hutang mereka.

Sebagian penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat ini telah kembali kaya raya. Ini terbukti dari masuknya nama mereka dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi beberapa majalah internasional. Demikian harian *Jurnal Nasional* mengawali laporannya mengenai kasus BLBI.

Sementara itu, *Kompas* mengutip laporan Departemen Keuangan, bahwa dari Rp 11,89 triliun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang dikucurkan untuk 16 bank dalam likuidasi, baru Rp 2,96 triliun yang dikembalikan ke kas negara. Hal itu disebabkan rendahnya nilai aset yang diserahkan pemilik saham ke-16 bank itu sehingga tak dapat menutupi kewajiban mereka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu di Jakarta (18/2), saat memaparkan perkembangan terakhir pengembalian dana BLBI dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Hadir dalam kesempatan itu Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

Ke-16 bank itu dicabut izin usahanya pada November 1997 akibat terkena imbas krisis moneter. Mereka mengalami tekanan penarikan dana dalam jumlah besar oleh nasabahnya sehingga pemerintah memberikan BLBI. Dana yang dikucurkan kemudian dijadikan pinjaman pemegang saham, yang kini belum tuntas.

Dari 16 bank itu, pemegang saham Bank Andromeda dan Bank Umum Majapahit telah menyelesaikan kewajibannya. Sisanya hingga kini masih dikejar pengembalian BLBI-nya. Ke-14 bank itu adalah Bank Citrahasta Dhanamanunggal, Bank Guna Internasional, Bank Harapan Sen-

tosa, Bank Kosagraha Semesta Sejahtera, Bank Mataram Dhanarta, Bank Pasific, Bank Sejahtera Bank Umum, South East Bank Asia, Bank Anrico, Bank Dwipa Semesta, Astria Raya Bank, Bank Industri, Bank Jakarta, dan Bank Pinaesaaan.

Menurut Sri Mulyani, sejak krisis moneter mendera perbankan nasional tahun 1997, pemerintah membentuk Tim Likuidasi. Namun, hingga Juni 2004, bank itu belum dapat melunasi kewajiban BLBI-nya.

Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2006 menyarankan agar pemerintah dan BI mengambil langkah konkret untuk menarik sisa aset yang masih tersisa dari bank yang dilikuidasi sebagai pembayaran kewajibannya. Pemegang saham 10 dari 14 bank yang dilikuidasi itu menyepakati penyerahan aset sebagai bagian dari penyelesaian BLBI melalui penandatanganan berita acara serah terima (BAST) aset.

Nilai buku seluruh aset 10 bank yang masuk dalam BAST mencapai Rp 3,67 triliun. Aset itu meliputi aset kredit (piutang), aset tetap, surat berharga, hingga barang jaminan diambil alih. "Tim Likuidasi baru menyerahkan data tentang delapan dari 10 bank yang menandatangani BAST itu Maret 2007, satu bank lainnya di Juni 2007, dan satu bank terakhir pada Januari 2008," ujar Menkeu.

Orang Terkaya

Beberapa nama penerima BLBI yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah *Globe Asia* dan *Forbes*, adalah Sudono Salim dengan kekayaan US\$2,8 miliar, Sukanto Tanoto (US\$ 1,3 miliar), Hasjim Djojohadikusumo (US\$ 595 juta), Sjamsul Nursalim (US\$ 445 juta), Sudwikatmono (US\$110 juta),



Inpres yang dikeluarkan Presiden Megawati berujung dikeluarkannya SKL.

Siti Hardijanti Rukmana (US\$ 90 juta). Nama-nama tersebut telah bebas dari kewajiban melunasi BLBI karena telah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Marwan Batubara yang merupakan salah satu penulis buku *Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara*, mengatakan pencabutan Inpres No 8 Tahun 2002 merupakan satu-satunya cara untuk bisa menyita aset penerima BLBI yang belum melunasi hutang mereka. Inpres yang dikeluarkan Presiden Megawati pada 30 Desember 2002 ini berujung dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) pada debitur yang telah menyelesaikan kewajiban-

an pemegang saham.

Akibatnya, sedikitnya 10 tersangka korupsi BLBI yang tengah ditangani Kejaksaan Agung dihentikan proses penyidikannya (SP3). Padahal, para tersangka kasus BLBI telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan BLBI di luar ketentuan.

Sementara itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengemukakan dugaan adanya permainan di tingkat elit yang menyebabkan kasus tersebut terkatung-katung. Karena itu dia mengharapkan ketegasan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus tersebut. Perlunya penuntasan kasus itu, menurut dia, karena banyak penjahat BLBI yang belum tersentuh tangan hukum. ■ RH

Kecerdasan Berkesenian di Al-Zaytun

Ucapkan selamat datang untuk kebebasan ekspresi seni di ranah ini. Dengan semboyan "*Pesantren Spirit but Modern System*", Mahad Al-Zaytun meyakini seni sebagai bahasa komunikasi kolektif. Seni menjadi salah satu kebutuhan pencerdasan dan pencerahan hidup. Yang suka musik, silakan. Yang suka tari ada banyak pilihan. Mau yang tradisional silakan pilih, karena sudah beberapa yang dikembangkan di sini. Atau mau *breakdance*? Asal hati-hati kepalanya...," kata Syaykh AS Panji Gumilang di atas mimbar saat Muharraman 1429 silam.

Seni dan modernitas adalah saudara kandung yang acap dikepung banyak polemik. Seni yang terbenam dalam otak kanan sering dianggap versus dalam membentuk pola kedisiplinan dan kecerdasan otak. Al-Zaytun sebagai pesantren, tidak lantas menganggap seni adalah musuh dari watak yang disiplin, meskipun kedisiplinan adalah salah satu tujuan yang diharapkan untuk para santrinya.

Seperti petikan ungkapan Syaykh di atas, rentang toleransi yang diberikan untuk pilihan seni dalam pratiknya sangatlah besar. Gambangnya, Al-Zaytun menempatkan seni dalam tataran yang toleran, cerdas dan global. Animo seni para santri diapresiasi dalam kelembagaan. Keberadaannya meresap dalam institusi.

Kehidupan berkesenian bukan lagi perkara bagaimana sebuah karya seni itu bisa tumbuh dan berkembang. Bukan hanya seperti sebuah tarian bisa berkelebatan di atas panggung. Atau tidak sekadar membahannya sebuah kidung dalam sebuah pentas yang memukau.

Kebersenian adalah bentuk elaborasi beragam aspek hidup yang sinergis. Ada "pentas" belum berarti kehidupan berkeseniannya mengakar dalam kesehariannya. Kebersenian bukanlah panggung semata, yang sekadar menghiburkan panca indra. Hidup berkesenian itu seperti proses

yang terus berkembang, terus mereproduksi bahasanya. Seni menciptakan reproduksi "bahasa baru".

Toleransi yang diberikan Al-Zaytun untuk kesenian sangatlah besar. Beragam seni tumbuh dan berkembang. Di bawah KOSMAZ, (semacam ekstra kulikuler siswa) yang singkatan dari Komite Olah Raga dan Seni Ma'had Al Zaytun itu, sejumlah seni difasilitasi. Sebut saja sejumlah seni tari (baik tradisional maupun modern). Seni tari tradisional tidak hanya seni tari Sunda, tapi mengikuti perluasan kesejumlah seni tari dari daerah lain. Dan yang tidak kalah menarik, seni tari modern dari budaya Afro-Amerika seperti *breakdance* pun mulai menggeliat di Al-Zaytun. Untuk musik sudah pasti sejumlah musik bernuansa islami banyak diminati, seperti terbangun, dan qasidah.

Musik tradisional seperti angklung, gamelan dan keroncong juga bersanding serasi dengan musik modern semacam *band-band* kecil bentuk. (Baca juga "Keroncong Perdamaian: Al-Zaytun lah Wujudnya..."). Setiap anak diharapkan bisa memilih mana yang mereka sukai. Selain minat, faktor kemampuan dan bakat, akan menentukan jenis seni yang bisa diambil oleh santri. Salah satunya adalah *breakdance*.

Melihat kehidupan berkesenian di Al-Zaytun seperti membaca sejumlah "bahasa baru" yang dimaksud tadi.

Kita bisa mengatakan para santri Al-Zaytun adalah "santri seni". Santri-santri yang melembari hidup sehari-harinya dengan seni. Al-Zaytun sebagai kelembagaan pendidikan telah berupaya menyuburkan kehidupan berkesenian dengan mengoptimalkan fasilitas kesenian yang ada.

Seni Sebagai Teks

Sejak berdirinya Al-Zaytun tahun 1999, landasan pesantren dipasak sebagai spirit yang menjiwai sistem pendidikannya. Di sana terkandung nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu yang dilandasi *akhlaq al-karimah*, dan keutamaan taqwa kepada Tuhan. Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan secara tegas mengupayakan pendidikan dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Dalam landasan tersebut, nilai-nilai seni berada dalam posisi yang nyaman. Seni tidak dipopor sebagai barang haram. Bukan juga tema yang perlu diseret dalam polemik yang berkepanjangan.

Nilai kemandirian adalah hakikat seni. Karena seni itu mencirikan independen, eksplorasi budi daya manusia, dan sifat memerdekakan. Maka kemandirian yang ditegaskan dalam landasan Al-Zaytun tadi itu akan selaras dengan sendirinya. Al-Zaytun sebagai pesantren dengan spirit modern akan menjadi ranah yang subur bagi tumbuh kembangnya



Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang dan eksponen menyaksikan pagelaran seni tradisional di Kampus Al-Zaytun.

foto: berindo wilson

hidup yang berkesenian. Mengambil jarak yang terdekat dengan seni adalah langkah yang tepat untuk mencapai harmoni.

Seni, (dalam hal ini seni pertunjukan baik tradisional maupun modern) seperti teks yang bisa dibaca sebagai "ekspresi". Ekspresi adalah perwujudan seni sebagai teks. Seni dapat dibaca sebagai wadah untuk menuangkan inspirasi, daya kreasi, aktualisasi diri, jelajah identitas, bahkan budaya perlawanan. Dan Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung kedisiplinan mewadahi seni dengan terbuka. Lalu, di manakah posisi seni dalam Al-Zaytun?

Bisa dilihat bagaimana Syaykh Panji Gumilang (2004) menyimpulkan bahwa: *pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengarahkan kepada full development personality, yang berarti membangun, membentuk watak maupun kepribadian utuh dalam sistem pengasuhan peserta didik yang berkesinambungan, sehingga terwujud sound in mind and bodily*

prowwess tercermin dalam pribadi bangsa yang cerdas (intelektual, emosional, spiritual), bangsa yang bajik dan bijak mampu memosisikan diri dalam berbagai kondisi yang tersimpul dalam berbagai sikap.

Konsep cerdas yang nalar (logis) baru setimbang dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Dapat disimpulkan, Al-Zaytun memberikan "kebebasan" kepada para santri didikannya untuk menimba ilmu setinggi mungkin, namun tetap memperhatikan seni (*culture*) sebagai penyeimbangannya. Al-Zaytun sendiri sebagai lembaga pendidikan tetap menasar pada pengembangan nilai (prinsip) manajemen modern dengan bersandar pada ilmu pengetahuan, berorientasi pada program, prosedural dalam organisasi, dan mempunyai etos kerja dan disiplin yang tinggi.

Keseharian para santrinya ditakar dalam program yang tertata. Rutinitas belajar di ruang ajar, program kelompok belajar, praktikum, tugas-tugas harian, kegiatan luar sekolah, dan keseharian

dalam sistem sekolah asrama yang membulatkan ekspektasi kedisiplinan dalam proses belajar di Al-Zaytun. Seni bisa dijadikan tempat kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan lain seperti olahraga pun mirip demikian. Di mana para santri bisa *mlipir* sejenak dari rutinitas akademik. Mereka bisa berkreasi untuk menuangkan bakat, bisa juga sebagai alat bantu pelepasan ekspresi.

Dengan begitu, Al-Zaytun menghadirkan aneka ragam pilihan kegiatan seni sebagai program yang krusial. Ibarat sumbatan emosional, seni bisa menjadi memperlancar segala jenis sumbatan. Program seni bukan sekadar pelengkap yang bisa mati kapan saja. Al-Zaytun dengan tegas menyikapi seni sebagai salah satu bagian penting dalam konsep "Modern" yang dimaksud dalam landasannya. Sistem pendidikan terpadu yang mengkombinasikan *kereligiusan, science technology, agriculture, information technology, sport, dan arts*.

Secara tidak langsung, seni yang

Di Al-Zaytun, seni menjadi pilihan melalui proses pemahaman. Seni Al-Zaytun adalah demokratisasi seni dan kebudayaan.

liberal telah membulatkan konsep “Modern” dalam Al-Zaytun. Ibarat padang gersang, Al-Zaytun adalah oase bercitarasa seni bagi musafir yang dahaga akan ilmu pengetahuan.

Selain Pagelaran Seni Rihlah Ilmiah Mahad Al-Zaytun yang diretaskan secara rutin tiap tahunnya, salah satu penanda lainnya adalah perayaan Muharram 1429 H yang baru saja lewat. Tahun Baru Islam menjadi salah satu dari *event* besar Al-Zaytun. Pada puncak 1 Muharram 1429 H silam, sebagai pembukaan acara digelar paduan suara yang diiringi alunan *full band*, dipadu gamelan, dan terbangun. Selain “lagu wajib” *Mars Al-Zaytun*, lagu *Indonesia Raya*, *Indonesia Pusaka*, dan *Rayuan Pulau Kelapa* membahana di langit-langit Masjid Rahmatan Lil’alamin.

Semangat “Indie”

Budaya dalam arti luas adalah hal-hal terbaik yang pernah dipikirkan dan diucapkan di dunia, seperti kegiatan “membaca”, “mengobservasi”, dan “berpikir”. Gagasan seni menurutnya meluas sehingga mencakup hal “berbudidaya” (*cultivated*), dan atau “berbudaya” (*cultured*). Ada keterikutan unsur “logisme” dalam argumentasi estetika seni.

Al-Zaytun menjadikan seni sebagai bagian hidup yang logis. Penjadwalan, fasilitas, dan ruang gerak yang tertata menjadikan tataran seni masuk dalam argumentasi estetika. Pergerakan seni (*aspiration*) menjadi impuls, namun estetika seninya tetap dalam koridor yang tertata.

Kebersenian sebagai eksistensi diri, termasuk identitas diri semacam *common knowledge* tiap santrinya. Setiap santri difasilitasi identitas seninya. Apapun program seni yang diambil, ia akan melekat pada diri santrinya. Jadi, jika saja si A adalah santri aliyah kelas 11 yang pandai fisika itu menjadi calon duta Olimpiade Fisika Tingkat Nasional, dia juga akan terkenal lewat identitas lainnya di basket dan kelompok musik terbangun, itu misalnya.

Keragaman pilihan seni di Al-Zaytun menjadi keinginan (*aspire*) dalam tataran demokratis. Pendekatan seni yang logis, dan menempatkan seni dalam ranah yang nyaman. Seni menjadi aktual, berada dalam tataran realitas. Seni macam ini akan mengikis pandangan seni itu adiluhung. Karena seni akan menjadi aktual dalam kenyataan sehari-hari. Di Al-Zaytun, seni menjadi menjadi pilihan melalui proses pemahaman. Seni Al-Zaytun adalah demokratisasi seni dan kebudayaan.

Kehidupan para santri yang harmonik (*systematize*), beban materi pembelajaran (*materials*), yang akhirnya memosisikan seni (*arts*) sebagai kegiatan di sela rutinitas. Pendekatan seni semacam ini akan menjadikan santri tetap berada dalam zona yang nyaman. Santri akan tetap merasa nyaman melewati siklus pembelajaran (*processing*) selama sekolah, berkegiatan, dan di asrama.

Kenyataan hidup keseharian para santri di asrama yang “kedap” terhadap



Salah satu seni musik dan vokal yang dibina di Al-Zaytun, di mana personilnya adalah para mahasiswa dan santri.

foto-foto: berindo wilson

gelombang elektronik menjadi realitas dari sistem selektif yang dimaknai sebagai "tradisi". Kedap terhadap pengaruh luar (*impact*) dari televisi dan seluler membuka peluang jelajah seni mereka ke arah yang lebih acak.

Pengaruh "imperialisme media" seperti televisi mengikis "imperialisme kultur" dalam kehidupan santri selama di asrama. Mereka nyaris "kedap" dengan pengaruh MTV, *cable*, *byte*, radio, video, atau *wire*. Para santri Al-Zaytun bukanlah generasi pemirsa aktif yang punya antusias terhadap ideologi media. Mereka terhindar dari *general ideological effect* (pengaruh ideologis umum) yang diproduksi televisi melalui pesan-pesan acara (program), manipulasi pemirsa, dan iklan.

Selama proses ajar, satu-satunya yang mereka dapatkan adalah input informasi dari para pengajar, atau pertemuan tiap pekan dengan keluarga. Dengan sistem "kedap" inilah yang nantinya akan menjadi pemancing eksplorasi berkesenian para santrinya. Status para santri yang menjadi "pemirsa pasif"

membuat mereka mengikis pengaruh luar dan kembali pada identitas pencarian mereka semula. Apapun yang terjadi di Amerika, tidak otomatis merebak di sini. Santri Al-Zaytun tidak akan pernah merasa gelisah dengan harga tiket pertunjukan grup musik rock My Chemical Romance yang mentas akhir Januari 2008 lalu, misalnya. Kehidupan seni para santrinya akan mengarah pada ketangguhan tiap personilnya. Filosofi musik *indie* akan menjadi bentuk seni di Al-Zaytun di masa mendatang. Spirit musik *indie* yang terkenal dengan "Do It Yourself", menjadi selaras dalam kehidupan keseharian di Al-Zaytun.

Al-Zaytun *dilambangi* nilai-nilai kemandirian dan kebersamaan. Tinggal bagaimana di masa mendatang Al-Zaytun mampu mewadahi *seni indie* ini sebagai "gerakan seni" *indie* sebagai seni yang direstui, tumbuh dan berkembang. Karena semangat independen, semangat kemandirian-kebersamaan-gotong royong sudah menjadi realitas para santri Al-Zaytun sehari-hari.

Kemandirian dalam ritus kehidupan para santrinya, menyebabkan kita bisa memproduksi makna baru dalam pola berkesenian mereka yang *indie*. Maka kita bisa menyebut mereka "santri *indie*".

Pihak Al-Zaytun patutlah merayakan semangat *indie* para santrinya sebagai proses berkesenian yang mantap. Jika keselarasan itu terpenuhi, para "santri *indie*" akan terus memproduksi makna berkesenian mereka dengan semangat "Do It Yourself". Gerakan-gerakan kecil mereka akan mengarah pada pencarian jati diri yang subtil.

Kelak, di masa mendatang, tak bisa dihindari akan muncul identitas seni yang menempati gorong-gorong budaya. Kekayaan hidup berkesenian para santri akan mengarah pada kehidupan seni *underground*. Jika Al-Zaytun memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya, *Insyallah*, keberadaan seni *indie* Al-Zaytun akan menjadi identitas yang mantap. Dan beri tabik, ucapkan selamat datang bagi santri-santri *indie* Al-Zaytun. ■ TIM-CUS



Santri nisa tidak dibedakan dengan rijal untuk menekuni segala jenis seni di Al-Zaytun.



Grup keroncong dan biduan yang semuanya dari civitas akademi Al-Zaytun menghibur penonton saat 1 Muharram 1429 H.

foto: berindo wilson

Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun:

“Al-Zaytun lah Wujud

*Perintis pesantren kita
Saudagar Gujarat India.
Kota Gresik pusat
penyebarannya.
Kota gersang namun
resik.*

*Wali pendirinya Syaykh
Maulana Malik Ibrahim.
Kota asri damai abadi.
Kota tempat para wali
Pesisir utara, pohon
lontar, saksi berdirinya.
Diteruskan santri
gemilang.
Al-Zaytun lah wujudnya.
Pesisir utara, pohon
lontar, saksi berdirinya
Diteruskan hamba
perdamaian
Al-Zaytun lah wujudnya.*

Itulah petikan lirik dari komposisi yang berjudul *Pesantren Damai*. Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang menulis sendiri liriknya, dengan aransemen Agung Setiawan salah seorang personil Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun.

Kehadiran Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun punya keistimewaan sendiri. Keroncong yang mengkilap. Seni yang menawarkan banyak proses di dalamnya. Tidak *saklek*. Bisa ditekek-tekek aturan mainnya.

Mendengar sejumlah komposisi yang dibawakan Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun, seperti ada harapan untuk terus melestarikan jenis musik yang acap dikatakan “bikin ngantuk”, redup, *down tempo*, atau sejumlah sangkaan yang serupa ini. Bisa dibayangkan, lagu *Volare* yang populer lewat permainan atraktif pemusik Latin, Gipsy Kings, meluncur dalam alunan cukulele, cakalele dan gitar bolong.

Lagu *Volare* yang kaya *rhythm* perkusi diformat dalam nada progres

keroncong yang lazimnya dua kuplet itu. *Volare* dipapar dalam format irama yang jauh dari improvisasi dan tampil sedikit lebih kalem. Meski sedikit “mengkhianati” aturan bar pada musik rumba flamenco aslinya, tapi, masih bisa dikatakan keroncong. Itulah keroncong yang dimaksud mengkilap dalam Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun tadi.

Keroncong memang memiliki patron musik yang tak lazim di telinga anak sekarang. Perjalanan panjang sudah dialami keroncong di Indonesia. Sejak awal abad ke-16, di penghujung penguasaan bangsa Portugis, keroncong justru mulai disemai lewat “seni pemberontakan” kaum budak dan para opsir Portugis. Semacam hiburan kaum tertindas yang mirip dengan sejarah jazz di dataran Amerika. Benih musik yang

tersemai di India, Maluku, dan kemudian menyebar hingga Minahasa, Filipina, Semenanjung Malaka, dan sampai juga ke tanah Jawa.

Dan, ketika kini benih musiknya berkecambah di tanah Al-Zaytun, evolusinya sudah sedemikian rupa. Keroncong Al-Zaytun bisa dikatakan sebagai keroncong kontemporer. Keroncong yang sudah mengalami proses sosialisasi. Kehadiran conga, triangle, dan keyboard bukan bertujuan mengkhianati patron musik aslinya. Ada semacam kepentingan mendesak untuk keperluan adaptasi.

Taktik ini bertujuan untuk lebih mudah masuk ke banyak telinga, terutama pendengar usia remajanya. Diperlukan banyak materi lagu (komposisi) yang populer, dan itu memerlukan *tools* untuk mencapai estetikanya. Keroncong Al-Zaytun adalah keroncong "formula" mutakhir antara pop dan *world music*. Istilah gampangnya seperti itu.

Jadi, jangan heran jika lagu *Hey Jude* (Beatles), *Qurrata Ayun*, atau lagu pop

dnya..."

80-an *Tak Ingin Sendiri* terdengar dalam balutan keroncong. Mendayudayu tetap, tapi, ada yang bisa jadi alasan untuk disimak oleh pendengar yang lebih muda.

Cikal "Perdamaian"

Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun adalah salah satu bentuk kegiatan seni yang resmi dibentuk pada 25 Januari 2002 silam. Komite Olah Raga dan Seni Ma'had Al Zaytun (KOSMAZ) menjadi koordinaturnya. Pada saat itu, Lapangan Track Palagan Agung menjadi saksi bagaimana sebuah itikad berkesenian itu mulai disemaikan benihnya.

Ustad Anang Rifa'i yang waktu itu ditunjuk sebagai Koordinator Seni Bagian Keroncong menggaet Agung Setiawan dari Mahasiswa P3T (Program Pendidikan Pertanian Terpadu) untuk bergabung. Kemudian disusul sejumlah personel lain, Ust. Ciptadi Triwiharso dan Ust. Hari Pramono. Meski dengan instrumen yang masih sederhana, kegiatan keroncong berlatih dimulai.

Untuk menyemangati seni keroncong Al-Zaytun, KOSMAZ mengadakan Lomba Lagu Keroncong Al-Zaytun dalam rangka Syawal Cup II 2002 pada Juni 2002. Kehadiran 30 orang peserta

dari seluruh civitas Mahad Al-Zaytun, menandakan animo yang lumayan besar untuk kegiatan seperti seni keroncong. Meskipun baru dalam tataran pesertanya masih guru dan karyawan, ada titik cerah untuk menambah personel dari proses lomba ini.

Sebagai pemenangnya adalah Ust. Luki Burhansyah dan Ust. Siti Mahmudah. Kemudian keduanya berkiprah sebagai personel Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun hingga sekarang. Dan pada akhir November 2002, Ust. Budi Satrio bergabung sebagai personel tetap dengan kekuatan instrumen kontra bass, menggantikan posisi Ust. Ciptadi yang beralih pada biola. Dan mulailah riwayat sebuah alunan yang menyejukkan telinga itu meretas hingga sekarang.

Hampir di setiap *event* besar yang diselenggarakan oleh Ma'had Al Zaytun, seni keroncong kerap menyertainya.

Pada suatu hari, tepatnya tanggal 9 Mei 2003, Syaykh Al-Zaytun bertandang saat kegiatan seni keroncong ini latihan. Penamaan grupnya sendiri diberikan langsung dari pengasuhnya, Syaykh Al-Zaytun saat itu juga. Nama "Keroncong Perdamaian" diambil dari spirit lirik lagu *Pesantren Damai* yang diciptakan langsung oleh Syaykh.

Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun sendiri adalah salah satu bentuk olahan dari ranah seni di Al-Zaytun. Santri terlibat langsung dalam setiap *event* baik yang besar maupun reguler, para santri menjadi *on the spot audience*.

Di masa mendatang, cikal dari Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun yang sedang tumbuh berkembang ini ditentukan juga oleh para *on the spot audience*-nya tadi. Para santri itulah yang akan menjadi salah satu penentu hidup matinya keroncong di Al-Zaytun.

Jika berhenti sampai di sini, kehadiran seni keroncong akan menjadi monumen. Mirip seperti TVRI yang terus merayap mempromosikan keroncong dari zaman ke zaman, puluhan tahun bergerilya mempertahankan keroncong hanya dalam tataran tradisi. *Toh*, tapi tetap saja masih jauh dari harapan pendengar mudanya.

Grup Keroncong Perdamaian Mahad Al-Zaytun punya peluang besar sebagai salah satu bentuk seni "bawah tanah" yang telah dibahas di artikel sebelumnya. Seni keroncong menjadi salah satu impuls seni yang kuat dalam komunitas "kedap" pengaruh luar ini.

Setidaknya, setiap ada *event*, alunan keroncong menempati ruang inspirasi para santrinya. Jelajah seni para

santrinya akan dipengaruhi lemah-kuatnya keroncong Al-Zaytun. Gairah eksplorasi santri muda Al-Zaytun akan menjadi salah satu faktor penentu rembesnya pengaruh keroncong dalam proses hidup berkesenian mereka.

Para santri Al-Zaytun saat ini telah membentuk grup-grup kecil bentukan seni keroncong. Sekadar menyebut contoh, di luar Al-Zaytun sana, pemusik *underground* Bondan Prakoso telah memakai keroncong untuk memadukan musik hip-hop.

Diplomasi Seni

Dengan pendidikan yang mengacu pada standar kualifikasi internasional, Al-Zaytun menjadi komunitas siswa se-Nusantara dan mancanegara. Santri yang datang menimba ilmu, tidak hanya datang dari santerto Nusantara. Tapi, santri dari sejumlah negara pun tercatat sebagai civitas Mahad Al-Zaytun.

Kenyataan ini membuka peluang untuk terjadinya interaksi kuat antar bangsa dalam Al-Zaytun. Bukan hanya interaksi antar siswa, sejumlah tamu kenegaraan pun acap melakukan kunjungan ke Al-Zaytun. Tak heran, jika dalam sejumlah agenda kunjungan para duta negara asing, alunan musik keroncong menyertai acara perjamuan makan.

Sejarah mencatat bahwa seni sudah menjadi diplomasi yang ampuh. Alat untuk memperkenalkan identitas antar bangsa. Grup Keroncong Perdamaian Al-Zaytun telah menjadi salah satu duta budaya Al-Zaytun. Mereka setia hadir menemani rehat tamu istimewa dan acara-acara besar. Tawaran yang pantas untuk mentasbihkan Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun sebagai duta seni.

Selain acara reguler tahunan seperti Pagelaran Seni Rihlah Ilmiah Mahad Al-Zaytun, agenda para koordinator santri dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Taiwan, Singapura, dan atau sejumlah Atase Budaya sejumlah negara yang sering juga datang ke kampus untuk sekadar datang berkunjung atau meliputi *event-event* penting yang terjadi di Ma'had Al-Zaytun. Mereka kerap mendapatkan sambutan musik keroncong.

Event lain yang pernah melibatkan Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun sebagai duta seni saat kunjungan Atase Politik Amerika Serikat pada 4 April 2003 telah memberikan sambutan yang luar biasa, sehingga mereka meminta Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun merekam *jams session* pada 18 Desember 2003 dan 22 Desember 2003 bertempat di lokasi latihan di Tribun Selatan Palagan Agung Lantai I.

Dan tepat di pengujung tahun 2004



Seorang santri nisa Al-Zaytun memeragakan seni tari.

foto: berindo wilson

Bagaimanapun, Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun sebagai duta seni sudah menjalankan misi mulia, menebar benih-benih seni.

sebelum pergantian ke tahun 2005, saat itu kunjungan Prof.Dr.Robert W.Hefner dari Universitas Boston Amerika Serikat yang memberikan ceramahnya di Meeting Room Wisma Tamu Al Ishlah Ma'had Al Zaytun. Semua personil disulap dalam kostum yang sangat formal. Kali ini mereka tidak mengenakan seragam grup yang biasa mereka kenakan. Jas formal membalut tampilan mereka yang mengkilap.

Begitupun saat Hendropriyono sebagai perwakilan Presiden Megawati datang berkunjung ke Ma'had Al Zaytun pada 13 Mei 2003 silam mendapatkan siraman tambang kenangan Grup Keroncong Perdamaian di Meeting Room Wisma Tamu Al Ishlah.

Tidak hanya di dalam lingkungan Mahad Al-Zaytun, Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun juga melawat ke sejumlah *event* di sejumlah kota. Untuk pertama kali penampilan mereka diuji di Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN). Mereka datang atas undangan untuk mengisi acara hiburan Temu Alumni UIN Jakarta pada tanggal 17 Mei 2003. Lalu disusul pada bulan Juni 2004, penampilan Grup Keroncong Perdamaian Ma'had Al Zaytun dalam rangka Rihlah Ilmiah Pelajar Ma'had Al Zaytun.

Berturut-turut mulai tanggal 2 Juni 2004 di Semen Gresik, tanggal 3 Juni 2004 di Petro Kimia Gresik, tanggal 5 Juni 2004 di UNESA Surabaya, tanggal 8 Juni 2004 di UGM, tanggal 10 Juni 2004 di SMU Taruna Magelang dan tanggal 11 Juni 2004 di UNES Semarang, Jawa Tengah.

Sebagai duta seni, Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun sudah mendapatkan posisi yang nyaman untuk terus eksis.

Jadwal manggung, baik *event* besar atau reguler menjadi penanda betapa besar peranan seni dalam Al-Zaytun. Namun, keberadaan yang terkesan elitis ini perlu diperlunak dengan sosialisasi ke dalam. Para santri sebenarnya juga menjadi sasaran utama mereka. Para santri itulah pendengar sejatinya.

Jika lagu *Volare* sudah membuat *shocking* para santri hingga menyebut Usth.Kokom Komariah (solist/vokal) sebagai "Ustadzah Volare" artinya para santri masih menagih banyak lagi lagu yang bisa membuat mereka terkejut.

Bagaimanapun, Grup Keroncong Perdamaian Al Zaytun sebagai duta seni sudah menjalankan misi mulia, menebar benih-benih seni. Mari kita ulang petikan lirik lagu *Pesantren Damai* yang ditulis langsung oleh Syaykh: *Pesisir utara, pohon lontar, saksi berdirinya / Diteruskan santri gemilang /Al Zaytun lah wujudnya // Pesisir utara, pohon lontar, saksi berdirinya / Diteruskan hamba perdamaian Al Zaytun lah wujudnya //*

Apapun bentuk seninya, Al-Zaytun sudah memberi ranah yang subur. Tinggal bagaimana benih itu berkecambah, dan tumbuh menjadi insan yang cerdas baik intelektual, emosional, dan spiritualnya. Mahad Al-Zaytun berupaya menghasilkan intelektual muda berhati mulia, dan tentunya dilamari cinta seni. Ya, di *Al-Zaytun lah wujudnya...* ■ **TIM-CUS**

Grup Keroncong Perdamaian Al-Zaytun

Resmi didirikan : 9 Mei 2003

Pengasuh : Syaykh Al-Zaytun AS.Panji Gumilang

Penasehat : Ust. Suarsa

Waktu Latihan : Dua kali seminggu; pukul 22.00 – 24.00 WIB

Tempat Latihan : Tribun Palagan Agung Sebelah Selatan Lantai I

Personil Lengkap:

1. Ust.Anang Rifa'i (bass)
2. Ust.Budi Satrio (keyboard)
3. Ust.Luki Burhansyah (cakalele)
4. Ust.Imam Nurrahman (conga dan triangle)
5. Ust.Tofik Sugiarto (snare drum dan hi-hat)
6. Usth.Desi Triyoga Ratri (vokal)
7. Usth.Desi Triyoga Ratri (vokal)
8. Usth.Siti Mahmudah (vokal)
9. Usth.Zakiah Mulyani Az Zahra (vokal)
10. Arif Maulana (cello, chaims dan maracas)
11. Injaya Meimara Valentino (cukulele dan gitar)
12. Wawan Rusman (biola)



foto: berindo wilson

Tank Marinir TNI AL, diantara Alutsista TNI yang sudah uzur.

Anggaran Dephan: Sudah Kecil Dipangkas Pula...

Anggaran pertahanan yang relatif kecil kembali dipangkas. Sejumlah program yang sudah ditata apik oleh Departemen Pertahanan, termasuk Latgab tiga matra di tahun 2008, terancam batal digelar.

Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernomor S-1/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008 akan memangkas anggaran di setiap departemen sebesar 15 persen. Kebijakan pemerintah ini berimbas pada departemen pertahanan yang juga membawa anggaran TNI, termasuk ketiga angkatan.

Dalam APBN 2008, Departemen Pertahanan hanya mendapat alokasi anggaran sekitar 36% dari yang diusulkan. Dari Rp 100 triliun anggaran yang diajukan Dephan, hanya disetujui Rp 36,39 triliun. Ang-

garan pertahanan yang terbatas itu diutamakan untuk kebutuhan pokok, seperti biaya rutin pegawai/prajurit, pemeliharaan alutsista, kegiatan latihan. Kini, melalui Surat Menkeu itu, anggaran yang sudah minim itu kembali akan dipangkas sebesar 15% atau sekitar Rp 5,5 triliun.

Dephan, sebagaimana dikemukakan Menhan Juwono Sudarsono, sangat menyadari keterbatasan keuangan pemerintah. Menhan tetap legowo dan menyadari langkah pemerintah untuk mendahulukan kepentingan yang prorakyat dengan memprioritaskan program pendidikan, kesehatan,

dan penciptaan lapangan kerja

Dengan rencana pemangkasan anggaran itu pihak Dephan harus memutar otak untuk kembali mengalokasikannya dengan secermat mungkin. Alhasil, rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI terpaksa dijadwalkan ulang. Kendati harus diakui bahwa nyaris sebagian besar alutsista itu sudah berusia di atas 20 tahun.

Untuk itu Dephan berharap adanya alternatif "jalan tengah". Dephan agaknya hanya bisa mentolerir pemangkasan anggaran tersebut tidak lebih dari 5% atau sekitar Rp 1,7 triliun. Sebab minimnya anggaran Dephan bisa menimbulkan kekhawatiran yang berdampak kepada etika dan moral prajurit TNI dalam menunaikan tugasnya. Satu di antara kekhawatiran itu adalah terancamnya latihan gabungan (Latgab) ketiga matra yang akan digelar bulan Juni 2008 mendatang di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau.

Sejak bergulirnya arus reformasi di tahun 1998, sejak itu pula ketiga matra TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) tidak pernah lagi menggelar Latgab. Hal ini bisa menumpulkan kepiawaian prajurit dalam mengasah kemampuannya di medan perang.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Sumardjono berharap, pemotongan anggaran itu hendaknya hanya berbentuk penundaan anggaran sementara. Sumardjono yakin pemerintah akan memberikan kembali anggaran jika perekonomian sudah stabil. "Jadi kita hanya mengundur kegiatan tambahan, bukan tugas pokok," jelasnya.

Sedangkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Subandrio meminta Departemen Keuangan tidak memotong alokasi anggaran yang diperuntukkan membiayai pemeliharaan kesiapan sistem angkut maupun tempur TNI AU. Kalau itu dipaksakan, dikhawatirkan semakin menjatuhkan tingkat kesiapan alutsista yang ada. "Kalau terkait anggaran pemeliharaan pesawat, ya, jangan dipotonglah. Saya akan mendukung program pemerintah, tapi ya jangan sampai anggaran itu yang dipotong," kata Subandrio saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR.

Ketua Panitia Anggaran Komisi I, Happy Bone Zulkarnaini menyarankan pemerintah terlebih dahulu membuat beberapa simulasi perkiraan dampak atau risiko yang mungkin terjadi jika alokasi anggaran dipotong dalam jumlah tertentu. Menurutnya, selain menimbulkan risiko juga akan terjadi demoralisasi di lingkungan prajurit TNI dan merusak rencana program kerja yang sudah ada.

Selain itu, juga akan berdampak kepada rekrutmen prajurit TNI dan biaya operasional satuan kerja di tubuh TNI, termasuk di dalamnya pengawasan batas wilayah yang minim dan perawatan alutsista. "Dengan anggaran sekarang saja masih banyak prajurit TNI mendapat jatah peluru yang tidak mencukupi untuk berlatih. "Malah ada yang latihan menembaknya cuma menirukan suara tembakan pakai mulut. Nanti prajurit TNI kita bisa jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan Askar Wataniahnya Malaysia," kata Bone. ■ **RON, SP**

Pemotongan Anggaran Pertahanan (Dalam Rupiah)

Pagu 2008	Anggaran Pertahanan	Rencana Pemotongan Anggaran Pertahanan
Dep. Pertahanan	6.310.818.056	1.432.164.813
Mabes TNI	4.514.215.531	607.858.448
Mabes TNI AD	16.091.020.043	1.078.118.630
Mabes TNI AL	5.501.493.132	1.274.112.171
Mabes TNI AU	3.981.301.334	1.067.573.152
TOTAL	36.398.848.096	5.459.827.214

Sumber: Rapat kerja teknis dan perencanaan Dephan dan TNI tahun anggaran 2008, daftar isian pelaksanaan anggaran pertahanan tahun 2008.



Agus Martowardojo

Dua nama calon gubernur Bank Indonesia diajukan Presiden ke DPR. Tanggapan beragam, termasuk DPR, muncul mewarnai proses penetapan bank sentral.

DPR menginginkan calon dari internal Bank Indonesia.

foto: repro media indonesia

Aroma Politik di Pileg

Presiden akhirnya mengajukan dua nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR, Jumat (15/2). Agus Martowardojo (Dirut Bank Mandiri Tbk) dan Raden Pardede (Wakil Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA). Keduanya merupakan figur dari luar BI. Pengajuan kedua nama ini untuk memenuhi ketentuan UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia.

Masa jabatan Gubernur BI periode 2003 - 2008, Burhanuddin Abdullah, akan habis pada 17 Mei 2008. Sesuai ketentuan, Presiden wajib mengajukan nama-nama calon ke DPR paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa tugas gubernur. Burhanuddin - yang kini menjadi tersangka dalam kasus penyaluran dana Rp 100 miliar - menyatakan tidak berniat untuk kembali menduduki jabatan tertinggi di bank sentral tersebut.

Pengajuan kedua nama ini sempat mengejutkan berbagai kalangan. Karena sebelumnya sempat beredar sejumlah nama yang dianggap pantas memimpin bank sentral itu. Sepekan menjelang diserahkan nama calon gubernur BI oleh Presiden ke DPR, bursa nama-nama bakal calon sudah beredar luas.

Sejumlah nama yang diperkirakan bakal diajukan saat itu - selain Agus Martowardojo - adalah Deputy Senior Gubernur BI Miranda S Gultom, Deputy Gubernur BI Hartadi Sarwono, Dirjen Pajak Darmin

Nasution, dan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Erry Firmansyah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun yang disebut belakangan, secara diplomatis mengatakan, "Apa saya cocok untuk jabatan itu".

Tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk di lingkungan DPR juga beragam. Ada yang mempersoalkan mengapa calon dipilih dari luar BI. Mereka beranggapan calon dari internal paling tepat mengingat tantangan yang dihadapi cukup berat.

Anggota Komisi XI DPR Emir Moeis misalnya. Dia secara pribadi menginginkan calon gubernur BI berasal dari internal lembaga itu. Karena selain tantangan ke depan cukup berat, kondisi pasar global juga diliputi ketidakpastian sehingga dibutuhkan sosok yang piawai dalam mengendalikan moneter.

Sementara yang tidak mempersoalkan apakah dari luar atau dari internal BI, berprinsip bahwa BI harus ditangani secara profesional, tidak terkait dengan persoalan hukum, mampu mengendalikan stabilitas ekonomi makro dan moneter.

Wakil Ketua Komisi XI Olly Dondu Kambe berpendapat, BI membutuhkan figur yang memiliki integritas moral yang sudah teruji dan mampu menjadikan BI sebagai pilar ekonomi bangsa. "Yang terpenting adalah mampu menjaga stabilitas moneter," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan anggota Komisi XI dari PKS

Andi Rahmat menegaskan, calon gubernur BI harus independen, mempunyai integritas dan kredibilitas. Mereka juga menyarankan sebaiknya dari kalangan generasi muda untuk penyegaran.

Pendapat agak berbeda dikemukakan Wakil Ketua DPD Irman Gusman. Dia menilai, tidak *urgent* memperdebatkan orang dalam atau orang luar BI. Yang terpenting stabilitas moneter tetap terjaga. Menurutnya, sebagai lembaga moneter yang independen, BI jangan sampai terjebak pada kepentingan politik sesaat, sehingga integritas dan citra lembaga ikut terpuruk.

Pelaku pasar umumnya lebih menyukai calon dari kalangan internal BI. Alasannya, tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini cukup berat. Terlebih lagi pasar keuangan global masih bergejolak dan ancaman inflasi melanda dunia., seiring kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya.

Direktur *Country Economist Citi Indonesia* Anton H Gunawan berujar, sebenarnya pasar lebih suka pada calon yang berasal dari internal BI. "Hartadi dan Miranda itu kredibel di pasar," katanya. Namun, kembali lagi kepada keinginan pemerintah, akan dijadikan seperti apa BI.

Gunawan berpendapat, saat ini sosok yang dibutuhkan untuk gubernur BI adalah yang dapat mengerti dan memahami stabilitas dan pengendalian moneter. Terutama untuk menjaga kurs rupiah pada posisi yang sehat dan kondusif untuk



Raden Pardede

Bank Indonesia sudah diajukan
dari berbagai kalangan,
wacana. Aroma politik ikut
dalam calon orang nomor satu di
sentral ini.

gub BI

pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, calon gubernur BI harus piawai di bidang moneter. Calon internal sebenarnya lebih baik. Tapi kalau toh yang terpilih dari eksternal, yang bersangkutan harus mendapat dukungan dari dalam BI.

Sedangkan ekonom dari Indef, Aviliani menilai figur Agus dan Raden mempunyai kompetensi menjadi gubernur BI. Agus ahli perbankan dan Raden mumpuni di bidang moneter dan fiskal. Namun karena tantangan ke depan adalah mengelola eksekusi likuiditas, menurut Aviliani, yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu melakukan terobosan dan koordinasi dengan otoritas moneter. "Gubernur BI harus mencari terobosan agar tidak terlalu banyak dana menganggur," katanya.

Pengamat pasar uang Fairal Anwar menambahkan, gubernur BI harus orang yang ahli dalam kebijakan moneter. Jika dimungkinkan, DPR sebaiknya meminta pemerintah mengajukan calon ketiga dari internal BI yang jelas mempunyai keahlian moneter yang diperlukan.

Menanggapi berbagai wacana yang mengemuka di masyarakat, Mensesneg Hatta Rajasa membantah terjadi perdebatan alot dan tarik ulur nama-nama calon yang diajukan ke DPR. Kabar yang beredar menyebut-nyebut Agus Martowardojo sebagai bankir kesayangan Pre-

siden SBY. Agus dinilai sebagai sosok yang bisa diterima di kalangan internal bank sentral maupun di DPR.

Penetapan kedua nama calon ini dikabarkan telah melalui suatu pengkajian mendalam dari sejumlah nama yang diterima Presiden SBY dari para menteri bidang ekonomi. Sebelumnya, seperti diungkapkan Mensesneg Sudi Silalahi, Presiden telah meminta sejumlah menteri untuk membuat daftar nama calon gubernur BI.

Tidak dimajukannya nama calon dari kalangan internal BI, rumor yang beredar menyebutkan karena Presiden tak ingin terjadi perdebatan terkait kasus aliran dana Rp 100 miliar yang kini ditangani KPK. Kasus pengaliran dana ini, termasuk ke anggota DPR, seperti dikemukakan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah merupakan keputusan kolektif yang diambil melalui rapat dewan gubernur.

Melalui pernyataannya itu secara tersirat Burhanuddin ingin mengatakan bahwa penyaluran dana itu bukan merupakan kebijakan pribadinya. Tetapi keputusan bersama dewan gubernur. Belakangan, Burhanuddin dalam pernyataannya yang kedua — setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK — menegaskan dirinya tidak berniat untuk kembali menjadi gubernur BI.

Beberapa jam sebelum menyerahkan surat yang berisi nama kedua calon gubernur BI ke DPR, Presiden SBY di Istana Negara menerima Burhanuddin Abdullah bersama jajaran deputi gubernur BI (15/2). Sesuai pertemuan Miranda S Gultom yang ditanya wartawan mengaku pasrah dan siap menerima keputusan presiden mengenai penetapan nama calon gubernur BI yang diajukan ke DPR. "Siapa saja kita terima apa yang ditentukan presiden. Tidak ada penolakan," ujarnya.

Ketua Ikatan Pegawai BI (IPEBI) Dian Ediana Rae juga bersikap sama. Menurutnya, siapa pun calon gubernur BI yang diajukan presiden akan didukung asalkan kredibel dan kapabel menjalankan tugas.

Di Tangan DPR

Dengan telah diajukannya dua nama calon gubernur BI ke DPR, maka kini 'bola' berada di tangan DPR. Komisi XI DPR diperkirakan baru akan melakukan *fit and proper test* pada bulan Maret. Setelah kedua nama itu disampaikan di rapat paripurna dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap kedua calon gubernur itu diperkirakan akan sarat dengan aroma politik. Hal ini tidak terlepas dengan kepentingan masing-masing partai politik. Kemungkinan akan ada tiga opsi yang bisa dilakukan DPR. Yakni memilih satu dari

dua kandidat, menolak keduanya atau meminta presiden menambah calon ketiga yang berasal dari kalangan internal BI.

Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo termasuk yang meminta Presiden menambah satu nama calon lagi. Dia ber alasan, dengan tiga calon, DPR akan lebih leluasa menentukan pilihan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Termasuk bagaimana visi dan misi mereka jika terpilih menjadi gubernur BI.

Fraksi PDI-P yang berposisi dengan pemerintah berpendapat, kedua nama itu, terutama Raden Pardede kurang dikenal di masyarakat pelaku ekonomi. Pengajuan nama Raden dianggapnya sebagai pelengkap karena Pemerintah sebetulnya menginginkan Agus Martowardojo menjadi gubernur BI.

Pengkajian kedua nama yang berasal dari unsur pemerintah itu dikhawatirkan PDI-P akan membuat BI menjadi tidak independen. "Padahal BI diharapkan independen dan keluar dari kekuasaan," kata anggota Fraksi PDI-P Gajus Lumbuun.

Sudah Final

Menanggapi berbagai reaksi yang muncul atas pengajuan dua nama itu, Mensesneg Hatta Rajasa menegaskan bahwa hal itu sudah final. Pemerintah tidak akan merevisi. "Dua nama itu sudah final. Cukup dua nama," katanya di Jakarta. Menurut Hatta, Presiden SBY sangat selektif dalam memilih figur yang diunggulkan sebagai calon gubernur.

Pengkajian Agus dan Raden, kata Hatta, sudah melalui pengkajian mendalam serta pertimbangan banyak kalangan. Kedua figur itu cukup kredibel dan memiliki kemampuan, pengetahuan dan *track record* yang mumpuni. Keduanya juga sama-sama memiliki kemampuan dan jaringan luas di bidang moneter. Agus merupakan bankir berpengalaman luas, sedangkan Raden adalah Ketua Forum Stabilisasi Keuangan dan pernah sukses menggelar forum investasi berskala internasional.

Kelanjutan pembahasan calon gubernur BI di DPR masih harus ditunggu. Akankah Komisi XI bersikap garang mengkritisi dan menguji kedua calon? Diperkirakan *deal-deal* politik akan terjadi antara yang mendukung dan menolak. Pihak pemerintah — melalui partai-partai pendukungnya — kemungkinan juga akan memberikan 'input' berupa alasan mengapa kedua nama itu dicalonkan.

Surat Presiden SBY tentang pengajuan kedua nama calon gubernur BI (19/2) lalu dibacakan di sidang paripurna DPR. Namun tak ada anggota dewan yang menanggapi. Saat surat itu dibacakan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeitno yang memimpin sidang, mereka yang semula garang ternyata hanya diam. ■ SP

RUU Pemilu Disetujui

Setelah lama RUU Pemilu tidak mendapat kesepakatan, akhirnya Senin (3/3), DPR melalui voting menyetujui RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD akhirnya disetujui. RUU ini memang semula dijawabkan selesai akhir tahun 2007, tapi karena ada beberapa materi krusial, pembahasannya terpaksa molor hingga Maret 2008 ini. Selama ini, berbagai lobi sudah dilakukan untuk menemukan solusi mencapai kesepakatan. Beberapa materi yang alot pembahasannya itu antara lain: pembagian sisa suara; ambang batas yang ditentukan untuk mengikuti pemilu berikutnya; ambang batas parlemen; penetapan calon terpilih dan cara memilih. Mengenai calon terpilih, disepakati dalam konsultasi antara pimpinan DPR dan ketua fraksi. Sedangkan pembagian sisa suara yang merupakan hal yang paling alot disepakati sebelumnya akhirnya diputuskan melalui voting, Senin (3/3). Hasil voting memutuskan bahwa sisa suara tak mencapai 50 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) di daerah pemilihan, dikumpulkan ke provinsi. (Lihat tabel). Dengan demikian, kursi DPR pertama kali dikonversi menjadi kursi berdasarkan perolehan suara partai politik dibagi bilangan pembagi pemilihan. Sisa kursi dibagi ke partai politik yang memperoleh sisa suara di atas separuh bilangan pembagi di setiap daerah pemilihan. Jika tetap ada sisa kursi, sisa suara yang tak mencapai separuh bilangan ditotal di provinsi guna menentukan bilangan pembagi baru. Dengan hasil putusan itu, tiga menteri wakil pemerintah yang mengikuti sidang paripurna itu (Mendagri Mardiyanto, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menhukham Andi Matalatta) sempat meminta

sidang diskors untuk minta waktu konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena sebelumnya pemerintah mengusulkan kursi DPR habis dibagi di daerah pemilihan saja. Namun setelah berkonsultasi dengan presiden, Mendagri Mardiyanto mengatakan bahwa pemerintah setuju rancangan itu ditetapkan. Dengan keputusan itu pula, berarti pemerintah gagalmengusung calon legislatoryang mendapat suara 30 persen dari BPP terpilih berdasarkan suara terbanyak. karena DPR tetap mempertahankan penentuannya melalui nomor urut sebagaimana diatur UU pemilu No.12 tahun 2003.

Sebelumnya, berlarut-larutnya keputusan RUU Pemilu ini sempat mengawatirkan, karena sangat berpengaruh pada kinerja KPU yang membutuhkan biaya payung hukum untuk bisa segera melaksanakan tugasnya. KPU juga dikejar waktu karena Pemilu 2009 dijadwalkan digelar pada 5 April 2009, atau sekitar 13 bulan lagi.

Kalangan pengamat dan pemantau pemilu sudah mendesak agar RUU itu segera diselesaikan. Lobi-lobi yang selama ini dilakukan sudah mereka minta dihentikan dan segera diambil keputusan melalui *voting*. Alasannya, lobi-lobi yang dilakukan itu hanya menghabiskan waktu dan membuang-buang energi. Apalagi sistem pemilu yang akan dilakukan nanti tidak berbeda dengan pemilu tahun 2004 lalu. "Judulnya saja sistem proporsional terbuka, isinya tidak terbuka karena masih ada pembatasan. Sistem Pemilu 2009 stagnan karena sama dengan Pemilu 2004," kata Direktur Eksekutif *Center for Electoral Reform* (Cetro) Hadar N Gumay seperti ditulis



Media Indonesia (16/2).

Molornya pengesahan RUU Pemilu ini menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow akan mengganggu kualitas pemilu dan menyandera KPU. "UU Pemilu harus segera disahkan karena waktu sudah semakin mendesak. Keterlambatan akan mengganggu persiapan pemilu oleh KPU," kata Jeirry.

Sementara Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yasonna Laoly dari Fraksi PDI-P, sebelumnya mengatakan, ada kejanggalan dalam pembahasan RUU ini. Sistem proporsional hanya menganut dua

cara. Yakni terbuka atau tertutup. Tidak ada terbuka terbatas. Mungkin ini sistem proporsional terbuka malumalu," katanya mengkritik.

Seiring dengan itu, Fraksi PKS, seperti dikemukakan Agus Purnomo, sebelumnya juga cenderung mendorong dilakukan *voting* untuk mencegah berlarut-larutnya pembahasan RUU ini. Sikap senada juga dikemukakan Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefudin. "Lebih terhormat kalah dalam *voting* karena mempertahankan sistem yang lebih baik, dibanding harus berkompromi atas sistem yang kita anggap tidak pas," kata Lukman. ■ **SP**

Undang-Undang Pemilu Baru

Poin	UU Pemilu Baru
Jumlah anggota DPR	560 kursi
Penetapan caleg terpilih	Bila tak memenuhi BPP 30%, kembali ke nomor urut
Jumlah atau alokasi kursi per dapil	3-12 kursi
Penghitungan sisa suara	50% BPP di dapil, sisa suara dikumpulkan ke provinsi
Parliamentary Threshold (PT)	Tidak ada PT, hanya ET (electoral threshold) 3%
Cara memberi suara	Menandai (Sebelumnya mencoblos)

Fraksi PDI-P Tepati Janji



foto: presidensby.info

Jusuf Kalla Ketua Bappilu Golkar

Menghadapi Pemilu 2009 yang tinggal 13 bulan lagi, Partai Golkar semakin memantapkan konsolidasi. Langkah ini dilakukan untuk bisa mempertahankan posisinya sebagai partai terbesar. Dalam Pemilu 2004 lalu Partai Golkar berada di posisi teratas dengan memperoleh 129 kursi di DPR.

Dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar di markasnya di Slipi, Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla secara aklamasi dipilih menjadi Ketua Badan Pemanangan Pemilu (Bappilu) partai berlambang pohon beringin itu.

Dalam rapat juga ditetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Pelaksana Harian Bappilu. Sedangkan Wakil Ketua Pelaksana Harian I dipercayakan kepada Burhanuddin Napitupulu dan Wakil Ketua Pelaksana Harian II Firman Subagyo.

Keputusan DPP Partai Golkar menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Bappilu, sekaligus menjawab pertanyaan yang berkambang di masyarakat. Sebelumnya nama Agung Laksono, Wakil Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPR, disebut-sebut bakal menduduki jabatan tersebut. Begitu pula sejumlah nama lainnya yang akan duduk dalam Bappilu.

Dengan tambahan jabatan sebagai Ketua Bappilu, Jusuf Kalla diyakini akan bisa mengakomodir semua unsur kekuatan pendukung Partai Golkar. Kini di pundak orang nomor satu partai berlambang pohon beringin ini dibebankan harapan untuk bisa mendulang perolehan suara sebanyak-banyaknya di ajang pemilu mendatang. ■ SP



foto: repro indo pos

Sekretaris Fraksi PDI-P Gandjar Pranowo dan tumpukan uang yang dikembalikan ke kas negara.

Berbeda dengan fraksi yang lain, Fraksi PDI-P DPR mengembalikan secara kolektif dana tunjangan legislasi yang diterima anggota fraksinya ke kas negara. Pengembalian dana Rp 3,3 miliar itu merupakan kebijakan DPP PDI-P.

Di tengah kritik masyarakat yang menilai DPR tidak peka dan tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi rakyat, Fraksi PDI-P Rabu (20/2) lalu menepati janjinya dengan mengembalikan uang tunjangan legislasi ke kas negara.

Fraksi partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu menyerahkan uang tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp 3,3 miliar. Uang ini merupakan tunjangan legislasi yang diterima para anggota dewan dalam tahun anggaran 2007 lalu. Setiap orang mendapat antara Rp 15 juta hingga Rp 38,9 juta.

Besaran dana yang diterima setiap anggota tergantung pada keikutsertaannya dalam panitia khusus (Pansus) pembahasan RUU. Mereka yang tidak ikut dalam pansus mendapat insentif Rp 1 juta untuk satu UU. Selama tahun 2007 ada 39 RUU yang disahkan menjadi UU.

Sekretaris Fraksi PDI-P Gan-

djar Pranowo menyatakan, dana yang dikembalikan itu dikumpulkan dari anggota Fraksi PDI-P yang menerima dana tersebut. Secara resmi uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- itu kemudian diserahkan kepada pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPR Nining Indra Shaleh. "Fraksi PDI-P minta uang ini segera diserahkan ke kas negara dan segera diberi laporannya," kata Ganjar ketika menyerahkan uang itu di ruang Sekretariat Fraksi PDI-P.

Pengembalian dana ini merupakan kebijakan DPP PDI-P beberapa waktu lalu. Saat itu Ketua Umum DPP PDI-P Megawati menginstruksikan para anggota fraksi mengembalikan dana legislasi yang mereka terima. Megawati juga menyatakan akan memberikan sanksi kepada yang tak mengembalikan. Yakni dengan tidak akan dicalonkan lagi pada pemilu mendatang.

Jumlah yang seharusnya dikembalikan oleh 109 anggota

Fraksi PDI-P sebesar Rp 3,79 miliar. Namun ada beberapa anggota yang sudah terlanjur menggunakan dana tersebut untuk kepentingan di daerah pemilihannya. Kepada mereka itu diberi waktu untuk mencicil. Jumlah dana yang terlanjur terpakai oleh sejumlah anggota Fraksi PDI-P itu sekitar Rp 400 juta.

Fraksi PDI-P merupakan fraksi pertama di DPR yang secara kolektif mengembalikan uang tunjangan legislasi. Sebelumnya, hanya beberapa anggota dewan yang secara pribadi mengembalikan dana itu. Diantaranya Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar), Gandjar Pranowo dan Ramson Siagian (Fraksi PDI-P).

Mayoritas fraksi menyatakan telah mengalihkan uang itu untuk bantuan bencana alam. Fraksi Partai Golkar sebagai fraksi terbesar di DPR juga tidak mengembalikan uang itu ke kas negara. Dari 129 anggota hanya satu yang mengembalikan, yakni Yuddy Chrisnandi. Jumlahnya Rp 36,53 juta yang diserahkan pada 18 Januari 2008 lalu.

Begitu pula Fraksi Partai Demokrat (F-PD), F-PPP, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PBR, F-PDS dan F-BPD. Mereka umumnya menyatakan mengalihkan uang itu untuk membantu korban bencana. Tetapi tidak dirinci besaran jumlah dana yang disumbangkan itu.

Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq menyatakan langkah Fraksi PDI-P mengembalikan dana itu ke kas negara patut ditiru. "Fraksi PKS sendiri sudah menahan dana itu agar tidak jatuh ke tangan anggota dan sudah dibagikan ke daerah pemilihan serta korban bencana alam, kali pertama ketika dana itu dibagikan," kata Mahfudz.

Sedangkan Ketua F-PD Syarif Hasan menilai, langkah yang dilakukan Fraksi PDI-P itu sah-sah saja. "Kami tidak akan begitu karena dana itu adalah hak anggota dan halal. Kalau saya lakukan itu, berarti telah menzalimi anggota fraksi," kata Hasan seperti ditulis *Media Indonesia* (21/2). ■ SP

Lingkaran Balas Dendam

Kenya yang tergolong paling makmur dan paling demokratis di Afrika kini terjebak dalam pertikaian sektarian yang diperkirakan akan berlangsung lama.

Konflik yang meluas di Kenya berawal dari pemilu presiden 27 Desember yang berlangsung kacau dan tak sesuai standar internasional. Semula kubu oposisi Riala Odinga disebut memenangi pemilu dengan keunggulan suara tipis. Namun, tiga hari setelah pemilu, Komisi Pemilu Kenya menyatakan, Presiden Mwai Kibaki menang atas pemimpin oposisi Raila Odinga. Odinga menyampaikan protes dan meminta Kibaki mundur. Hal ini menimbulkan ketegangan yang memuncak pada kerusuhan dan kekerasan.

Awalnya, bentrokan terjadi antara pendukung Odinga dan polisi. Selanjutnya, bentrokan berkembang menjadi kerusuhan antara suku Kikuyu (Kibaki bersuku Kikuyu) dan suku Luo

(Odinga bersuku Luo) yang sekitar 13 persen total penduduk Kenya. Kota-kota yang dihuni dua suku itu terjebak aksi saling serang, yang telah menewaskan sekitar 1.000 orang dan memaksa 250.000 warga mengungsi. Pertikaian di antara dua etnis itu juga melebar. Etnis Kikuyu sekitar 23 persen dari total 34 juta penduduk Kenya. Namun Odinga bersuku Luo juga didukung suku-suku lainnya, seperti Luhya (14 persen), Kalenjin (11 persen), Kamba (10 persen), Kisii (8 persen), dan Meru (8 persen). Hingga akhir Januari, aksi kekerasan makin parah terutama di wilayah Rift Valley yang dinilai sudah termasuk kategori pembersihan etnis terhadap etnis Kikuyu.

Para diplomat selama sebulan lebih sudah mencoba



Bentrokan antar pendukung melebar jadi bentrokan antar suku.

melerai konflik berdarah ini tetapi gagal. Mediator dari Uni Afrika (UA), John Kufuor, yang juga Presiden Ghana dan Ketua UA, gagal membujuk dua tokoh Kenya berekonsiliasi. Kofi Annan yang kini sedang mengambil alih peran mediasi itu, belum bisa berbuat banyak. Mantan Sekjen PBB ini memimpin panel, yang terdiri dari elite Afrika, untuk mencari solusi atas perbedaan Kibaki dan Odinga.

Sementara itu, Presiden Kibaki telah mengambil sumpah para menteri baru. Tak satu

pun menteri itu yang berasal dari kubu oposisi. Para pendukung Odinga juga terus melanjutkan aksi protes, terutama dilakukan kelompok wanita. "Tak akan ada perdamaian, tak akan ada keadilan! Kibaki adalah seorang pencuri," demikian bunyi protes itu. Polisi pun terpaksa menyemprotkan gas air mata pada pemrotes agar membubarkan diri. Sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan di negara itu, kepolisian Kenya telah diberi perintah tembak mati di tempat.

Kekacauan yang meluas di

Raul Castro, Presiden Baru Kuba

Mundurinya Fidel Castro menurut sejumlah kalangan membuat daftar musuh politik Amerika Serikat (AS) kembali menyusut. Itu menyusul pernyataan pemimpin Kuba, Fidel Castro untuk mundur dari dunia politik. Pria 81 tahun itu memastikan diri tak akan kembali ke kursi presiden lagi. Castro mengeluarkan pernyataannya dalam sepucuk surat yang diterbitkan oleh koran resmi Partai Komunis Kuba, Granma. "Saya tidak berkeinginan lagi untuk menerima posisi sebagai Presiden, Dewan Negara maupun Panglima Tertinggi," tulis rekan seperjuangan Ernesto "Che" Guevara itu seraya menegaskan bahwa dia akan terus berjuang sebagai "prajurit ideologi" saja.

Peran pria yang memimpin Kuba sejak merebut kekuasaan dari diktator Fulgencio Batista pada 1959 itu dalam kancah perpolitikan nasional dan internasional, mulai meredup sejak dia menjalani pembedahan lambung dan usus pada pertengahan 2006 lalu. Pemimpin tinggi Kuba itu pun kemudian "menon-



Fidel Castro

aktifkan" diri dan menyerahkan kekuasaan untuk sementara kepada saudaranya, Raul (76), pada bulan Juli di tahun yang sama. Pada Desember 2007 silam, Castro sempat mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan mundur untuk memberi jalan kepada generasi yang lebih muda.

Selama sakit, mantan pemimpin gerilya itu memang tidak pernah sekalipun terlihat di depan publik. Namun, pemerintah Kuba beberapa kali menerbitkan foto dan video yang memperlihatkan Castro sedang menemui para pemimpin negara lain yang berkunjung. Castro sempat diperlihatkan berbicara dengan



Raul Castro

Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva. Selama itu pula, keterlibatan Castro di dunia politik internasional tak kunjung bergeser. Berbagai komentarnya masih ditampilkan oleh sejumlah media lokal secara rutin dan berkala.

Berita pensiunnya Presiden Kuba Fidel Castro, memancing berbagai reaksi dari para pemimpin dunia dan organisasi dunia baik dari kalangan kawan maupun lawan. Sebagian menghargai Fidel Castro sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan, sedangkan sebagian lainnya menghujat atas track record kepemimpinannya yang terlalu

diktator. Mereka berharap dengan mundurnya Castro, akan terjadi perubahan yang sebenarnya. Seperti pernyataan Presiden AS George W Bush yang menilai rakyat Kuba selalu menderita dibawah pimpinan Castro. George W. Bush mengatakan, kabar dari Kuba ini sebaiknya menandai awal transisi menuju demokrasi bagi Kuba. Sementara PM Inggris Gordon Brown mengatakan dengan singkat, "Kami hanya bisa berharap setelah mengundurkan diri, akan ada lembaran baru, lebih terbuka dan akan menjadi negara yang lebih demokratis." Hal yang sama juga disampaikan oleh Menlu Swedia Carl Bildt, "Mundurinya Fidel Castro menunjukkan akhir dari suatu era dan merupakan awal dengan pengharapan yang tinggi namun mengakhiri penindasan."

Akhir Februari lalu, posisi Fidel Castro sebagai Presiden Kuba akhirnya digantikan oleh adiknya Raul Castro (76) setelah memperoleh dukungan selama sidang khusus Majelis Nasional. ■ MLP

Kenya telah mengganggu kelangsungan hidup di negara tetangga. Pelabuhan Mombasa di Kenya kini tidak aman untuk bongkar muat barang tujuan Kenya dan ke kawasan sekitarnya. Kenya adalah transit bagi seperempat omzet perekonomian Uganda dan Rwanda, sepertiga untuk Burundi. PBB pun sudah lama menggunakan Kenya sebagai pusat logistik untuk tujuan Somalia, Sudan, Uganda, dan Kongo. Aliran logistik untuk kawasan dan keperluan kemanusiaan itu kini praktis terhenti.

Konflik juga menghancurkan perekonomian Kenya yang merupakan salah satu negara pal-

ing makmur di Afrika. Industri pariwisata di negeri itu kini lumpuh. Ribuan turis membatalkan kunjungannya karena khawatir menjadi korban kerusuhan. Akibatnya, Kenya berpotensi kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata sebesar 900 juta dollar AS yang biasa mereka terima setiap tahunnya. Secara keseluruhan, kata sejumlah pejabat, konflik berdarah di Kenya mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar 1 miliar dollar AS. Selain itu, konflik mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Ahli ekonomi independen David Ndi mengatakannya, sulit untuk memper-



Tidak kurang dari 250.000 warga terpaksa mengungsi akibat bentokan.

kirakan seberapa besar kerugian ekonomi yang harus dibayar Kenya akibat konflik politik saat ini. Namun, lanjut dia, setidaknya konflik ini akan memangkas pertumbuhan ekonomi rata-rata Kenya yang mencapai 6,1 persen tahun lalu.

Boleh dibilang, saat ini sekitar 36 juta warga Kenya masih

menghadapi ancaman kerusuhan paling buruk yang pernah terjadi di negara bekas jajahan Inggris itu sejak 1963. Derita akibat kerusuhan paling dirasakan rakyat miskin di kota dan desa. Perlahan-lahan, lingkaran balas dendam semakin dalam dan sangat membahayakan. ■ MLP

Suku Aborigin Terima Kompensasi

Permintaan maaf resmi Pemerintah Australia kepada penduduk pribumi Aborigin atas kebijakan "generasi yang terampas" (stolen generation) awal tahun ini disambut baik semua kalangan. Namun permintaan maaf itu bukan ditujukan pada individual atau kasus per kasus, namun kelompok. Itulah alasan mengapa pemerintah Australia menolak memberikan kompensasi kepada para korban.

Langkah Pemerintah Australia itu berlawanan dengan pemerintah tingkat negara bagian. Seluruh enam negara bagian lebih dulu meminta maaf secara resmi kepada Aborigin. Negara bagian Tasmania mengesahkan ganti rugi lima juta dolar Australia bagi 106 orang aborigin korban "stoleh generation". Sebanyak 84 korban masing-masing mendapat 58 ribu dolar Australia sedangkan 22 keturunan mereka masing-masing mendapat lima ribu dolar. Selama ini telah ada beberapa korban "stolen generation" yang menggugat ganti rugi ke pemerintah, tapi hanya sedikit yang berhasil karena sulitnya pembuktian. Gugatan paling berhasil adalah yang dilakukan Bruce Trevorrow. Bulan lalu ia menerima 775 ribu dolar Australia dari negara bagian South Australia sebagai ganti rugi atas kejadian 50 tahun lalu ketika dia diambil dari rumah sakit tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Butuh 11 tahun bagi pemerintah Australia untuk mengucapkan maaf secara resmi, setelah pada 1997, Komisi HAM Australia lewat laporannya menyebut politik asimilasi adalah "usaha genosida (pemusnahan etnik)." Laporan berjudul "Bringing Them Home" itu meyakini orang aborigin akan punah setelah pemerintah Australia dan gereja mulai 1880an hingga 1960an mengambil paksa sekitar 50 ribu anak-anak Aborigin dari orangtua mereka.

Aborigin, yang merupakan bangsa asli penghuni benua Australia, pertama kali menyaksikan pemukim pertama bangsa Eropa datang pada tahun 1788. Hari nasional 26 Januari dianggap Aborigin sebagai hari invasi. Saat ini ada sekitar 460 ribu orang aborigin, atau dua persen dari 21 juta penduduk Australia. Banyak dari mereka tinggal di pemukiman terpencil dan hidup seperti warga negara miskin, padahal Australia adalah negara maju. Angka kematian bayi Aborigin tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan non-aborigin. Harapan hidup pria aborigin lebih pendek 17 tahun dibanding pria kulit putih. Mereka memiliki tingkat lebih tinggi dalam hal pengangguran, narapidana, penyalahgunaan alkohol dan narkoba serta kekerasan rumah tangga. ■ MLP



Bangsa asli penghuni benua Australia.



Separuh Warga Dunia Akan Tinggal di Kota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan pada akhir 2008 separuh dari 6,7 miliar orang di seluruh dunia sudah akan tinggal di daerah perkotaan. Menurut DESA, badan PBB yang menangani masalah kependudukan, ekonomi dan sosial, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan pada masa mendatang akan lebih banyak terjadi di negar-negara Asia dan Afrika. Laporan revisi tahun 2007 tentang Prospek Urbanisasi Dunia yang dibuat oleh DESA (Department of Economic and Social Affairs) menyajikan perkiraan dan proyeksi resmi sampai tahun 2050 yang dibuat PBB tentang penduduk perkotaan dan pedesaan di semua negara di dunia.

Saat ini terdapat 1,6 miliar orang di Asia tinggal di wilayah perkotaan dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 1,8 miliar jiwa dalam 40 tahun ke depan. Urbanisasi di China akan meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu dari saat ini yang mencapai 40 persen diperkirakan menjadi 70 persen pada tahun 2050, yaitu sekitar 1 miliar orang. Di India, menurut laporan DESA, saat ini 30 persen dari populasi negara tersebut tinggal di wilayah perkotaan, yang jumlah penduduknya mencapai lebih dari 300 juta orang. Pada tahun 2050 nanti, diperkirakan akan ada 900 juta orang atau 55 persen populasi India yang sudah akan hidup di perkotaan. Sementara di Afrika, populasi penduduk perkotaan diperkirakan akan menjadi tiga kali lipat dalam kurun waktu 40 tahun ke depan, yaitu dari 340 juta menjadi 900 juta orang. ■ MLP



foto: presidenby.info

Presiden menjelaskan rencana revisi APBN kepada para gubernur tat kala berbicara pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/2).

Pemerintah Revisi APBN 2008

Inilah kali pertama APBN sudah direvisi jauh sebelum waktunya.

Sebelum sempat diberlakukan, sesungguhnya sejak 27 November 2007 APBN 2008 sudah diperhadapkan pada fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sidang Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melahirkan sebuah keputusan penting yaitu penetapan sembilan langkah antisipatif untuk mengamankan APBN 2008.

Jika tanpa langkah pengamanan, diperkirakan defisit APBN akan meroket dari asumsi semula Rp 73,3 triliun atau 1,7 persen dari PDB, naik menjadi Rp 185,4 triliun atau 4,3 persen dari PDB.

Salah satu langkah pengamanan dimaksud adalah memangkas sebesar 15% anggaran di 78 kementerian/lembaga pemerintah non departemen (K/L), keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernomor S-1/MK.02/2008 tertanggal 2 Januari

2008. Saat SK diterbitkan, harga minyak mentah sempat menembus level 100 dollar AS per barrel.

Kebijakan memangkas anggaran membuat sejumlah departemen menjerit. Pos belanja pertahanan yang tersebar di Departemen Pertahanan, Mabes TNI, serta ketiga matra angkatan, misalnya, harus dipotong sekitar Rp 5,5 triliun dari total pagu anggaran bidang pertahanan tahun 2008 sebesar Rp 36,39 triliun, triliun untuk mencapai persentase 15%.

Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2008 sebesar Rp 3,35 triliun harus pula dipotong sebesar Rp 500 miliar. Demikian pula Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), harus mengembalikan Rp 435 miliar dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2008 yang telah dialokasikan sebesar Rp 2,9 triliun.

Dengan cara halus, Menteri PU Djoko Kirmanto menanggapi pemotongan anggaran,

dengan meminta supaya anggaran di departemennya diubah menjadi realokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur PU yang rusak karena bencana banjir.

Hanya Menneg BUMN Sofyan A. Djalil yang dengan tegas mengatakan akan berupaya menaati peraturan Menkeu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhirnya Jumat (15/2) mengumumkan rencana merevisi asumsi makro APBN 2008. Revisi kali ini jauh lebih cepat dari kebiasaan semula, yang selalu jatuh setiap bulan Juli.

Dalam amanat pengantar RUU-APBN Perubahan 2008 untuk dibahas di DPR, Presiden mengubah sejumlah asumsi makro. Seperti, menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 6,8% menjadi 6,4%; Menaikkan pendapatan negara dan hibah dari Rp 781,4 triliun menjadi Rp 839 triliun; Menaikkan belanja negara dari Rp 854,6 triliun menjadi Rp 926 triliun; Mengubah asumsi inflasi dari semula 6% menjadi 6,5%; Merevisi nilai tukar rupiah dari Rp 9.100 menjadi Rp 9.150 per dollar AS; Menaikkan asumsi harga minyak dari 60 dollar AS menjadi 83 dollar AS per barrel; Menurunkan target *lifting* minyak dari 1,034 juta barrel menjadi 910 ribu barrel per hari; Menaikkan defisit dari Rp 73,3 triliun (1,7% dari PDB) menjadi Rp 87 triliun (2% dari PDB); serta

Menambah penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk membiayai APBN dari semula Rp 91,5 triliun menjadi Rp 116,6 triliun.

Kenaikan harga minyak mentah dunia, ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, serta kenaikan harga komoditas pangan dunia, adalah sejumlah alasan penting yang membuat pemerintah cepat merevisi asumsi APBN 2008. "Semua negara di dunia menurunkan sasaran pertumbuhannya," ucap Presiden di Jakarta.

Kondisi lokal Indonesia diperparah dengan janji pemerintah, yang terlanjur mengatakan tidak akan menaikkan lagi harga BBM hingga tahun 2009 setelah secara spektakuler menaikkannya rata-rata 100 persen pada 1 Oktober 2005. Padahal, kata Presiden, "Setiap kenaikan harga minyak 1 dollar AS, subsidi BBM naik Rp 3,1 triliun dan subsidi listrik juga meningkat Rp 660 miliar. Kalau APBN tidak diubah subsidi bisa mencapai Rp 250 triliun, dan APBN bisa kolaps."

Reaksi Beragam

Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan, semua sekretaris jenderal K/L mengeluh tidak bisa menjalankan program apabila pemerintah tetap memaksakan pemotongan.

Dradjad H. Wibowo, juga Anggota Komisi XI DPR, menyebutkan Depkeu harus

memberi contoh penghematan anggaran sebelum memaksa K/L lain. "Departemen lain tidak mau anggarannya dipotong karena gaji pegawai Depkeu justru paling tinggi," ucap Dradjad.

Hendri Saparini Direktur Pelaksana Econit menilai pemotongan membuktikan anggaran pemerintah pragmatis dan bervisi jangka pendek, serta tak membuat kesinambungan ekonomi. "Kesimpulannya, pemotongan anggaran adalah kebijakan jalan pintas dan kualitas pengelolaan fiskal rendah," kata Hendri.

Ekonom Tim Indonesia Bangkit Ikhsan Modjo menyebutkan pemotongan anggaran merupakan kebijakan gegabah. Disarankan, pemerintah supaya menerapkan kebijakan *switching* yakni mengalihkan anggaran dari pos-pos yang tidak penting, termasuk mengurangi gaji pegawai Depkeu.

Reaksi beragam dari para pejabat K/L, politisi, ekonom dan pengamat dijawab oleh Presiden SBY dengan mengeluarkan amanat presiden sebagai pengantar revisi APBN 2008.

Berbicara pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSSI) di Istana Negara, Jakarta, (15/2) Presiden mengatakan, langkah pemerintah menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 6,8% menjadi 6,4% bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan APBN. "Asumsi yang kita bangun, *growth* yang semula kita targetkan 6,8% tidak mungkin dicapai," kata Presiden.

Tentang revisi APBN kali ini pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy berkomentar, ini adalah bukti pemerintah salah dalam memprediksi ekonomi global dan salah membuat perencanaan. Menurutnya, kebijakan revisi berpotensi gagal menstabilisasi perekonomian.

Ditambahkan Noorsy, pemberian subsidi pangan dan BBM tidak akan mampu menghadang laju inflasi karena kenaikan harga barang. "Pertumbuhan ekonomi tetap tidak menciptakan lapangan kerja." ■ HT

Indonesia Korban Ekonomi Global

Dunia dibayangi rasa takut pelemahan ekonomi global. Setelah Januari bursa saham di semua belahan dunia mencatat kerugian besar, sejak Maret harga minyak kembali merangkak naik hingga tembus 102 dollar AS. Analis menyebutkan, terdapat 516 triliun dollar AS dana-dana investasi yang siap digunakan untuk merusak ekonomi global.

Dampak buruk kredit macet perumahan Amerika Serikat atau *subprime mortgage* tahun lalu semakin dirasakan. Apabila lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P), dari Hongkong Senin (11/2) mengumumkan bursa saham global selama Januari 2008 kehilangan dana 5,2 triliun dollar AS setara Rp 47.000 triliun, membuat indeks harga saham semua bursa di dunia rata-rata jatuh, kini, muncul peringatan dari seorang analis pasar yang sangat mengkhawatirkan konsumen global termasuk di Indonesia.

Paul Farrel, analis dimaksud, melalui situs *MarketWatch* edisi 25 Februari mengingatkan soal adanya dana-dana investasi sebesar 516 triliun dollar AS yang dapat dikerahkan menjadi kekuatan perusak ekonomi dunia. Jumlah itu sangat begitu besar bila dibandingkan total PDB dunia yang hanya 48 triliun dollar AS.

Dana-dana yang disebut Farrel sebagai *toxic derivatives*, yaitu transaksi di sektor keuangan yang menjadi fasilitas investasi untuk mengembangkan dana-dana orang berpunya, itu memasuki setiap pasar yang memberi fasilitas investasi mirip perjudian.

Banyak bursa saham di dunia, misalnya, yang sudah memasang taruhan soal naik turunnya indeks saham alias bukan lagi pada naik turunnya saham sebuah perusahaan. Dana-dana *toxic derivatives* dikelola para manajer investasi untuk bermain di kisaran saham, obligasi, dan valuta asing seperti dollar AS dan mata uang kuat dunia lainnya.

Kekhawatiran Farrel terbukti pada Januari lalu, sebagaimana laporan S&P, dimana pasar saham di negara berkembang mengalami kerontokan paling parah jatuh hingga 12,44 persen. Pasar saham di negara maju juga melemah 7,83 persen. Totalnya selama sebulan bursa global kehilangan dana 5,2



Konsumen Indonesia harus membayar harga-harga lebih mahal

foto: berindo wilson

triliun dollar AS, setara Rp 47.000 triliun.

Pengamatan perdagangan tanggal 25 Januari 2008 pada 52 bursa saham, menunjukkan, sebanyak 50 bursa ditutup dengan negatif bahkan 25 bursa menderita pelemahan hingga dua digit.

Selama Januari 2008 sebanyak 26 pasar saham di negara maju membukukan kinerja negatif, 16 bursa diantaranya melorot hingga 10 persen. Bila diperinci, bursa saham di Paris melemah 12,27 persen, dan selama tiga bulan terakhir melemah hingga 15,27 persen. Bursa London selama Januari turun 8,85 persen, dan selama tiga bulan terakhir minus 16,54 persen. Pasar saham AS selama Januari turun 6,07 persen, dan selama tiga bulan terakhir terpankas 10,78 persen.

Bursa saham Turki selama Januari mengalami kerugian paling parah, turun 22,70 persen, disusul kemudian bursa China merosot 21,40 persen, Rusia 16,12 persen, dan India 16 persen.

Di Jepang selama Januari bursa turun 4,47 persen, dan tiga bulan terakhir turun 10,44 persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta turut terpengaruh *subprime mortgage*, pada perdagangan Selasa (22/1) IHSG ditutup pada level 2.294,52, ambles sebanyak 191,35 poin atau 7,7 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya. Kondisi lebih parah dialami BEI pada penutupan sepekan sebelumnya, ditutup pada level 2.611,13 poin, rontok sebanyak 316,61 poin atau 12,12 persen. Inilah rentetan penurunan terbesar IHSG dalam sejarah bursa.

Setelah saham di seluruh belahan dunia panik, bursa sejangat rontok

habis, investor ramai-ramai menjual saham. Suasana kalut diperparah kondisi dua bank terbesar AS, Bank of America dan Wachovia Corporation, yang mengumumkan laba bersihnya kuartal IV 2007 ikut rontok masing-masing 95 persen dan 98 persen.

Untuk menormalisasi situasi The Federal Reserve (The Fed) ambil langkah taktis, memangkas bunga patokan *Fed funds rate* sebesar 0,75 persen dari sebelumnya 4,25 persen turun menjadi 3,5 persen pada hari Selasa (22/1). Efek penurunan langsung terasa esoknya, bursa Jepang naik 2,04 persen, bursa Hongkong melejit 10,72 persen, dan IHSG kembali menguat hingga 7,92 persen. Tanpa langkah korektif The Fed kerugian yang dialami bursa global diperkirakan akan jauh lebih besar dari yang diumumkan S&P.

Farrel mengingatkan para investor kini memasuki komoditas yang permainannya sudah disediakan di bursa, seperti bursa logam di London atau bursa komoditas di Chicago. Ia memberi contoh harga minyak dan gas yang terus meroket, harga gandum yang mencapai rekor tertinggi, demikian pula dengan kedelai, tanaman biji-bijian lainnya, hingga emas yang semuanya mempertaruhkan masa depan konsumen.

Tentu, konsumen Indonesia tak terlepas dari permainan global dimaksud bahkan sudah menjadi korban sebab turut mengalami kenaikan harga-harga pangan seperti tempe, minyak goreng, terlebih kenaikan BBM dan listrik. Jika Indonesia tak berhasil menjaga ketahanan pangan, konsumen bisa-bisa akan membayar harga-harga yang jauh lebih mahal lagi. ■ HT

Pajak Hambat Merger Perbankan

Untuk membangun industri perbankan yang tangguh, Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank untuk melakukan penggabungan usaha. Tetapi program terganjal oleh kewajiban membayar pajak yang harus ditanggung pemegang saham bank.

Bank Indonesia dengan independensi yang dimiliki menetapkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API berisikan cetak biru bagaimana menciptakan struktur perbankan nasional yang kokoh, yang mampu mengakomodasi kepentingan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu poin terpenting dalam API adalah, ditetapkan peraturan tentang kepemilikan tunggal bank atau *Single Presence Policy* (SPP).

Inti peraturan SPP membatasi pemegang saham pengendali hanya diijinkan untuk memiliki mayoritas saham pada satu bank.

Bank Indonesia menentukan, pemilik bank yang menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank, pada akhir tahun 2007 wajib mengajukan rencana pilihannya berdasarkan tiga alternatif yang disediakan BI.

Ketiga alternatif dimaksud adalah, *Pertama*, melakukan penggabungan (*merger*) atau konsolidasi terhadap bank-bank yang dimilikinya; *Kedua*, mempertahankan salah satu bank dan menjual bank yang lainnya; dan *Ketiga*, membentuk perusahaan induk (*holding company*) yang akan menjadi pemilik dari berbagai bank tersebut.

Kini, karyawan sejumlah bank besar yang terkena peraturan SPP mulai bertanya bagaimana nasib mereka manakala kebijakan SPP direalisasikan paling lambat ta-

hun 2010. Bila banknya jadi digabung, perasaan kemungkinan terkena rasionalisasi begitu kuat. Rasionalisasi karyawan sulit dihindari karena biasanya akan ada penutupan kantor cabang yang berdekatan.

Kalaupun karyawan tak terkena rasionalisasi, menggabungkan kultur dan etos kerja dua perusahaan berbeda tentu tidaklah mudah.

Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank Danamon turut terkena peraturan SPP, karena keduanya sama-sama dikendalikan oleh pemegang saham Temasek Holdings asal Singapura.

Demikian pula dengan Bank Lippo dan Bank Niaga, yang pemegang saham pengendalinya sama-sama di tangan perusahaan Khazanah dari Malaysia.

Masalah Pajak

Tetapi di tingkat pengambil keputusan, persoalan penggabungan bank yang dihadapi justru bukan itu.

Perhitungan pajak, yang harus sama-sama dibayar oleh bank yang bergabung, merupakan kendala terbesarnya.

Bank Indonesia berkali-kali mengatakan akan memberikan insentif kepada bank yang mau merger. Tetapi Departemen Keuangan biasanya tidak mau tahu soal insentif dimaksud.

Karenanya, sebagian bankir bersikap menunggu dan melihat hasil Pemilu 2009, manakala ada perubahan kebijakan.

Dalam proses merger, biasanya pengalihan harta bank



foto: berindo wilson

Bank Indonesia membatasi pemegang saham pengendali hanya diijinkan untuk memiliki mayoritas saham pada satu bank.

dihitung dengan menggunakan nilai pasar. Dari dasar itu, atas *capital gain* yang diraih, setiap bank yang bergabung dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30 persen. *Capital gain* merupakan selisih antara nilai pasar dan nilai buku.

Tetapi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengatakan, dalam proses merger bank yang diakuisisi tidak harus mengalihkan hartanya dengan nilai pasar. Tetapi, bisa pula dengan nilai buku.

Jika pengalihan harta menggunakan nilai buku, demikian Halim, maka tidak ada Pajak Penghasilan atas *capital gain*.

Halim Alamsyah menegaskan, Pajak Penghasilan (PPh) 30 persen atas *capital gain* hanya diberlakukan jika pengalihan menggunakan nilai pasar. "Pihak pajak pernah mengatakan, bank dimungkinkan untuk tidak menggunakan nilai pasar," kata Halim, Selasa (12/2), di Jakarta.

Akuisisi bank di Indonesia

selama ini menggunakan nilai pasar. Karena itulah BI dan perbankan keberatan dengan PPh 30 persen atas *capital gain*.

BI dan perbankan kemudian mengusulkan agar PPh dikurangi sehingga hanya 5 persen.

Saat ini nilai pasar bank rata-rata mencapai 3,5 kali nilai buku. Artinya, *capital gain* yang dihasilkan mencapai 2,5 kali nilai buku. Arti lainnya, pajak yang harus dibayar menjadi relatif besar.

Menurut Dirjen Pajak, Darmin Nasution, tidak ada kebijakan insentif pajak yang baru untuk merger. Keringanan yang diberikan terkait merger adalah, bank tidak perlu dilikuidasi terlebih dahulu jika ingin merger.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, BI harus memeras otak untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong proses merger, sebagai kompensasi tidak diberikannya insentif pajak yang sesuai harapan pemilik bank. ■ HT



foto: repro gatra

IHSG menguat 7,92 persen (23/1) setelah bank sentral AS memangkas bunga patokan menjadi 3,5 persen.

Bursa Saham Rontok

Dunia kini dibayangi rasa takut akan terjadi pelemahan ekonomi global. Bursa saham di semua belahan dunia mencatat kerugian besar. Tetapi, pelemahan bursa justru menyisakan peluang baru.

Dampak buruk krisis kredit macet perumahan Amerika Serikat tahun lalu, atau *subprime mortgage*, mulai dirasakan. Lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P), dari Hongkong Senin (11/2) mengumumkan, bursa saham global selama Januari 2008 kehilangan 5,2 triliun dollar AS, setara dengan Rp 47.000 triliun. Indeks harga saham di semua bursa rata-rata jatuh.

Pasar saham di negara berkembang mengalami kerontokan paling parah, jatuh 12,44 persen. Inilah kejatuhan awal tahun yang paling parah. Pasar saham di negara maju juga jatuh, melemah hanya 7,83 persen.

Pada perdagangan 25 Januari 2008, misalnya, dari 52 bursa saham yang diamati sebanyak 50 bursa di antaranya ditutup dengan negatif. Bahkan, 25 bursa di antaranya menderita pelemahan hingga dua digit.

Selama Januari 2008 sebanyak 26 pasar saham di negara maju membukukan kinerja negatif. Sebanyak 16 bursa di antaranya melorot hingga 10 persen.

Selama Januari bursa saham di Paris melemah 12,27 persen, dan selama tiga bulan terakhir melemah hingga 15,27 persen.

Bursa London mengalami situasi yang lebih buruk, selama Januari turun 8,85 persen, dan selama tiga bulan terakhir minus 16,54 persen.

Pasar saham AS selama Januari turun 6,07 persen, dan selama tiga bulan terakhir terpangkas 10,78 persen.

Bursa saham Turki selama Januari mengalami kerugian paling parah, turun 22,70 persen, disusul kemudian bursa China merosot 21,40 persen, Rusia 16,12 persen, dan India 16 persen.

Di Jepang, selama Januari bursa di negeri Matahari Terbit itu turun 4,47 persen, dan tiga bulan terakhir turun 10,44 persen.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

di Jakarta turut pula terpengaruh *subprime mortgage*. Pada perdagangan Selasa (22/1), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 2.294,52, amblas sebanyak 191,35 poin atau 7,7 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya. Kondisi lebih parah sudah dialami pada penutupan sepekan sebelumnya, ditutup pada level 2.611,13 poin, rontok sebanyak 316,61 poin atau 12,12 persen. Inilah rentetan penurunan terbesar IHSG dalam sejarah bursa.

Kepanikan sempat melanda para petinggi bursa Indonesia, hingga tercetus usulan untuk menghentikan sementara perdagangan bursa demi menghindari kemerosotan yang lebih dalam. Tetapi, "Kesimpulan kami, apa yang terjadi di pasar modal kita masih dalam batas wajar. Jadi, tidak perlu sampai ada skor bursa," kata Menko Perekonomian, Boediono.

Bermula dari AS

Setelah saham di seluruh belahan dunia panik, bursa secepat pun rontok habis, investor lalu ramai-ramai menjual saham. Suasana kalut diperparah kondisi dua bank terbesar AS, Bank of America dan Wachovia Corporation,

yang mengumumkan laba bersihnya di kuartal IV 2007 ikut rontok masing-masing 95 persen dan 98 persen.

Kondisi perekonomian AS dituding menjadi penyebab kerontokan bursa saham global, setelah terjadi krisis kredit perumahan.

Para analis menyebutkan, lembaga pemeringkat turut andil di dalamnya karena selalu memberi peringkat yang bagus-bagus terhadap surat-surat berharga berbasis kredit perumahan yang diterbitkan.

Tetapi Presiden Standard & Poor's, Deven Sharma, menolak tuduhan dimaksud. Menurutnya, transformasi yang terjadi pada pasar finansial memerlukan inovasi pemikiran, sumber-sumber yang lebih banyak, dan kemampuan analisis yang kuat. Deven berjanji akan memperbaiki langkah-langkah dalam memberikan peringkat.

Untuk menormalisasi situasi, The Federal Reserve (The Fed) kemudian ambil langkah taktis. Bank Sentral AS itu pada hari Selasa (22/1) tiba-tiba memangkas bunga patokan *Fed funds rate* sebesar 0,75 persen, dari sebelumnya 4,25 persen turun menjadi 3,5 persen.

"Mestinya langkah The Fed ini bisa memberi efek positif di pasar saham global dan domestik, setidaknya jangka pendek," kata Poltak Hotradedo, Kepala Riset Recapital Securities.

Efek penurunan suku bunga The Fed langsung terasa sehari kemudian. Pada perdagangan Rabu (23/1) bursa Jepang naik 2,04 persen, bursa Hongkong melejit 10,72 persen, dan IHSG kembali menguat hingga 7,92 persen.

Tanpa langkah korektif The Fed, kerugian yang dialami bursa global mungkin akan jauh lebih besar dari yang diumumkan S&P 5,4 triliun dollar AS.

Tetapi, para analisis justru melihat tersedia banyak peluang untuk mengail untung di tengah keruhnya bursa.

Poltak memberi saran supaya investor mencari saham-saham yang punya potensi ekspor, komoditas, perbankan. "Carilah yang *blue chips*. Mungkin ganti ke nonpertambangan," kata Poltak Hotradedo. ■ HT



H. Iding: Masyarakat harus mencintai dan memelihara alam.

H. Iding Srihadi Adiwinata, Dipl. WUM, ME.

Menyikapi Pengaruh Global Warming

Ia dinilai tangguh mengelola lembaganya termasuk mengatasi masalah akibat pengaruh Global Warming (pemanasan global).

Kiprah Iding Srihadi Adiwinata, Dipl. WUM, ME tentunya dibaktikan penuh untuk negara. Kantor pimpinannya sejak lama berada di Gedung Kertamukti Jl Braga No.137 Bandung. Gedung berlantai 6 buatan tahun 1971 itu, berseberangan dengan Gedung Bank Indonesia warisan Belanda. Di ruang kerjanya lantai 2, ia selalu menempati kursi dengan meja

kerja ukuran lebar dari kayu jati. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat ini mengaku tidak gentar menghadapi persoalan yang hangat belakangan ini yaitu *Global Warming* yang terindikasi dari adanya *climate change*.

Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, termasuk institusi yang turut ditantang membuat solusi atas merebaknya kekawatiran dampak pemanasan

global.

Sejak lama kalangan astronom menganggap air menjadi identitas tersendiri bagi planet Bumi. Air berada di hamparan laut, sungai, hujan, gunung es dan lapisan tanah.

Khusus untuk urusan sumber air permukaan pengisi waduk, situ, bendungan dan sejenisnya yang ada di wilayah Jawa Barat, maka Dinas PSDA berperan sebagai pusat pengelola. Segala perkara lebar maupun kedalaman sungai diurus dan dipikirkan.

Demikian halnya terhadap semua urusan dan karakteristik alami suatu bendungan atau waduk. Tapi kalau saja

wilayah provinsi Jawa Barat terancam kering - lama tidak disiram hujan - dari kantor ini pula, prakarsa teknis modifikasi cuaca (TMC) agar mendatangkan hujan, biasa dilakukan. Sedangkan teknis penaburan dilaksanakan lewat bantuan pesawat terbang.

Perolehan solusi atas masalah kompleks tentang penyediaan dan pemanfaatan air tentunya tidaklah mudah. Kepala dinas kerap mengaku bersyukur ketika masyarakat memaklumi betapa berat beban lembaganya. Terlebih ketika sekarang, gedung kantornya seolah terbentur langsung dengan isu masalah pemanasan global.

Beban tambah berat ketika fakta menunjukkan, banjir di mana-mana dan permukaan air laut jadi meninggi. Di sisi lain kekeringan sering melanda daratan Jawa Barat. Dampak psikologis yang ditimbulkan sangat berat dan menakutkan.

Lantas bagaimana Dinas PSDA mampu terlepas dari himpitan tadi. Seperti argu-

men itulah yang senantiasa dipikirkan Kadis. Jurusnya pun hanya satu kiat. Yakni, mengandalkan solusi efektif dan akurat. Dan jangan salah, bentuk solusi harus menjamin sukses. Artinya dirasakan dan dinikmati masyarakat Jawa Barat.

Dengan begitu, tercapailah stabilitas kuantitas produk pertanian, kecukupan air dan kian amannya area rawan bencana. Pertanyaan baru kemudian muncul. Memang seperti apa, kiprah dan pola pikir elegan sebagai satu-satunya jawaban atas munculnya seluruh persoalan tadi.

Tentang bagaimana fenomena dunia terhadap masalah Global Warming, sepertinya jadi persoalan khusus dan dianggapnya sebagai materi penting. Dibenarkan, bila masalah tersebut turut mem-

pengaruhi produk kebijakan lembaga yang dikepalainya.

Bagi, Pak Iding - demikian sapaan akrabnya - pembentukan solusi universal atas terjadinya perubahan iklim dunia dewasa ini, seolah dengan sendirinya telah mempengaruhi rencana tata tanam global. Perubahan ini ia maklumi sebagai hal yang cukup logis. Namun begitu ia paham, tata tanam baru tersebut, belum menjamin perolehan produk tanam sesuai harapan.

“Dalam tata tanam secara global tadi, seperti sudah disepakati segera dilakukannya langkah penting dengan penjadwalan ulang pola dan tata tanam. Langkah ini disebut sebagai adaptasi penghuni bumi terhadap berubahnya iklim keseluruhan,” tandasnya.

Sepanjang pembicaraan ikhwal pemanasan global, Pak Iding tidak lupa bicara soal ketersediaan air di sungai maupun air yang turun dari langit. Ketersediaan air di sungai maupun air yang diturunkan lewat hujan dianggapnya sebagai dua faktor penentu tata tanam yang baru kelak.

Faktor tersebut lazim menentukan agenda pembibitan, penanaman dan panen. Itu berarti memastikan PSDA sebagai pengelola sumber daya air, akan berperan penuh dalam program ‘set ulang’ pola dan tata tanam untuk provinsinya yang berbasis ketersediaan air atau dalam istilah asing disebut: *water availability*.

Pada kesempatan tersebut dikemukakan pula realisasi pengulangan set tata tanam global yang lebih ideal. Bagusnya tidak hanya mengacu pada debit air di sungai dan curah hujan, tetapi juga memperhatikan lama waktu sorotan sinar matahari ke permukaan tanah saat musim kemarau maupun musim hujan. Sebagaimana dipahami umum, bahwa sinar matahari adalah suatu energi penting guna menentukan kualitas tanaman sejalan dengan rumus fotosintesis.

Menyinggung kasus naiknya permukaan air laut mengakibatkan pembendungan banyak muara sungai, ditafsirkan PSDA sebagai tantangan baru

yang dapat diatasi dengan kurun waktu yang panjang. Hal tersebut menyangkut kemampuan keuangan pemerintah untuk membuat banyak bangunan sedimen sejajar pantai. Biaya untuk keperluan tersebut sangat besar. Tapi bukan sesuatu yang mustahil dilakukan karena masih ada alternatif pemecahan masalah. Yakni, melalui pembangunan bertahap muara per muara dengan periode yang lama. Itu pun didukung *political will* yang sejalan.

Di sisi lain, kondisi muara akibat naiknya permukaan air laut sudah mengkhawatirkan. Sebab, demikian tambahnya, muara-muara sungai di beberapa bagian pantai Jawa Barat sudah nampak terbenjung. Risiko banjir sudah dialami seperti di kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara. Andai Pemerintah DKI Jaya di sana tidak mengatasi, maka tanggul-tanggul laut yang sejak lama ada, bisa terancam ambrol. Demikian halnya bagi pesisir pantai Jawa Barat. Diakuihnya, secara teknis PSDA sudah memikirkan antisipasi gejala itu.

Berbincang mengenai adanya beberapa sungai di Jawa

Barat yang kadang menunjukkan kelebihan debit air hingga menyebabkan banjir, jawabannya pun mengisyaratkan bahwa PSDA hampir tidak berdaya mengatasi bencana itu tanpa dukungan banyak pihak. Menurutnya, banyak peristiwa banjir pada musim hujan di wilayahnya akibat hutan di hulu sungai yang sudah gundul. Belum lagi terdapatnya perubahan fungsi lahan dari perkebunan ke perumahan atau industri. Solusi paling efisien mengatasi ancaman banjir maupun kekeringan harus dikembalikan pada masyarakatnya itu sendiri untuk berpartisipasi. Jenis partisipasi berupa peningkatan kesadaran masyarakat setempat untuk senantiasa memelihara kelestarian alam.

“Mereka harus suka dan cinta pada pohon di hutan, selain terus dibina menyayangi keberadaan air di sungai. Siapa yang harus bergerak menciptakan hal itu, tentunya bukan sekedar PSDA tetapi banyak. Sudah lama kita mengadakan pelatihan pada masyarakat agar mampu *manage* air sungai dan irigasi secara baik. Hasilnya kelak dinikmati oleh mereka sen-

Biodata

Nama:

H. Iding Srihadi Adiwinata, Dipl. WUM, ME.

NIP:

110023723

TTI Lahir:

Ciamis 5 November 1951

Agama:

Islam

Jenis Kepegawaian:

Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pendidikan Terakhir:

Pasca Sarjana Univ Of Roorke India 1986

Pengalaman Kerja:

- Fisheries Support Services Project East Sulawesi
- Integrated Swamp Dev. Project Jambi
- Jatigede Dam Project
- West Java Irrigation Project
- Kepala SubDinas Operasi & Pemeliharaan DPSDA Jabar
- Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.

diri,” pungkas Iding sambil berharap, langkah manusia di berbagai belahan dunia mengatasi bahaya Global Warming dapat membuahkan hasil yang semestinya. ■ HA,AW



Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, termasuk institusi yang turut ditantang membuat solusi atas merebaknya kekhawatiran dampak pemanasan global.

Dana Swakelola Pendidikan Rawan Korupsi

Untuk menjaga pelaksanaan pembangunan sekolah dari penyimpangan, pengawasan harus diperketat.

Pembangunan sarana pendidikan yang disalurkan pemerintah melalui *rollshearing*, dekonsentrasi maupun APBD, di Kabupaten Purwakarta rawan penyimpangan. Hal tersebut disimpulkan sesuai liputan *Berita Indonesia* akhir-akhir ini. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), pelaksanaan, pengawasan, hingga penyusunan SPJ banyak direkayasa.

Program pemerintah yang disalurkan ke sekolah secara swakelola yang melibatkan peran aktif Komite dan Kepala Sekolah itu dimaksudkan agar dana yang digulirkan memberi peran aktif dan merangsang swadaya masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan banyak terjadi penyelewengan. Juklak dan juknis dirahasiakan, sistim pengawasan juga lemah.

Pada program *rollshearing* untuk rehab ruang belajar 18 unit sekolah dasar (SD) bantuan Pemprov Jabar tahun 2007, khusus rehab fisik, pelaksanaannya melibatkan komite yang berbeda dengan pengadaan mobiler meja kursi. Anggaran Rp 300 ribu/set justru disinyalir dikondisikan kepada satu perusahaan tanpa tender oleh oknum tertentu. SDN 1 Gardu Kecamatan Kiarapedes, misalnya, menerima dana dekonsentrasi dari Depdiknas untuk rehab 2 ruang belajar sebesar Rp 87 juta, namun di lapangan hanya memperbaiki tembok yang retak dan lapuk.

Demikian halnya dengan SDN 3 Cikao Kecamatan Jatiluhur yang mendapat dana dekonsentrasi rehab 2 ruang kelas ternyata atap genteng bekas hanya di cat menjadi warna hijau. Tembok dinding dan pintu memang dipasang baru sesuai rencana kontruksi, tapi bahan yang digunakan kualitas lokal. Kepala Sekolah SDN 3 Cikao, Adang Adji-

dji mengakui bahwa dalam RAB, atap genteng harus diganti. Menurutnya, apa yang dilakukan itu tidak masalah sebab sudah atas persetujuan Rudi, konsultan yang ditunjuk Depdiknas. Juga sudah sepengetahuan Kepala UPTD Jatiluhur dan Kasi Sarana TK/SD Dinas Pendidikan Purwakarta.

Sementara menurut Kabid TK/SD, Drs Akun Kurniadi MM, Dinas Pendidikan Purwakarta tidak terlibat secara struktural proyek. Instansi ini katanya hanya sebagai monitoring. Karena itu, jika di lapangan tidak sesuai rencana anggaran biaya, itu menurutnya menjadi tanggung jawab konsultan, komite dan kepala sekolah.

Contoh lain program pendidikan yang sarat aroma indikasi korupsi adalah proyek pembebasan lahan 6000 m² Persiapan SMPN 3 Pesawahan di Desa Ciherang. Dalam pembebasan lahan ini, diindikasikan terjadinya *mark up* yang melibatkan Dinas Pendidikan Purwakarta. Untuk lahan itu, sesuai APBD Kab Purwakarta tahun 2007, biaya yang dianggarkan Rp 250 juta dengan harga lahan Rp 40 ribu/m². Tapi dalam pelaksanaan, harga lahan menjadi Rp80 ribu/m², sehingga hanya bisa membebaskan lahan 3000m², padahal NJOP tanah di lokasi tersebut diketahui hanya Rp15 ribu/m². Anehnya, di Desa Cidahu, yang bertetangga dengan Desa Ciherang, ada tersedia lahan 6000 m² dengan harga Rp35 ribu/m². Lokasinya pun lebih pas di jangkau penduduk setempat yang akan menjadi siswa di sekolah tersebut, namun itu tidak mendapat tanggapan dari panitia. Menurut Kasi Sarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan Rahayu SPd, Perbedaan harga itu disebabkan harga lahan di lokasi itu sudah naik dari harga seperti diajukan. Untuk mengatasi kekurangan lahan



SDN 3 Cikao, Jatiluhur, Purwakarta.

seluas 3000 m² lagi, dia mengatakan sudah diajukan melalui APBD tahun 2008. Selanjutnya, Rahayu mengatakan bahwa pelaksanaan di sekolah seutuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah bersama komite, sedangkan Dinas Pendidikan hanya mengucurkan dana.

Temuan lain adanya indikasi penyimpangan adalah pembangunan 6 ruang kelas baru SMPN 1 Pesawahan. Pembangunan ini menelan dana Rp 330 juta *rollshearing* Provinsi Jawa Barat. Pondasi gedung ruang kelas baru itu dibangun dekat jurang terjal. Empat meter pondasi belakang bangunan persis di atas jurang, ditimbun pasir karung. Sedang bagian bangunan lainnya yang merupakan bekas sawah, pondasi berada di sisi saluran irigasi dan sawah penduduk. Menurut pengamatan *Berita Indonesia*, lokasi bangunan tidak memenuhi standar lahan bangunan. Bahkan, terkesan dipaksakan untuk bangunan sekolah. Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawahan, Taufik mengakui bahwa itu dilakukan karena terbatasnya lahan. Jaminan konstruksi tanpa tenaga ahli atau kon-

sultan menurutnya semata-mata demi penghematan biaya.

Buruknya pelaksanaan di lapangan terutama proyek fisik, menurut Dayat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Cibatu, jika pemerintah mengharapakan kualitas pelaksanaan yang tepat, sistim swakelola ditiadakan saja. Kalau tidak, pengawasan harus systematis, dan dikembalikan kepada sistim tender. Kepala sekolah harus kembali ke fungsi utama sebagai manajer sekolah bukan manajer proyek. Selama ini, banyak kepala sekolah kurang memikirkan pembelajaran karena sibuk menyusun proposal dan mencari proyek yang dapat turun ke sekolahnya. Mengenai pengawasan di daerah, Kepala Bawasda Kab Purwakarta Drs Kokon F Hakim Msi, mengakui instansinya hanya mengaudit dan mengawasi anggaran APBD. Sedangkan *rollshearing*, dekonsentrasi, maupun dak, diaudit dan diawasi provinsi dan pusat. Sehingga jika terjadi penyelewengan, bisa saja luput dari audit dan pengawasan mereka karena sistim yang diambil berupa *sampling* saja. ■ BND



Bandara Juwata Tarakan, belum mampu didarati pesawat besar.

Kejari Tarakan Tunggu Pengaduan

Berita proyek bermasalah dianggap bisa mengundang masalah. Jaksa meminta wartawan untuk menyerahkan data-data yang dimilikinya.

Proyek peningkatan Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Timur, yakni perpanjangan landasan pacu (*runway*) sepanjang 400 meter dan lapangan parkir pesawat, hingga saat ini belum rampung. Diduga, ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan mengaku tidak ada menangani kasus mengenai proyek tersebut. "Kami tidak sedang membidik proyek itu," kata Jeffry Makapedua, SH, Kasi Pidana Khusus Kejari Tarakan. Karena itu pula, Kepala Kejari Tarakan, Syaiful Anwar melalui Jeffry meminta wartawan *Berita Indonesia* agar tidak memberitakan dulu tentang proyek tersebut. *Berita Indonesia* juga diminta memberikan data-data yang dimiliki tentang dugaan tersebut, kalau ada. Sebab menurut Kejaksaan, praduga penyelewengan di proyek senilai Rp 52,7 miliar itu akan ditindaklanjuti bila sudah ada pengaduan atau laporan masyarakat.

Jeffry Makapedua mengisyaratkan, jika pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau wartawan misalnya mau menyerahkan data-data yang dimilikinya, Kejaksaan tidak akan tinggal diam. Laporan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana di sejumlah proyek akan segera ditindaklanjuti. Termasuk laporan hasil pemeriksaan belanja

daerah Kota Tarakan tahun 2006 yang telah dilakukan Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD). "Kami sedang menindaklanjuti," papar Jeffry.

Sebagaimana diberitakan majalah ini pada Edisi 17 (Juli 2006) lalu, terjadinya kerusakan pada *runway* itu adalah ketika (Rabu, 12/4-2006) pesawat Boeing 737 seri 300 Citilink Garuda Indonesia sedang lepas landas. Menurut Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kaltim, Tunas Partomo, kerusakan itu disebabkan usia *overlay* (aspal permukaan landasan) yang sudah terlalu lama. "Kondisi tersebut diperparah lagi dengan seringnya permukaan landasan tergenang air," katanya. Namun, pernyataan itu ditolak sejumlah pengusaha konstruksi di Tarakan. Menurut mereka, kerusakan disebabkan material yang digunakan untuk *overlay* adalah aspal goreng.

Berdasarkan pernyataan itu, ditambah lagi dengan kejadian yang menimpa pesawat Mandala, Selasa siang (3/10-2006), -sebagaimana diberitakan *Berita Indonesia* Edisi 24 (Okt-Nov 2006) lalu, dimana pesawat jenis Boeing 737 seri 200 milik maskapai Mandala Airlines tergelincir karena faktor yang masih dipertanyakan, mestinya Kejaksaan sudah bisa menindaklanjuti masalah tersebut dengan cara mengambil *sample* aspal untuk

dicocokkan dengan patokan standarisasi AASHTO (*American Association of Stated Hightway Test Organization*) yakni teknik pemadatan aspal di lapangan terbang sesuai standard CBR (*California Bearing Ratio*). Dengan beberapa kejadian itu, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat, sebenarnya Kejaksaan dan Kepolisian sudah cukup alasan untuk mengusutnya.

Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Komisi III Supa'ad Hadianto, saat ditemui berjanji akan segera melakukan peninjauan. "Jika ternyata ada penyimpangan akan kami panggil dan laporkan secara tertulis ke Gubernur," katanya. Menurut wakil rakyat dari Fraksi Patriot Pancasila ini, Komisi III yang membidangi pembangunan di Kota Tarakan, saat ini masih konsentrasi pada proyek-proyek yang dibiayai APBD II. "Tentu, ada saaatnya nanti rekan wartawan, kami sertakan ke lapangan," ujarnya.

Sedangkan pihak pengelola bandara ketika coba diminta keterangan selalu mengelak. Kepala Bandara Tarakan, H Husni Djau, dua kali berusaha ditemui Asmudin, wartawan *Berita Indonesia* selalu mengelak dengan alasan sibuk. "Bapak (Husni Djau, Red) sangat sibuk. Tidak bisa menerima tamu," tolak seorang *security* di pintu kantornya.

Dari data di papan proyek diketahui, bahwa proyek itu ditangani oleh Dinas Perhubungan Kaltim dari dana APBD I – Tahun anggaran 2006 senilai Rp 52.707.419.000. Sedangkan kontraktor pelaksana adalah PT Adhi Jo (PT Adhi Karya-PT Beringin Jo). Jangka pelaksanaan proyek itu sebenarnya hanya 455 hari dan masa pemeliharaan 180 hari. Namun, ketika *Berita Indonesia* ke lokasi (Februari 2008), belum ada tanda-tanda kapan proyek tersebut selesai.

Padahal, pihak Mandala sebelumnya sudah menyiapkan pesawat lebih besar, yakni Airbus A319 untuk penerbangan ke Tarakan. Namun, seperti diungkapkan District Manager PT Mandala Airlines Cabang Tarakan, Marwan Aras, SH, untuk sementara - dalam waktu yang tidak ditentukan, - Mandala tidak akan melayani rute Tarakan. "Persoalannya, hingga saat ini landasan pacu Bandar udara Juwata Tarakan tidak bisa didarati jenis pesawat Airbus A319," kata Marwan Aras mengungkapkan alasannya. Sedangkan menanggapi kondisi landasan pacu Bandara Juwata Tarakan yang bergelombang, Marwan Aras tak punya komentar. "Pihak Bandara Juwata sudah melakukan perpanjangan dan pelebaran landasan. Untuk *strenght runway* (kekuatan landasan) dan *turning area* (tempat berputarnya pesawat) yang menentukan apakah sudah memenuhi syarat adalah kewenangan pusat," katanya. ■ **ASM, SLP**

Eddie Widiono

Lolos dari Pusaran Media

Tak sedikit tokoh harus jatuh dari kedudukannya karena “penghakiman” pers, di masa euforia yang terkadang membuat kita gamang untuk menentukan aturan main di bidang pers, antara memilih UU Nomor 40/1999 Tentang Pokok Pers, KUHP, atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kegamangan itu pernah menimpa Eddie Widiono Suwondo, Dirut PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang oleh Mabes Polri pada 18 April 2006 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin pembangkit listrik tenaga gas dan uap Borang, Sumatera Selatan, dan PLTG Muara Tawar, Bekasi.

Penetapan Eddie sebagai tersangka sungguh dramatis sebab berlangsung pada saat ia sedang mengikuti kunjungan

kerja Wapres Jusuf Kalla ke China, untuk menandatangani sejumlah perjanjian bisnis di bidang pengadaan listrik di Tanah Air.

Dalam kenyataannya, Eddie berhasil lolos dari kepublikan media setelah 31 Agustus 2006 Kejaksaan menghentikan penyidikan lewat putusan SP3. Eddie kemudian duduk kembali secara terhormat di tempat yang semestinya, setelah selama 120 hari sebelumnya mendekam di tahanan.

Analisis isi pemberitaan media tentang kejadian yang menimpa Eddie, itu menarik pandangan penulis Firman Yusak hingga menuangkannya ke dalam sebuah buku yang diberi judul “Eddie Widiono di Bawah Pusaran Media”. Buku kecil setebal 159 halaman diterbitkan oleh Next Media, diluncurkan di Hotel Four Season Jakarta Sabtu (16/2). Bedah buku di-

lakukan oleh kalangan pers sendiri, Marah Sakti Siregar, Sirikit Syah, dan Parni Hadi.

Eddie pun menyampaikan rasa hormatnya sebab namanya digunakan sebagai judul buku, kisah hidupnya menjadi latar belakang suatu bahasan isi media massa yang sedemikian ilmiahnya. Ia juga mengapresiasi acara bedah buku yang berlangsung menarik, terlihat animo yang begitu tinggi dari ratusan hadirin.

“Dan banyak membuka hal-hal yang sebetulnya kita rasakan tapi kita tidak yakin apakah orang lain juga merasakan hal yang sama,” ucap pria kelahiran Malang, Jawa Timur 15 Mei 1953 ini. “Tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun, buku ini, memang, menurut saya suatu karya yang pantas untuk dibaca dan direnungkan untuk kebaikan kita semua.”

Isi buku tak dimaksudkan



untuk bercerita soal Eddie, ataupun PLN, tetapi bagaimana media massa menyikapi kasus yang sedang menimpa Eddie.

Menjawab pertanyaan *Berita Indonesia* apakah dirinya lantas merasa puas dengan terbitnya buku, ia bertutur singkat.

“Yang saya lihat adalah, melihat animo dari, atau melihat dalam diskusi tadi di antara kalangan insan pers, saya merasa paling tidak ini merupakan suatu tetesan air barangkali di samudera. Tapi tetap saja membuat saya merasa bangga karena kita telah memfasilitasi suatu proses yang sehat,” ucap peraih gelar Master of Science (M.Sc) dalam bidang kontrol University of London, Inggris tahun 1989 ini. ■ ZAH, HT

Sutiyoso

Menyerap Aspirasi Rakyat

Sutiyoso mulai sering berada di tengah-tengah masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merupakan salah seorang kandidat calon presiden 2009, yang diprediksi mampu bersaing dengan *incumbent*.

Partai Pemersatu Bangsa (PPB), merupakan partai baru yang begitu kukuh mengusung nama Sutiyoso sebagai *icon* pemersatu bangsa. Sikap partai yang dinakhodai Muh. Musa Datuk Bc.HK (Ketua Umum DPP PPB), H. Irzen Okta (Sekjen), dan K.H. Moh. Makbul Malik, M.Sc (Ketua Dewan Pembina), itu ditegaskan saat berlangsung Rapimnas PPB di Jakarta, 19-21 Januari.

Kendati mulai sulit mengatur waktu, dan sedang berada di tengah petani jarak di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos tak mau kehilangan momen untuk memberikan orasi politik di hadapan peserta Rapimnas, yang berasal dari

seluruh provinsi. Ia pun menyampaikan pidato politik yang singkat namun padat, mengena, dan berhasil menggelorakan semangat peserta.

Dalam pembekalannya Bang Yos antara lain berpesan, sekembali ke daerah masing-masing, peserta Rapimnas harus bisa membuktikan, setiap kali Bang Yos datang ke suatu daerah maka daerah itu harus bergetar hebat, “Ini pemimpin bangsa datang, seperti itu situasinya,” ucap pria kelahiran Semarang, 6 Desember 1944 penuh semangat.

“Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat yang saya kunjungi. Di Manado, Kalimantan Tengah, Lampung, kemarin juga di Gunung Kidul seperti itu. Jadi, selamat berjuang semoga berhasil,” kata suami Setyorini ini.

Saat masih menjabat Gubernur, Sutiyoso pada Senin 1 Oktober 2007 mendeklarasikan diri sebagai Capres 2009. Pengalaman berkarir selama 29

tahun di pasukan elit TNI Angkatan Darat, Kopassus, ditambah 10 tahun sebagai Gubernur di Ibukota Negara, di antaranya dengan mengoordinir staf-staf terbaik di bidangnya masing-masing, disebutkan Sutiyoso merupakan modal utamanya menuju RI-1.

Karakter dasar pasukan elit, salah satunya membuat segala sesuatu secara terukur, menempanya sebagai pemimpin yang tak akan pernah umbar janji serta tabu untuk terdadak. Dalam hal inipun Sutiyoso sudah mempersiapkan segala hal secara terencana, di antaranya memasuki langsung kantong-kantong suara di semua daerah.

Di sana Sutiyoso aktif memperkenalkan diri, mendengar langsung keluhan rakyat, serta memberikan pengertian supaya mereka mau bersama-sama membangun kembali negeri yang hampir tercabik-cabik ini. Ternyata, di setiap



kunjungan itu Bang Yos selalu disambut antusias.

“Setiap saya hadir ada saja yang teriak, Bang Yos, Bang Yos, berarti mereka kenal sama saya,” kata mantan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini.

Sutiyoso menggambarkan Indonesia sebagai kapal induk. Sehingga, menurutnya, Indonesia tidak mungkin dinakhodai oleh seseorang yang menakhodai kapal kecil saja belum pernah. Sebab bakal nabrak sana nabrak sini. “Jadi, tidak mudah mencari pemimpin di negeri ini. Dan pada 2009 kita tidak boleh keliru memilih pemimpin,” tukasnya. ■ HT, SS

Hj. Siti Hardiyanti Rukmana

Penerus Cita-cita Ayahanda

Sepeninggal mantan Presiden Soeharto, putra-putri Presiden kedua RI menjadi rebutan partai politik. Termasuk putri sulungnya, Mbak Tutut, yang sangat diinginkan oleh Partai Golkar supaya aktif kembali.

Bukan tanpa alasan bila pemilik nama lengkap Hj. Siti Hardiyanti Hastuti Indra Rukmana ini menerima, dan menyatakan bertekad mengabdikan diri sebagai kader Partai Golkar. Bergabung dengan partai pohon beringin dilandasi oleh keinginannya untuk meneruskan cita-cita sang ayah dalam membangun bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Wanita kelahiran 23 Januari 1949 ini pun menyatakan kesiapan

menerima instruksi dan bekerja maksimal untuk partai.

Dunia politik bukanlah hal yang baru bagi Tutut. Sebelum Pak Harto lengser, ia aktif berkecimpung dalam partai Golkar, termasuk menjabat Ketua DPP Golongan Karya. Tetapi, pada saat pemilu tahun 2004 berlangsung, ia bergabung dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Oleh partai yang diketuai R Hartono itu, Tutut malahan diusung sebagai Calon Presiden (Capres), kendati tak kesampaian sebab suara yang diraih tak mencukupi untuk mengajukan calon.

Darah kepemimpinan Pak Harto tampaknya banyak diwarisi Tutut. Ia memang acapkali diajak sang ayah terlibat dalam rombongan kepresiden-

an, setiap kali Pak Harto semasa menjabat mengadakan kunjungan kenegaraan di dalam maupun luar negeri. Bahkan, pada era terakhir Kabinet Pembangunan VII sebelum lengser, ibu dari Dandy Nugroho Hendro Maryanto, Dandy dan Danny Bimo Hendro Utomo Rukmana itu diangkat menjadi Menteri Sosial.

Selain aktif di politik, ia juga dikenal di dunia bisnis. Tutut lah yang membesarkan PT Citra Lamtorogung Persada. Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor usaha, seperti jalan tol, asuransi, perkebunan sawit, media, hingga kelistrikan. Hingga tahun 1998 total aset bisnis Tutut mencapai Rp 4,5 triliun.

Di bidang sosial, Tutut aktif di Perhimpunan Donor Darah Indo-



nesia (PDDI), Yayasan Tiara Indah (Bhakti Nusantara Indah), Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Karana.

Namun setelah Pak Harto lengser, Tutut lebih banyak aktif di balik layar. Kesibukannya terforsir untuk mendampingi sang ayah yang sering sakit-sakitan. Tutut paling setia menunggu Pak Harto pada hari tuanya, termasuk mendampingi saat-saat terakhir sebelum mantan penguasa Orde Baru itu meninggal dunia, Minggu (27/1) di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, Jakarta. ■ ZAH



**Menyantuni masyarakat
dari resiko kematian, luka-luka,
dan cacat tetap akibat
kecelakaan lalu lintas**

UU No. 33 & UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No.17 & 18 Tahun 1965



JASA RAHARJA

Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan

Telepon bebas pulsa : 0-800-1-33-34-64
website : www.jasaraharja.co.id



foto: presidensby.info

Valina Singka Subekti (berjilbab) bersama koleganya di KPU saat menemui Presiden.

Valina Singka Subekti Tanggung Jawab Terhadap Konstitusi

Baginya, Amendemen UUD 1945 itu tidaklah mudah, tapi melalui proses politik yang luar biasa.

Sekelumit detik-detik mengamandemen UUD 1945 dituangkan perempuan yang akrab dipanggil Valina ini dalam sebuah buku berjudul "Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945."

Buku setebal 435 karya perempuan kelahiran Singkawang, 6 Maret 1961 yang diluncurkan pada pertengahan bulan Januari 2008 itu menggambarkan tentang informasi menyeluruh soal proses yang terjadi di MPR saat terjadinya amendemen UUD tahun 1999.

Buku itu juga berisi mengenai pemikiran politik yang

berkembang maupun kepentingan politik yang ada saat itu. Dalam buku itu, Valina juga memberikan gambaran gamblang dari sebuah pergulatan dirinya ketika masih menjabat sebagai anggota MPR RI.

Valina berharap, masyarakat Indonesia mengerti dan memperoleh informasi menyeluruh bagaimana proses amendemen itu terjadi. Agar nantinya, masyarakat Indonesia memiliki rasa dan bertanggung jawab terhadap konstitusi.

Keberhasilan sebuah demokrasi di mata Valina, bukan hanya berhubungan dengan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya jumlah penduduk,

dan faktor kultural Indonesia yang majemuk, tapi juga dilandasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Valina mengaku banyak peristiwa dan proses yang mengiringi saat menyusun buku yang merupakan disertasi Valina saat meraih gelar Doktor di UI itu. Diantaranya, tahun 2004, Valina sempat cuti setahun untuk mempersiapkan Pemilu 2004. Disusul, kemudian soal kasus hukum di internal KPU yang sempat membuat disertasinya terbengkalai. Khususnya, saat teman-temannya sesama anggota KPU terlibat dalam kasus suap. Dirinya termasuk yang sempat dimintai keterangan.

Pada saat itu, hampir saja Valina putus asa dan enggan menyelesaikan tulisannya itu. Namun Valina bersyukur, ternyata keluarganya memberikan dukungan yang cukup besar. Begitu juga promotornya, Maswadi Rauf dan Isbodroini Suyanto yang memberinya terus semangat untuk menyelesaikan buku itu. Termasuk dukungan dari koleganya di KPU, Chusnul Mar'iyah.

Pengalaman Berarti
Publik mengenal Valina saat

menjabat sebagai kepala Divisi Sosialisasi Pemilihan Umum pada KPU periode 2000-2004. Wajahnya sering muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Apalagi dia begitu akrab dengan para wartawan. Inilah pengalaman paling berarti dalam hidupnya.

Apalagi inilah untuk pertamakali Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum langsung dengan jumlah pemilih sebanyak 152 juta jiwa yang berlangsung sukses, damai dan demokratis. Atas prestasi ini, bangsa Indonesia pernah mendapat penghargaan medali demokrasi atau *International Democracy Award* dari sebuah Asosiasi Konsultan Politik Internasional pada 12 November 2007.

Peraih gelar magister ilmu politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) 1996 ini berpendapat bahwa rakyat Indonesia mulai "melek" politik. Selain itu, konstitusi dan demokrasi Indonesia di mata dosen FISIP UI ini memang berjalan dan maju pesat. Sepatutnya, keberhasilan dalam menggelar hajatan besar ini tercatat dalam sejarah bangsa ini.

Lulusan S1 FISIP UI 1985 ini kembali membuka memorinya, saat ia masih aktif memberikan pencerahan menjelang pemilu 1999. Bagaimana perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat dan besar di Jakarta ini terlibat langsung dalam memandu acara *talk Show 'Wacana Pemilu'* di stasiun ANTeve. Acara ini adalah sebagai salah-satu program Universitas Indonesia dalam usaha melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu dia aktif juga dalam sebuah seminar, diskusi, dan rajin menulis di berbagai media massa mengenai politik.

Dengan bangga pula Mantan Pengurus Besar (PB) HMI 1981-1982 menyatakan, belum ada negara di dunia ini kecuali Indonesia yang paling sering melakukan pemilihan secara langsung, termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal, kondisi Indonesia menurut pandangan wanita bersuamikan Dr H Imam Subekti ini masih termasuk sebagai negara demokrasi prosedural. ■ ZAH, RH

Singa dan Naga

Penolak Bala

Barongsai bukan sekadar seni hiburan, tapi memiliki makna spiritual bagi masyarakat Tionghoa.



Tari Barongsai dikenal dengan gerakannya yang energik, ekspresif, menegangkan sekaligus menakutkan. Tarian ini merupakan perpaduan keserasian dan dinamisasi gerak para penarinya yang atraktif dengan iringan musik tambur, gong, dan simbal.

Para penari atau pemain Tari Barongsai kebanyakan berlatar seni bela diri, kungfu dan Wushu. Hal ini berkaitan dengan gerakan tariannya bergaya akrobatik, yakni dengan salto, melompat, melompat dan berguling.

Barongsai biasanya digelar bukan hanya pada perayaan-perayaan seperti menyambut Imlek (Spring Festival) atau Cap Go Meh (Lantern Festival), tetapi juga digelar saat upacara-upacara penting lainnya seperti, peresmian perkantoran, toko, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, rumah, upacara pernikahan, festival budaya, kelenteng dan sebagainya.

Di negara asalnya, Tiongkok, tarian ini disebut dengan Lungwu atau Tarian Singa. Dalam bahasa Mandarin disebut

Shiwu atau Tarian Naga. Setidaknya ada tiga jenis barongsai dikenal di dunia, yaitu *xuang shi* (singa kembar), *qing shi* (singa hijau), dan *xing shi* (singa sadar).

Barongsai bukan sekadar seni hiburan semata, tapi dipercaya memiliki makna spiritual sebagai penolak bala juga mengekspresikan sebuah optimisme, kedamaian dan kesejahteraan.

Barongsai digambarkan sebagai simbol dari singa yang berani dengan memiliki sifat sebagai 'Raja Rimba yang perkasa' melindungi yang lemah. Selain itu singa juga dilambangkan binatang yang dipercaya memiliki kekuatan mistis dan magis yang bisa mengusir roh jahat atau tolak bala. Zaman dahulu permainan ini sering bermain dalam istana kekaisaran yang tujuannya untuk menghibur para penonton.

Secara keseluruhan, gerakan utama dari tarian barongsai adalah gerakan singa yang memakan amplop berisi uang yang disebut dengan istilah *lay see*. Di atas amplop tersebut biasanya ditemplei dengan sa-

yuran selada air yang melambangkan hadiah bagi sang singa. Proses memakan *lay see* ini biasanya berlangsung sekitar separuh bagian dari seluruh tarian barongsai itu.

Sejarah Barongsai

Berbagai versi muncul mengenai asal mula tarian Barongsai ini. Dalam sebuah buku 'Festival Tradisi Budaya Hina' karangan Dr Kai Kuok Liang di Shanghai RRC menyebutkan bahwa Singa datang dari bagian Barat daratan China. Waktu itu dinaiki oleh Pangeran Bun Cu Phu Sak yang membawa ajaran Budha ke Tiongkok, dikenal dengan zaman Lima Dinasti-Han (947-950 SM).

Sedang cerita lain mengatakan, tarian ini sudah ada pada zaman Dinasti Xie Han. Saat itu, Kaisaran Han Bu Tie mengutus Menteri Chang Chiau ke bagian Barat Tiongkok. Sewaktu kembali, sang Menteri Chiau membawa sebuah seni budaya setempat, yakni permainan singa (Tarian Barongsai). Ada pula yang menyebutkan tarian ini sudah ada sejak abad ke-5

atau zaman dinasti Sung, atau zaman Selatan-Utara.

Versi lain menyebutkan, tarian ini sudah digelar sejak masa Dinasti Thang (618-907 sebelum masehi). Sementara, menurut seorang guru besar asal Universitas Jinan, China, Huang Kun Zhang, menyebutkan Tarian Barongsai ada sejak tahun 420-589 Masehi, yakni, pada zaman pemerintahan dinasti Selatan-Utara atau Nan Bei. Ketika itu, pasukan Raja Song-Wen-Di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan-Yang dari negeri Lin Yi. Timbullah sebuah inisiatif dari sang panglima perang Raja Song Wen Di bernama Zhong Que untuk membuat sebuah boneka tiruan Singa yang sangat besar. Upaya sang panglima ternyata tidak sia-sia, dia berhasil mengusir pasukan gajah yang lari ketakutan karena melihat singa raksasa yang siap menerkam dan menyerang mereka.

Di Indonesia, Barongsai mulai masuk pada abad 17 atau saat terjadi migrasi besar-besaran dari China Selatan. Nama Barongsai menurut versi Indonesia berasal dari dua suku kata, Barong dan Sai. Kata Barong, berasal dari bahasa Melayu yang mirip dengan kesenian barong asal dari Jawa atau barong/singa-singaan dari Bali, sedang kata Sai berasal dari sebuah dialek Hokkian yang bermakna Singa. Suku Hakka sendiri menyebutkan permainan Barongsai ini dengan Tsam Sie Theu.

Mulanya keberadaan seni Tionghoa ini cenderung sembunyi-sembunyi dan tidak dipertontonkan secara umum. Namun sejak Inpres No. 14 Tahun 1967 dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 tahun 2000, seni ini mulai bangkit.

Kini di Indonesia, Barongsai secara resmi masuk dalam wadah Persatuan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia (Persobarin) dengan Pengurus Pusat Persobarin periode 2006-2010 yang dipimpin oleh Dahlan Iskan. Saat ini Persobarin telah membuka cabang di sejumlah daerah, di antaranya di DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Sulut, NTB, Gorontalo, Sumsel, Riau, Papua, Jambi, dan Sumatera Barat. ■ ZAH

Prawirotaman Kampung Turis di Markas Pejuang

Terkenal dengan deretan penginapannya yang terjangkau bagi para turis. Pernah menjadi kawasan industri batik dan markas pejuang kemerdekaan.

Sore itu, jalanan tampak lengang di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta. Namun demikian, kendaraan bermotor berlalu lalang tak kunjung henti. Beberapa tukang becak yang menunggu penumpang duduk-duduk santai di atas becak, yang diparkir di bawah pohon rindang. Sesekali mereka menyapa pejalan kaki yang lewat, menawarkan jasa untuk mengantar.

Meski hari itu tampak sepi, bukan berarti roda bisnis di kawasan ini tak menggeliat. Memang ada saat-saat sepi ketika puncak liburan sudah lewat. Yang jelas, sudah sejak lama kawasan Prawirotaman dikenal sebagai kampung wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan, terutama para *backpacker*, menjadikan kawasan ini sebagai alternatif tempat menginap yang murah meriah selama mengunjungi Yogyakarta.

Jalan Prawirotaman terbentang dari Prawirotaman I sampai Prawirotaman III. Sepanjang kawasan yang terletak sekitar lima kilometer dari pusat kota Yogyakarta itu dipenuhi deretan penginapan, agen wisata, galeri seni, kafe, toko buku dan warung telekomunikasi. Ada pula pasar tradisional.

Penginapan-penginapan yang ada dibangun dengan aneka ragam rancangan, saling bersaing dalam keunikannya masing-masing. Begitu pula kafe-kafe yang ada. Rancangan bangunan tradisional sampai modern bisa dijumpai di kawasan ini. Harga penginapan per malam pun sangat terjangkau, dengan fasilitas yang memadai, dari Rp 50.000 sampai Rp 300.000 per malam.

Kebanyakan pemilik usaha itu masih memiliki ikatan keluarga, yakni keturunan Prawirotomo. Namun banyak juga usaha yang sudah berpindah tangan. Kini keturunan Prawirotomo yang mengelola kawasan itu terdiri dari tiga keluarga besar, yakni keluarga Werdayoprawiro, Suroprawiro, dan Mangunprawiro.

Maka memasuki kawasan ini, suasana kampung turis mancanegara amat terasa. Beberapa kafe dan galeri seni memasang



Wisatawan menjadikan kawasan Prawirotaman sebagai alternatif tempat menginap yang murah.

menu dan keterangan dalam bahasa Inggris. Penduduk setempat juga fasih berbahasa Inggris.

Markas Pejuang

Dulunya, Prawirotaman benar-benar sebuah perkampungan. Kampung ini dikenal sejak abad ke-19. Ketika itu, kraton menghadiahkan sepetak tanah kepada seorang bangsawan bernama Prawirotomo.

Kampung ini pernah menjadi markas laskar pejuang di masa pra kemerdekaan. Itu sebabnya, hingga kini Jalan Prawirotaman II dan III yang berada di bagian paling selatan kawasan ini dikenal dengan nama Jalan Gerilya. Dulunya, kedua kawasan itu merupakan markas laskar pejuang, yakni laskar Prajurit Hantu Maut dan laskar Prajurit Prawirotomo. Di salah satu sudut jalan, tampak sebuah batu tulis untuk memperingati perjuangan mereka.

Pada tahun 1960-an, kampung markas pejuang itu menjadi pusat industri batik cap yang dikelola keturunan Prawirotomo. Mereka kemudian mengubah usahanya

menjadi jasa penginapan setelah industri batik cap kian meredup di era 1970-an. Sejak itulah, kawasan ini dikenal sebagai kampung turis.

Kawasan yang paling dikenal adalah Prawirotaman I. Disinilah pusat penginapan dan berbagai fasilitas. Toko-toko bukunya menjual buku-buku bagus dengan harga yang sangat murah. Buku-buku impor seharga ratusan ribu rupiah bisa didapat hanya dengan puluhan ribu rupiah saja.

Wisatawan yang menyukai koleksi barang antik bisa berburu di galeri-galeri seni yang ada. Kalau beruntung mungkin bisa mendapatkan alat cap batik, yang memang banyak diburu turis mancanegara. Selain memiliki nilai sejarah, detail motif cap itu sangat rumit dan otentik.

Pasar tradisional berada di Prawirotaman II. Di pasar ini banyak dijual jajanan pasar tradisional Yogya yang mengundang selera untuk dicicipi. Sementara itu di kawasan Prawirotaman III, kebanyakan adalah pemukiman penduduk setempat. ■ RH

Dua Laptop Untuk Dua Pekerjaan



Bagi Anda yang berkantong tebal, memiliki dua laptop untuk keperluan pekerjaan bisa jadi suatu keharusan. Satu laptop untuk pekerjaan berat, satu laptop lagi untuk pekerjaan ringan.

Laptop sekarang ini harganya semakin murah dan banyak pilihan. Bagi kita yang sering berkuat dengan database bisnis, mengotakatik foto, edit film, atau bermain game 3D, laptop kelas atas (*high end*) dengan ukuran layar minimal 15.4", pasti jadi pilihan. Namun konsekuensinya, konsumsi daya lebih boros (daya tahan baterai sekitar 2 jam) dan kurang nyaman ditenteng karena beratnya di atas 2 kg. Sedangkan bagi mereka yang hanya mengerjakan hal-hal praktis seperti mengetik atau mengirim email, laptop yang dipilih tentu laptop yang ringkas dan ramping, layarnya 12", bobotnya di bawah 2 kg. Konsekuensinya, semakin ramping laptop, semakin mahal harganya.

Laptop yang diperkenalkan CEO Apple, Steve Jobs, pada pembukaan Macworld Expo di San Fransisco akhir Januari lalu, sangat menarik perhatian dunia terutama bagi pengguna yang menginginkan laptop yang ringkas dan ramping. Laptop yang diberi nama MacBook Air ini diklaim sebagai yang tertipis di dunia.

Untuk menunjukkan betapa tipisnya MacBook Air, Steve Jobs mengeluarkannya dari

sebuah amplop coklat yang biasa dipakai untuk mengirim kertas dokumen. Meski tebalnya hanya 1,93 centimeter pada sisi paling tebal dan 0,4 centimeter di bagian paling tipis, MacBook Air dilengkapi prosesor Intel tercepat paling anyar yang diperkecil hingga 60 persen dari ukuran standar, khusus untuk laptop ini. Fitur-fitur yang dibenamkan pada



MacBook Air ini diilhami iPod dan iPhone. Misalnya, Apple menggunakan *hard disk* mini seperti halnya yang dilakukan pada iPod dan *touch pad* yang menyerupai tekstur layar sentuh pada iPhone. MacBook Air memiliki baterai yang tahan lima jam dengan monitor berukuran 13,3 inch.

Karena didesain tipis, beberapa fitur terpaksa diku-

rangi atau ditiadakan. MacBook Air tidak memiliki drive CD/DVD, hanya memiliki sebuah port *mag-safe power adapter*, sebuah port USB tunggal, sebuah port mikro *Digital Video Interface (DVI)* yang berguna untuk layar monitor eksternal dan sebuah lubang *headphone jack*. *Port firewire* yang biasa digunakan agar *hard disk* internal dapat dibaca di komputer lain dihilangkan dari MacBook Air karena jika memakai *port* ini akan membutuhkan ruang yang besar dan hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kelebihan fungsionalitas.

Pilihan pengguna akan laptop ringkas



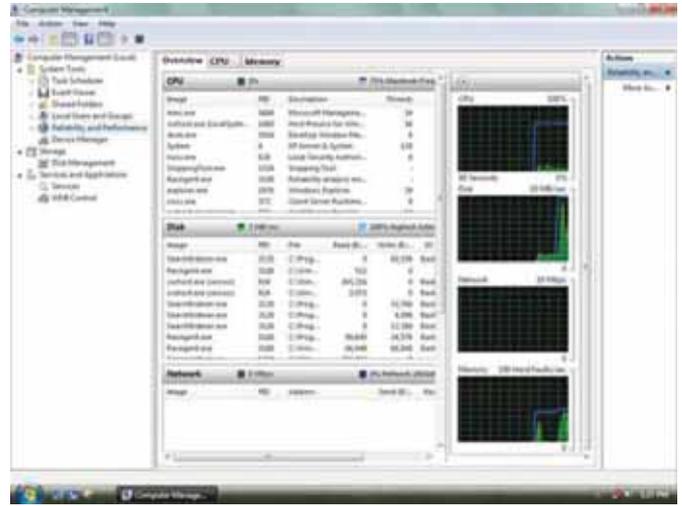
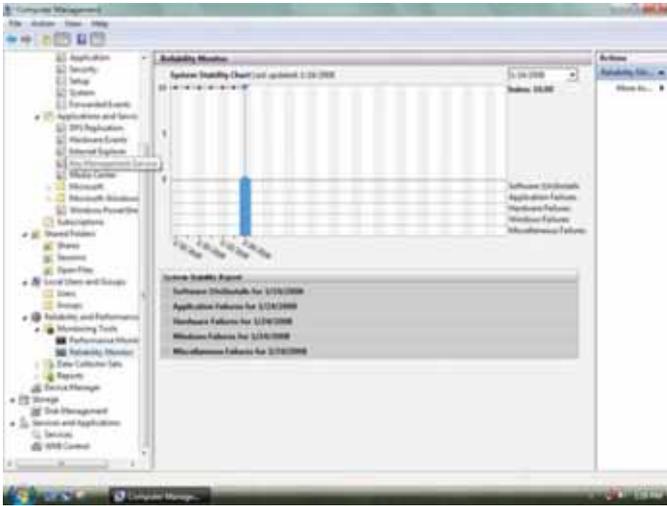
dan ramping sebenarnya cukup banyak. Meski merupakan laptop tertipis di dunia, MacBook Air yang memiliki berat 1,5 kg bukanlah laptop teringan di dunia. Masih ada jajaran laptop-laptop ringan lainnya, seperti Toshiba, Lenovo, Fujitsu, dan Sony yang diluncurkan beberapa tahun lalu. Laptop Toshiba Portege R500, misalnya, memiliki berat 0,86 kg. Sedangkan Lenovo ThinkPad X61 memiliki berat 1,35 kg. Namun, banyak orang tidak mengenal laptop-laptop ringan ini sebab pasarnya sangat terbatas. Laptop-laptop super ringan (*ultra portable*) ini sulit dijual di pasaran karena beberapa faktor diantaranya harganya mahal (semakin kecil komponen internal, maka akan semakin mahal biaya yang dibutuhkan), minim fitur (semakin mini laptop maka semakin minim fitur yang tersedia), dan hanya cocok bagi orang yang sering bepergian dan untuk menyelesaikan tugas-tugas ringan. ■ MLP

MacBook Air

Kelebihan: Sangat tipis, kontrol *trackpad* sangat berguna, cocok bagi mereka yang tidak menggunakan CD drive.

Kelemahan: Konektivitasnya terbatas, lebih lambat dari laptop Macbook lainnya, menggunakan harddisk SSD yang sangat mahal, baterai tidak bisa diganti oleh pengguna. Selain itu, laptop ini menurut USA Today, akan sulit dipasarkan kepada kelompok pebisnis.

Spesifikasi: Processor: Intel Core 2 Duo (1.66 GHz); Memory: 2 GB DDR2; Hard drive: 80 GB 4.200 rpm, Graphics: Intel GMA X3100 ; OS: Apple Mac OS X Leopard ; Dimensions: 14.2 x 10.5 x 1.9 inches ; Screen size: 13.3 inches ; Harga: \$1,704.65 - \$1,799.99. ■



Windows 7 Asli atau Palsu

Foto-foto penampilan Windows 7, sistem operasi penerus Windows Vista, bocor di internet.

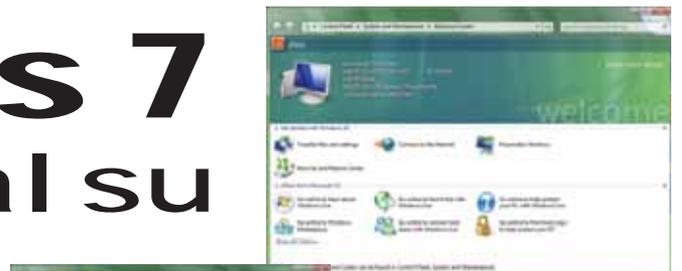
Microsoft saat ini sedang mengembangkan generasi penerus dari Windows Vista. Windows 7 yang juga dikenal dengan nama Vienna ini sudah dikembangkan bersamaan dengan Windows Vista. Namun Windows 7 makin hangat dibicarakan setelah *screenshot* atau tampilan dari Windows 7 muncul di sebuah blog China, Thinknext (thinknext.net/archives/2124). Para *geek* komputer berpendapat bahwa tampilan Windows 7 itu palsu yang sudah diolah di Photoshop.

Meski demikian, si penulis di ThinkNext memposting artikel lanjutan 'Another Windows 7 Screenshot Updates' (thinknext.net/archives/2133) untuk mengklarifikasi bahwa *screenshot* itu bukan hasil olah foto di Photoshop. Ia juga me-

nampilkan foto dan video untuk membuktikan bahwa Windows 7 itu asli. Ditambah lagi dengan pernyataan bahwa sistem operasi itu masih dalam tahap uji coba yang akan habis masa berlakunya hingga 7 Mei 2008.

Setelah menyaksikan video dan *screenshot* yang di-*posting* oleh si penulis, kebanyakan orang menaruh curiga kalau si penulis melakukan trik komputer. Mereka menduga si penulis memodifikasi Windows seperti yang dilakukan oleh Vista Transformation Pack, mengubah tampilan Windows XP menjadi mirip Windows Vista.

Screenshot itu, menurut sebagian orang palsu juga karena Microsoft sejauh ini menyatakan bahwa Windows 7 belum bisa dirilis tahun 2009 sebab pengembangan Windows 7 membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Microsoft juga



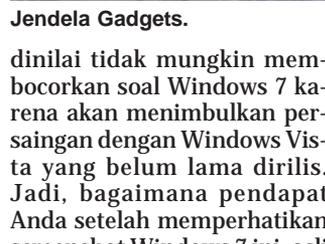
Jendela Welcome Center.



Jendela Display.



Tampilan Start Menu.



Jendela Gadgets.



Jendela System Properties.

dinilai tidak mungkin membocorkan soal Windows 7 karena akan menimbulkan persaingan dengan Windows Vista yang belum lama dirilis. Jadi, bagaimana pendapat Anda setelah memperhatikan *screenshot* Windows 7 ini, asli atau palsu? ■ MLP

“Selain memperbarui kernel Windows, kabarnya Windows 7 dibuat touch capable. Walaupun lebih banyak ditujukan pada Windows tablet version, sistem touch-nya akan dibuat lebih hebat dari itouch yang dirilis Apple.”

Habitat Baru Si Kepala Bundar

Tim survey dari Balai Taman Nasional Kayan Mentarang menemukan habitat pesut (*Orcaella brevirostris*). Mamalia air tawar terakhir ini terancam punah dan telah masuk dalam Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Menurut Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang IGNN Sutedia, habitat pesut Mahakam ditemukan di Sungai Sesayap yang mengalir dari wilayah hulu Malinau melalui Kabupaten Bulungan. Sutedia menjelaskan, selama ini pesut Mahakam hanya diketahui berada di sepanjang perairan Sungai Mahakam, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang Kalimantan Timur.

Tim survey pada 10-12 Januari 2008 telah berhasil merekam melalui kamera video dan kamera digital tujuh ekor pesut. Pertama kali muncul ke permukaan air sungai satu ekor pesut muda dengan dua kali loncatan kecil. Hanya tampak punggung dan sirip bagian atasnya saja yang berlokasi di perairan teluk Sesino, Berikutnya sebanyak 6 ekor pesut ditemukan di perairan Lubok Langit, di seberang Desa Sengkong.

Menurutnya, survei kali ini merupakan kali yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada Agustus 2007. Saat itu tim juga melakukan survei pada lokasi yang sama dan menemukan 11 ekor pesut.

Tidak seperti mamalia air lain yakni lumba-lumba dan ikan paus yang hidup di laut, pesut hidup di sungai-sungai daerah tropis. Populasi satwa langka yang dilindungi Undang-Undang ini hanya terdapat pada tiga lokasi di dunia

Dahulu pesut pernah ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan, tetapi sekarang pesut menjadi satwa langka.



Habitat baru di sungai Sesayap.

yakni Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Ira-wady.

Dahulu pesut pernah ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan, tetapi sekarang pesut menjadi satwa langka. Kecuali di sungai Mahakam, di tempat ini habitat Pesut Mahakam dapat ditemukan ratusan kilometer dari lautan yakni di wilayah kecamatan Kota Bangun, kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Habitat hewan pemangsa ikan dan udang air tawar ini dapat dijumpai di perairan Sungai Mahakam, danau Jempang (15.000 Ha), danau Semayang (13.000 Ha) dan danau Melintang (11.000

Ha).

Pesut mempunyai kepala berbentuk bulat (seperti umbi) dengan kedua matanya yang kecil (mungkin merupakan adaptasi terhadap air yang berlumpur). Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah - tidak ada pola khas. Sirip punggung kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahi tinggi dan membundar; tidak ada paruh. Sirip dada lebar membundar.

Pesut bergerak dalam kawanan kecil. Walaupun pandangannya tidak begitu tajam dan kenyataan bahwa pesut hidup dalam air yang mengang-

dung lumpur, namun pesut merupakan 'pakar' dalam mendeteksi dan menghindari rintangan-rintangan. Barangkali mereka menggunakan ultrasonik untuk melakukan lokasi gema seperti yang dilakukan oleh kerabatnya di laut.

Populasi Menyusut

Populasi hewan ini terus menyusut akibat habitatnya terganggu, terutama makin sibuknya lalu-lintas perairan sungai Mahakam, serta tingginya tingkat erosi dan pendangkalan sungai akibat pengelolaan hutan di sekitarnya. Kelestarian pesut Mahakam juga diperkirakan terancam akibat terbatasnya bahan makanan berupa udang dan ikan, karena harus bersaing dengan para nelayan di sepanjang Sungai Mahakam.

Pada April 2005, seekor pesut ditemukan mengapung sekarat oleh seorang nelayan. Kondisi mamalia air tawar itu mengengaskan dengan bagian tubuh yang compang-camping karena kulitnya sudah mengelupas dan berdarah.

Pesut yang dari ciri fisiknya persis seperti yang ditemukan ratusan kilometer di selatan Sungai Mahakam, itu lalu diotopsi. Pembedahan mengungkap nasib yang lebih tragis lagi, organnya ternyata mengalami perdarahan. Sebelum tertabrak kapal cepat ataupun ketinting, kapal kayu yang di tempeli motor, yang ramai melintas dari Tarakan menuju Malinau, atau sebaliknya, pesut itu kemungkinan keracunan.

Berdasarkan dialog dengan para nelayan yang bermukim di sepanjang Sungai Sesayap, keberadaan pesut itu sudah diketahui sejak dahulu kala. Penduduk setempat menamakannya *lamud*. Dalam bahasa suku Tidung, *lamud* artinya lumba-lumba.

Satwa ini dikeramatkan masyarakat Tidung yang hidup turun temurun di pinggir sungai Sesayap. Hal inilah yang secara otomatis membentuk suatu kearifan lokal di kehidupan masyarakat untuk melestarikan pesut dan membiarkannya hidup berdampingan dengan manusia. ■ RH

Listrik, Lumpur Lapindo, dan Natuna

Persoalan krisis listrik di negeri ini belum bisa diatasi walau sudah menjadi "penyakit tahunan". Sama halnya dengan masalah lumpur Sidoarjo, penyelesaiannya masih berputar-putar sekitar mencari apa penyebabnya.

Sementara itu, setelah sekian lama tidak ada kesepakatan antara pemerintah dengan ExxonMobil mengenai pengelolaan Blok Natuna, akhirnya pemerintah memutuskan menyerahkan pengelolaan pengeboran di Kepulauan Riau itu kepada Pertamina. Topik-topik ini diangkat beberapa majalah nasional sebagai laporan utama awal Maret ini.

Majalah *Gatra* (28/2-5/3) yang mengangkat laporan utama tentang krisis listrik menyebutkan, krisis listrik akibat keterlambatan pasokan bahan bakar batu bara ke pembangkit listrik di Pulau Jawa memaksa diadakannya pemadaman bergilir di Pulau Jawa dan Bali. Pemadaman itu telah menimbulkan kemacetan sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah yang tidak siap dengan sumber listrik cadangan. Keterlambatan pasokan batu bara itu sendiri disebabkan "mengamuknya" Laut Jawa dan Samudra Hindia beberapa pekan terakhir yang membuat kapal pengangkut batu bara bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa terlambat. Beberapa tongkang pengangkut batu bara itu ada yang terpaksa bersandar beberapa hari di pelabuhan terdakat, bahkan ada yang terpaksa buang sauh di tengah laut selama sepekan sebelum berhasil membongkar muatannya di dermaga tujuan.

Untuk mengantisipasi krisis listrik akibat kurangnya pasokan batu bara, salah satu upaya yang diminta dilakukan pemerintah adalah membatasi ekspor batu bara dan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sementara kepada masyarakat pelanggan sendiri diminta agar melakukan penghematan pemakaian listrik. Untuk merangsang pelanggan melakukan penghematan, PLN pun memberikan diskon 20% bagi pemakai listrik kurang dari 80% rata-rata konsumsi nasional per pelanggan. Sebaliknya, jika pemakaian lebih dari rata-rata konsumsi nasional, pelanggan malah dikenakan 1,6 kali dari harga normal.

Sementara laporan utama majalah *Tempo* (25/2-2/3), kembali mengangkat kasus lumpur panas Sidoarjo. Kali ini,

Tempo mengangkat topik ini terkait perbedaan pendapat di DPR dalam menyimpulkan penyebab terjadinya semburan lumpur. Sebagian anggota Dewan mengusulkan untuk menanyakan kepada presiden (interpelasi), tapi sebagian lagi mengusulkan untuk memperpanjang masa kerja Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Lapindo saja. Perbedaan pendapat itu sendiri berawal dari kesimpulan tim pengawas yang dibentuk pada 9 September 2007. Kesimpulan tim yang beranggotakan 29 orang dari perwakilan semua fraksi di DPR dan diketuai Soetardjo Soerjogoeitno itu menyebutkan, bahwa pendapat para ahli geologi masih terpecah mengenai penyebab semburan. Sebagian ahli berpendapat bahwa semburan lumpur tak terkait dengan pengeboran Lapindo, sedangkan sebagian lagi berpendapat sebaliknya.

Terakhir, sesuai laporan *Tempo*, rapat Paripurna DPR memutuskan akan meminta penjelasan Presiden sebelum mengambil kata akhir soal penyebab semburan lumpur yang pertama kali terjadi 29 Mei 2006 tersebut. Sedangkan menurut *Tempo*, dari data, dokumen, dan informasi yang dihimpun, semakin jelas tergambar bahwa bencana itu bukan dipicu oleh gempa bumi di Yogyakarta. Indikasi kesalahan prosedur pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc, kian kentara.

Berbeda dengan dua majalah di atas, majalah *Trust* (25/2-2/3) menyoro-

ti pengalihan pengelolaan Blok Natuna. Menurut laporan *Trust*, setelah perundingan kontrak pengelolaan Natuna antara pemerintah dan ExxonMobil mengalami kebuntuan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D-Alpha kepada Pertamina. Diisukan, posisi ExxonMobil nantinya akan diganti oleh perusahaan asal Jepang. ExxonMobil sendiri masuk ke kawasan Kepulauan Riau sudah sejak tahun 1980-an yang bergandengan dengan Pertamina. Seiring dengan perjalanan waktu, perusahaan asal Amerika yang mulai dari nol itu akhirnya menyangkangi 76% saham pengelolaan di Natuna sementara sisanya dipegang oleh Pertamina. Sebelum kontrak habis pada tahun 2005, ExxonMobil mengajukan perpanjangan selama dua tahun. Tapi, hingga awal tahun 2008, negosiasi kedua pihak tidak menemui kata sepakat. Akhirnya, pemerintah memutuskan menyerahkan pengelolaan kepada Pertamina.

Menurut sumber *Trust*, ExxonMobil memang disuruh Jusuf Kalla untuk keluar dari Natuna dengan ikhlas. Sebagai kompensasi, ExxonMobil akan diberi uang ganti rugi sebesar US\$ 200 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun. Skenario selanjutnya, karena Pertamina



tidak akan mampu mengerjakan Blok Natuna sendiri, Pertamina akan mencari mitra kerja yang dapat mendukung pendanaan dan teknologi Pertamina. Di sinilah diisukan masuknya perusahaan Jepang yang digandang oleh Halim Kalla – adik Jusuf Kalla yang selama ini mengendalikan Grup Bukaka. Namun, sumber *Trust* lain mengatakan, pendamping Pertamina nantinya bisa juga datang dari Cina. Sesuai dengan kabar yang dilansir *Trust*, kunjungan kenegaraan Jusuf Kalla ke Cina beberapa waktu silam, juga sempat membicarakan masalah itu. ■ MS

Punk Band Pemberi Inspirasi

MxPx sudah menjadi inspirasi (*thought provoking*) bagi banyak orang terutama kawula muda yang gemar aliran punk.

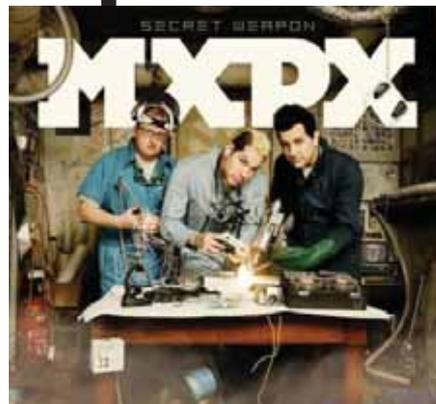
Masih lekat dalam ingatan, kebiasaan seorang teman saya mengoleksi album kaset yang diperoleh dari pasar loak di pinggir jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Dengan gayanya yang khas 'anti-kemapanan' (baca juga: sederhana), ia mengoleksi kaset-kaset band MxPx yang entah bagaimana banyak beredar di sana. Padahal saat itu, sekitar tahun 97-an, grup musik punk-rock ini masih sangat jarang ditemukan di toko-toko penjualan kaset resmi. Saat itu, ia berhasil 'mengumpulkan' beberapa album MxPx seperti Pokinatcha, Teenage Politics, Life in General, Let it Happen dan The Ever-passing Moment.

Beberapa lagu sempat menjadi lagu 'theme' yang sering kami bahas saat kuliah. Salah satunya lagu berjudul 'Want Ad' dari album "Pokinatcha". Lagu ini boleh dibilang lagu yang mewakili impian pria jomblo akan gadis idamannya. *I need the kind of girl that knows... a girl that likes to wear my clothes... someone who always buys me coke... someone who laughs at all my jokes... that's the girl that i want to see fall in love...* Selain mengusung tema cinta yang ringan dan tidak cengeng, lirik-lirik lagu MxPx penuh dengan pesan-pesan positif agar tidak mudah menyerah, bangkit dari kegagalan, dan menghargai hidup. Lirik-lirik yang vulgar, rasis, penuh makian yang diusung grup musik punk lainnya tidak kami jumpai di MxPx.

Pengalaman sepuluh tahun lalu ini kembali teringat saat mengetahui MxPx akhirnya menggelar konsernya di Jakarta pertengahan Januari 2008 lalu. Kami berkesempatan menyaksikan konser yang menjadi pembuka rangkaian tur keliling dunia MXPX berlangsung hingga 7 Juni mendatang dengan tajuk "Secret Weapon Tour 2008". Tur ini dirancang dalam rangka memperkenalkan album ke-16 MxPx.

Penampilan MxPx dibuka dengan sejumput lirik dari refrain lagu baru berjudul *Secret Weapon* yang dinyanyikan dengan suara tinggi. Sekitar 2.000 penonton yang memenuhi Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menjadi 'gokil' dengan menari, melompat-lompat dan ber-*moshingria*. Penonton di tribun, yang sebelumnya lebih banyak duduk, ikut berdiri dan meloncat-loncat. *Take back the stolen years, the truth will set you free; Don't lady down and lie, shut down the fallacies; Throw all of your fears into the*

sea; You are your own secret weapon; It's all up to you, to come out swingin'; It's all up to you! (Rebut kembali tahun-tahun yang hilang, kebenaran akan memerdekanmu; Jangan membohongi diri sendiri, hentikan semua pikiran yang salah; Buang semua ketakutanmu ke dalam laut). Kemudian disambung dengan lagu-lagu seperti 'Shut It Down', 'Here's to the Life', 'Drowning', 'You're on Fire', dan 'Never Better Than Now'. Selain



Album Secret Weapon (2007).



MXPX dengan gayanya yang khas 'anti-kemapanan'.

dari album baru, MXPX membawakan lagu-lagu dari album sebelumnya, seperti Chick Magnet dan Responsibility. Sebagai lagu terakhir, mereka membawakan hit yang berasal dari album Teenage Politics, Punk Rock Show. Singkat cerita, semua penonton tersenyum puas setelah konser MxPx ini berakhir.

Band yang dibentuk tahun 1993 di Bremerton, Washington ini terdiri dari tiga orang punkers, Mike Herrera (bas, gitar, dan vokal), Yuri Ruley (drum dan vokal latar), Andy (gitaris pertama MxPx) yang waktu itu masih SMU.

Kesukaan Andy pada kaus bermotif kotak-kotak menjadi inspirasi nama band mereka, Magnified Plaid - sebenarnya mereka pun tidak menyukai nama ini hingga mereka singkat menjadi M.P. Tapi di tangan Yuri yang juga menjabat sebagai desainer dari poster/flyer konser awal mereka, nama ini berubah jadi MxPx yang bertahan sampai sekarang.

Waktu anak muda seusia mereka baru punya SIM, mereka sudah merilis debut album mereka, 'Pokinatcha' di bawah Tooth and Nail Records (disingkat T&N Records), yang dengan cepat menjadi album *best-seller* Tooth and Nail tahun 1995. Tapi setelah debut album mereka

keluar, karena beberapa hal, posisi Andy digantikan oleh Tom Wisniewski. Formasi Tom dan Yuri ternyata klop banget dalam bermusik - mungkin salah satu alasannya karena Tom sempat menjadi drummer selama setahun, dalam band lain.

Lewat 'Pokinatcha', MxPx menjadi terkenal di komunitas *skate/surf* dan *punk underground* yang dengan cepat diikuti oleh "Teenage Politics" dengan *hit single*-nya "Teenage Politics". Tidak lama kemudian mereka diwisuda (SMU) dan hanya 2 hari setelahnya, MxPx pergi tur keliling AS pertama.

Jalan menuju sukses semakin terbuka ketika album ke-5 'Life In General' dirilis tahun 1997, ketika label A&M Records tertarik dan kemudian bekerjasama dengan T&N Records merilis ulang album tersebut. Album ini menghasilkan klip "Chick Magnet" yang sering diputar di MTV dan membawa MxPx tur dengan band-band seperti Rancid, Bad Religion dan NOFX. Bahkan album ini juga dirilis oleh perusahaan rekaman Indonesia, setelah sebelumnya, hampir semua album mereka sudah beredar secara *underground* (penjual kaset bajakan di pinggir jalan) di Indonesia. Album terbaru mereka *Secret Weapon* dirilis tahun 2007 lalu. ■ MLP

PSSI Ditunggu 5 Agustus

Surat yang selalu dituntut Nurdin Halid akhirnya tiba. Februari lalu, FIFA mengirim surat kepada PSSI yang menegaskan agar segera merevisi statutenya, selanjutnya memilih ulang ketua umum.

Persepakbolaan nasional selama ini sangat menonjol dari sisi buruknya. Kerusuhan suporter, prestasi yang 'jalan di tempat', statuta dan kepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang ditolak FIFA, serta masalah lainnya. Di tengah carut marutnya masalah itu, khusus masalah di tubuh PSSI baru-baru ini semakin dekat pada kejelasan. Pada bulan Februari lalu, tepatnya tanggal 5 Februari, organisasi sepakbola dunia (Federation Internationale de Football Association / FIFA) mengirim surat kepada PSSI yang menegaskan PSSI harus merevisi statuta-nya paling lambat tiga bulan setelah surat tersebut (5 Februari). Selanjutnya, PSSI juga harus memilih ulang ketua umumnya paling lambat tiga bulan setelah statuta baru disahkan FIFA. Dengan demikian, berarti ketua umum yang

baru, pengganti Nurdin Halid sudah harus terpilih paling lambat 5 Agustus 2008.

Seperti diketahui, statuta PSSI saat ini dan Ketua Umum Nurdin Halid, tidak diakui oleh FIFA. Sejak Juni 2007, FIFA sudah meminta PSSI agar merevisi statutenya dan memilih ulang Nurdin Halid yang terpilih di Makassar 2007 lalu. Pada sidang Komite Asosiasi di Zurich Swiss, 28 Oktober 2007, organisasi pimpinan Sepp Blatter itu kembali menegaskan kepada PSSI agar melakukan revisi dan pemilihan ulang. Namun, para petinggi PSSI selalu berkilah tidak mau mengganti Nurdin Halid karena tidak ada surat FIFA yang meminta PSSI melakukan pemilihan ulang.

Jika selama ini sikap para petinggi PSSI yang terkesan ragu-ragu mengganti Nurdin Halid, masih bisa dimaafkan. Tapi kini, setelah kedatangan surat FIFA tersebut, PSSI mau



Nurdin Halid menunggu lengser.

foto: berindo wilson

tidak mau harus mengganti Nurdin. Sebab kalau tidak, berarti PSSI memilih bunuh diri, alias memilih 'bercerai' dengan FIFA yang telah diikutinya sejak tahun 1952 itu. Dengan begitu pula, berarti Indonesia akan disingkirkan dari pentas persepakbolaan regional dan internasional.

Kini pecinta sepak bola Tanah Air hanya banyak berharap, melalui *moment* "pemaksaan" FIFA ini, PSSI yang didirikan 19

April 1930 itu kembali bisa menjadi kebanggaan bangsa sekaligus jadi alat pemersatu anak-anak negeri sebagaimana maksud sang pendiri sekaligus ketua umum pertamanya dulu, Ir. Soeratin. Satu-satunya cara mewujudkan itu adalah merevisi statuta dan memilih pengurus PSSI, terutama ketua umumnya dari tokoh yang bisa jadi panutan dan memiliki integritas tinggi, mencintai sepak bola, serta berwibawa. ■ MS

Majukan Olahraga dengan UU SKN

Sejak Februari 2008, Undang-Undang No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) mulai berlaku efektif. Tapi, Pasal 40 yang mengatur larangan pejabat publik menjabat pengurus KONI baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, mendapat tanggapan pro kontra dari publik. Bahkan, pihak yang kontra mengajukan uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adalah Ketua KONI Jatim, Saleh Ismail Mukaddar, dan Ketua KONI Sumsel yang juga Gubernur Sumatera Selatan Syahril Oesman yang mengajukan uji materi pasal 40 UU No.3/2005 ke MK. Sidang pertama uji materi itu sudah digelar pada 8 Januari silam. Tapi, pada sidang kedua, Syahril Oesman mengundurkan diri dengan alasan tidak ingin membuat polemik berkepanjangan dalam olahraga nasional.

Menurut Saleh Ismail Mukaddar, ada pelanggaran HAM pada UU No.3/2005 itu. Konkretnya, menurut dia, pemerintah (Menegpora) serta

DPR selaku pembuat UU telah melanggar haknya menjalankan tanggung jawab sosial di KONI. Dan menurutnya, di sebagian besar daerah, peran pejabat publik masih sangat penting dalam pengumpulan dana. Keterlibatan secara sukarela pengusaha atau badan usaha dalam dunia olahraga masih sebatas komitmen. Inisiatif harus datang dari pejabat publik yang merangkap sebagai pengurus olahraga.

Mantan Gubernur DKI yang juga Ketua Umum PB PBSI, Sutiyoso juga mengatakan prihatin atas keluarnya UU No.3/2005 itu. Menurutny, keterlibatan pejabat publik masih sangat diperlukan saat ini. Kalangan profesional dinilai belum mampu mengambil alih tanggung jawab, khususnya dalam pengumpulan dana. Bang Yos menganjurkan, UU SKN diterapkan secara bertahap. "Apabila nanti sudah mampu, ya buat apalagi pejabat-pejabat ngurus kayak begituan," katanya.

Sementara Menegpora Adhyaksa Dault sebagai inisiator penerbitan undang-undang itu menga-

takan, alasan pemuatan pasal 40 itu adalah agar pembinaan olahraga ditangani secara totalitas. Sebab, jika pengurus KONI dipegang pejabat publik yang sibuk dengan urusan di luar olahraga, menurutnya keolahragaan nasional akan susah maju.

Senada dengan Menegpora, Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin juga mengatakan, dunia olahraga nasional saat ini membutuhkan orang-orang profesional yang sungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya untuk olahraga. "Kalau diurus setengah hati, setengah waktu, hasilnya juga pasti cuma setengah-setengah. Seperti prestasi olahraga kita sekarang ini" ujarnya seperti ditulis *Gatra* (14-20/2)

Sedangkan menjawab kekhawatiran bahwa olahraga akan sulit mendapatkan sumber dana setelah pejabat publik tidak boleh lagi memegang pengurus KONI, mantan Dirjen Olahraga dan Sekretaris Menegpora Toho Holik Mutohir mengatakan, jusru olahraga mendapatkan tantangan untuk lebih kreatif menggali sumber dana. ■ MS

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY